HARIAN ACEH INDONESIA

TEBAL
31 Hal
WWW.HARIANACEH.CO.ID

SELASA, 17 NOVEMBER 2026 | HARIANACEH.co.id | WWW.HARIANACEH.CO.ID · EDISI NO. 16

NASIONAL

Viral Tahanan Makan Bersama di Restoran Mewah, Polda Sumut Minta Maaf

Oleh Redaksi · 17 Nov, 19.55 WIB



BANDA ACEH - Viral di media sosial, sejumlah tahanan kasus narkoba yang mengenakan baju warna orange bertuliskan tahanan dengan tangan diborgol, makan bersama dengan polisi di salah satu restoran mewah yang ada di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara.Dalam video viral itu, para tahanan duduk bersama dengan para polisi yang mengenakan pakaian putih dan pria mengenakan pakaian provost, duduk berhadap-hadapan.

Dari informasi yang didapat, Selasa (17/11), menyebutkan tahanan yang makan bersama anggota polisi merupakan pelaku tindak pidana narkoba Polres Asahan.

Menanggapi itu, Kasat Narkoba Polres Asahan, AKP Gunawan, saat dikonfirmasi membenarkan rekaman video viral di media sosial yang memperlihatkan sejumlah tahanan narkoba makan bersama personel polisi di salah satu restoran.

Ia menjelaskan, awalnya sejumlah tahanan dengan pengawalan ketat dibawa dari Mapolres Asahan untuk menghadirkan konferensi pengungkapan kasus narkoba di Mapolda Sumut, Senin (16/11).

"Karena dari pagi belum sarapan dan setelah acara konferensi pers di Polda Sumut selesai, anggota membawa tahanan itu untuk makan. Setelah itu kembali ke Mapolres Asahan," jelasnya bahwa saat makan para tahanan itu mendapat pengawalan sangat ketat.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

BBPOM Aceh dan PPMHKP Perkuat Pengawasan Pangan Ikan untuk Program MBG



BANDA ACEH – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) bersama Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Banda Aceh memperkuat kolaborasi dalam menjamin mutu dan keamanan pangan asal ikan guna mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berkualitas di …

Selengkapnya di halaman 16 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Dokter Tifa Prediksi Wapres Praowo dari Militer, ‘Seorang Jenderal’



BANDA ACEH - Teka-teki sosok Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka memunculkan beragam prediksi. Dokter Tiffauzia Tyasumma atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa memperkirakan Presiden Prabowo Subianto tidak akan memilih kandidat dari internal Partai Gerindra, melainkan sosok berlatar belakang militer.Prediksi tersebut disampaikan Dokter Tifa melalui unggahannya di media …

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

DALAM EDISI INI

NASIONAL 2
ACEH 16
EKONOMI 20
HIBURAN 22
OPINI 24
Aneka Berita 27

NASIONAL

Kembali Dapat Dukungan untuk Jadi Cawapres, Dasco Disebut Prodem Representasi Kepemimpinan Sipil



BANDA ACEH - Dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil presiden (wapres) menggantikan Gibran Rakabuming Raka kembali muncul. Kali ini datang dari Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Iwan Sumule. Dia menyebut, Dasco merupakan representasi kepemimpinan sipil.

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri Buntut Kasus Penyadapan Prabowo



BANDA ACEH - Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Putusan tersebut terkait kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

"Terduga pelanggar EHS, hasil sidang KKEP putusan sidang pertama sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggaran perbuatan tercela.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

33 BERITA

NASIONAL

Viral Tahanan Makan Bersama di Restoran Mewah, Polda Sumut Minta Maaf

Oleh Redaksi · 17 Nov, 19.55 WIB



BANDA ACEH - Viral di media sosial, sejumlah tahanan kasus narkoba yang mengenakan baju warna orange bertuliskan tahanan dengan tangan diborgol, makan bersama dengan polisi di salah satu restoran mewah yang ada di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara.Dalam video viral itu, para tahanan duduk bersama dengan para polisi yang mengenakan pakaian putih dan pria mengenakan pakaian provost, duduk berhadap-hadapan.

Dari informasi yang didapat, Selasa (17/11), menyebutkan tahanan yang makan bersama anggota polisi merupakan pelaku tindak pidana narkoba Polres Asahan.

Menanggapi itu, Kasat Narkoba Polres Asahan, AKP Gunawan, saat dikonfirmasi membenarkan rekaman video viral di media sosial yang memperlihatkan sejumlah tahanan narkoba makan bersama personel polisi di salah satu restoran.

Ia menjelaskan, awalnya sejumlah tahanan dengan pengawalan ketat dibawa dari Mapolres Asahan untuk menghadirkan konferensi pengungkapan kasus narkoba di Mapolda Sumut, Senin (16/11).

"Karena dari pagi belum sarapan dan setelah acara konferensi pers di Polda Sumut selesai, anggota membawa tahanan itu untuk makan. Setelah itu kembali ke Mapolres Asahan," jelasnya bahwa saat makan para tahanan itu mendapat pengawalan sangat ketat.

Pemandangan langka itu terjadi tak lama setelah Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan menggelar konferensi pers pengungkapan kasus yang dilakukan pihaknya dari tanggal 1 Oktober hingga 15 November 2026.

PERMINTAAN MAAF

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), turut merespon video viral yang memperlihatkan sejumlah tahanan kasus narkoba sedang makan bersama anggota polisi di salah salah satu restoran yang ada di Jalan SM Raja, Kota Medan, Sumatera Utara.

Kapolda Sumut melalui Kabid Humas Kombes Ferry Walintukan membenarkan dan menyampaikan permintaan maaf ke publik atas kejadian yang menyita perhatian publik tersebut. Mereka berjanji juga akan memproses anggota yang turut serta dalam kegiatan tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

"Benar di dalam video tersebut adalah anggota kami. Kami atas nama Polda Sumatera Utara menyampaikan permintaan maaf apabila masyarakat atau publik merasa tidak nyaman atas kejadian tersebut. Ketiga, kami akan proses anggota kami bila terbukti melakukan pelanggaran dalam video tersebut," sebut Kombes Pol Dr Ferry Walintukan, Selasa (17/11/2026) pagi.

Lebih lanjut Ferry juga menambahkan pasca video viral tersebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam), Polda Sumut untuk melakukan pemeriksaan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri Buntut Kasus Penyadapan Prabowo

Oleh Redaksi · 17 Nov, 19.56 WIB



BANDA ACEH - Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Putusan tersebut terkait kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

"Terduga pelanggar EHS, hasil sidang KKEP putusan sidang pertama sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggaran perbuatan tercela. Sanksi administratif PTDH ," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Pada sidang KKEP, kata Trunoyudo, terduga pelanggar melakukan permufakatan kegiatan illegal access milik Polri untuk penyadapan tidak profesional dan prosedural. Putusan tersebut tertuang dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang digelar secara tertutup oleh Polri.

Sidang KKEP tersebut dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo selaku Ketua Komisi merangkap anggota, didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota.

Sementara itu, anggota komisi terdiri dari Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Toni Ariadi Efendi.

Eko diduga melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.

Mabes Polri telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026.

Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh Politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha.

Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun. Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana selama delapan tahun

NASIONAL

Polisi Temukan Celana saat Olah TKP Dugaan Pemerkosaan di Rumah Dinas Bupati Kupang

Oleh Van · 16 Nov, 22.46 WIB

KUPANG — Polisi menemukan satu potong celana saat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kasus dugaan pemerkosaan di rumah dinas Bupati Kupang, Senin, 16 November 2026.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda NTT, Kombes Nova Irone Surentu, mengatakan celana tersebut telah diamankan sebagai barang bukti.

"Olah TKP sudah kami laksanakan dan hasilnya kami menemukan satu celana yang digunakan pada saat korban disuruh menggunakan oleh YL," kata Nova dalam konferensi pers di Mapolda NTT, Senin.

Olah TKP dilakukan di rumah jabatan Bupati Kupang, Yosef Lede, di Jalan RA Kartini, Kota Kupang. Bupati Kupang turut berada di lokasi saat proses pemeriksaan berlangsung.

"(Terlapornya) ada, dia kooperatif mempersilakan kami melaksanakan olah TKP," jelas Nova.

Polisi Periksa Sejumlah Saksi

Penyidik telah memeriksa enam orang saksi, termasuk korban dan kedua orang tuanya. Polisi juga memanggil dua orang yang disebut membawa korban ke rumah dinas untuk diperiksa.

Namun, keduanya belum memenuhi panggilan pemeriksaan hingga Senin siang. Penyidik berencana menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Kupang setelah seluruh saksi diperiksa.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mahasiswi yang Laporkan Bupati Kupang atas Dugaan Pemerkosaan Ternyata Anak Polisi

Oleh Redaksi · 16 Nov, 20.11 WIB

BANDA ACEH - Perempuan berusia 21 tahun yang melaporkan Bupati Kupang Yosef Lede atas dugaan pemerkosaan merupakan anak seorang anggota polisi aktif yang bertugas di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan ayah mahasiswi itu merupakan anggota Polri yang bertugas di Rote Ndao.

"Iya benar, ayah korban itu anggota polisi, tugas di Rote Ndao," ungkap Henry.

Pelapor sendiri merupakan mahasiswi semester empat di Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang.

Henry mengatakan dugaan peristiwa tersebut terjadi di rumah dinas Bupati Kupang di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu (11/11/2026) malam.

Dugaan pemerkosaan itu bermula ketika korban diajak oleh tantenya, EK, untuk bertemu dengan Yosef Lede di rumah jabatan bupati. Saat itu, korban disebut datang bersama tantenya dan beberapa teman.

"Awalnya korban dengan tantenya dan ada beberapa temannya pergi bermain di rumahnya bupati. Pokoknya bermain-bermainlah di rumah jabatan," ujar Henry.

Setibanya di rumah jabatan, korban bersama rombongan disebut dijamu makan malam oleh Yosef.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Raffi Ahmad-Nagita Slavina hingga Najwa Shihab jadi Korban Sadap Listyo Sigit

Oleh Redaksi · 16 Nov, 20.24 WIB

BANDA ACEH -Sejumlah nama influencer dan artis ikut jadi korban penyadapan yang diduga dilakukan mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk.

Terbaru, hasil pengembangannya, pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, jurnalis Najwa Shihab, serta Alfito Deanofa yang disebut-sebut jadi korban penyadapan tersebut.

"Benar, artis RA dan istrinya NS alias G, jurnalis NS dan ADG,"kata Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Brigjen Suhermanto dalam keterangannya pada Senin, 16 November 2026

Bukan hanya itu, pegiat media sosial Denny Siregar juga ikut disadap oleh Listyo Sigit Prabowo dkk.

Bahkan selain kalangan artis, beberapa Gubernur dan Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri serta organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis dan mahasiswa turut jadi korban penyadapan.

Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan empat tersangka mulai dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kadivkum Polri, Irjen Ahrie Sonta; Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Eko Hadi Santoso; dan Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sedangkan Slamet Uliandi belum ditahan karena sakit

NASIONAL

Kembali Dapat Dukungan untuk Jadi Cawapres, Dasco Disebut Prodem Representasi Kepemimpinan Sipil

Oleh Redaksi · 17 Nov, 18.33 WIB



BANDA ACEH - Dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil presiden (wapres) menggantikan Gibran Rakabuming Raka kembali muncul. Kali ini datang dari Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Iwan Sumule. Dia menyebut, Dasco merupakan representasi kepemimpinan sipil.

Kepada awak media, Iwan menyatakan bahwa Dasco bisa mengawal dan memastikan pengejawantahan amanat reformasi yang diperjuangkan oleh dirinya bersama aktivis 98 lain. Terlebih, wakil ketua DPR itu sudah berulang menjadi jembatan antara suara masyarakat sipil dengan negara.

”Dasco juga memiliki kemampuan menjembatani kepentingan rakyat dan negara, sebagai problem solver yang efektif dan realistis menemukan solusi permasalahan kebangsaan, sekaligus cita-cita mewujudkan kehadiran demokrasi di setiap sendi kehidupan hingga ke piring-piring rakyat,” kata Iwan pada Selasa (17/11).

Dari aspek Politik, Iwan mengungkapkan bahwa modal Dasco sangat kuat. Baik dari internal Gerindra maupun dari berbagai elemen dan simpul-simpul perwakilan masyarakat di seluruh Indonesia.

Menurut dia, dukungan itu datang karena rekam jejak Dasco selama bertugas di parlemen. Politisi berjuluk kancil itu sudah menunjukkan kapasitas komunikasi dan inisiatif politik yang matang. Dasco diyakini mampu menjaga stabilitas demokrasi dan pemerintahan di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto.

Setidaknya ada dua poin utama sebagai sumber kekuatan Dasco. Pertama, dia punya kemampuan konsolidasi yang solid dalam mencairkan kebekuan komunikasi, kebuntuan politik, serta merajut berbagai simpul kekuatan politik dan sosial yang beragam. Sehingga stabilitas politik dan ekonomi tetap terjaga.

Kedua, lanjut Iwan, dalam berbagai situasi kritis yang menguji dinamika kebangsaan, Dasco sudah terbukti memahami kapan harus tampil di garis depan untuk mengambil sikap tegas. Dia juga tahu kapan harus bekerja senyap di balik layar untuk menghadirkan solusi memicu kegaduhan.

”Dalam politik, kecerdasan membaca momentum adalah kunci. Dasco sudah membuktikan kapasitasnya. Tahu persis kapan harus pasang badan di depan publik dan kapan harus merajut kesepakatan di belakang layar,” ujarnya.

Namun demikian, Iwan kembali menegaskan, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo. Nama calon wapres yang akan diserahkan kepada MPR tetap menjadi hak presiden sebagai kepala negara. Dia memastikan akan mendukung siapa pun yang nanti diusulkan oleh Prabowo.

”Pada akhirnya, apa pun putusan akhir Presiden Prabowo, saya tetap mendukung sepenuhnya. Presiden Prabowo sendiri yang paling memahami kebutuhan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Bursa Wapres Memanas: Rocky Gerung Muncul sebagai Alternatif dari Kalangan Intelektual

Oleh Redaksi · 16 Nov, 19.51 WIB

BANDA ACEH – Di tengah kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri pada 12 November 2026, nama Rocky Gerung mulai ramai dibicarakan sebagai salah satu figur alternatif pengganti. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang dikenal kritis dan berlatar akademisi ini masuk dalam daftar usulan publik, meski belum menjadi kandidat resmi dari lingkaran kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR dan Presiden Prabowo setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan dokumen pendidikan yang digunakannya saat pencalonan 2024. MPR dijadwalkan menggelar sidang paripurna pada 2 Desember 2026 untuk memilih pengganti dari dua nama yang akan diajukan Prabowo. Proses ini harus selesai dalam batas waktu maksimal 60 hari sesuai konstitusi.

Nama Rocky Gerung pertama kali mengemuka lewat prakarsa publik “Indonesia List” yang diinisiasi alumni Magister Ilmu Politik Universitas Nasional. Dalam daftar awal, Rocky disebut bersama Alissa Wahid, Chatib Basri, Gita Wirjawan, dan Yuddy Chrisnandi. Inisiatornya menilai Rocky layak dipertimbangkan karena kapasitas intelektual, rekam jejak sebagai komentator politik, serta posisinya saat ini sebagai anggota Wantimpres yang dilantik Prabowo pada 2 Oktober 2026.

Rocky sendiri sebelumnya bersikap tegas soal polemik Gibran. Ia berulang kali menyatakan bahwa semua jalur hukum sudah berakhir dan semua pihak, termasuk pemerintah, harus mengikuti putusan MK dan MA tanpa membuat manuver di luar aturan. “Kalau sudah finish, ngapain? Semua jalur tersedia dan semua jalur sudah menyimpulkan,” ujarnya saat di Bandung pada 11 November 2026.

Pendapat soal kemungkinan Rocky menjadi calon wapres terbelah. Sejumlah pengamat menilai kehadirannya bisa membawa angin segar karena latar belakang non-partisan dan kemampuan analisis kebijakan. Namun, banyak yang skeptis karena Rocky belum memiliki basis politik formal dan masih relatif baru di lingkaran istana.

Pengamat Politik Muhammad Gumarang menilai posisi Rocky di Wantimpres justru menjadi ujian konsistensi. “Kritiknya masih landai-landai saja dibandingkan saat ia di luar pemerintahan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Dokter Tifa Prediksi Wapres Praowo dari Militer, ‘Seorang Jenderal’

Oleh Redaksi · 17 Nov, 20.21 WIB



BANDA ACEH - Teka-teki sosok Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka memunculkan beragam prediksi. Dokter Tiffauzia Tyasumma atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa memperkirakan Presiden Prabowo Subianto tidak akan memilih kandidat dari internal Partai Gerindra, melainkan sosok berlatar belakang militer.Prediksi tersebut disampaikan Dokter Tifa melalui unggahannya di media sosial. Ia menduga calon wakil presiden pengganti Gibran bisa berasal dari kalangan purnawirawan maupun perwira militer yang masih aktif.

"WAPRES siapa? Prediksi saya Wapres dari militer. Mungkin Purnawirawan. Mungkin aktif," tulis Dokter Tifa dalam keterangannya, Dikutip Selasa (17/11).

Ia menjelaskan, prediksinya didasarkan pada perkiraan situasi geopolitik global yang menurutnya akan semakin memanas mulai 2027.

Dokter Tifa menilai potensi meluasnya Perang Dunia III hingga kawasan Indo-Pasifik menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan sosok pendamping Prabowo.

Menurutnya, ancaman konflik berskala global tersebut telah disinggung Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta dan dalam sejumlah pidato Prabowo sepanjang 2026.

Dokter Tifa berpandangan, meskipun Prabowo merupakan seorang jenderal, keberadaan wakil presiden dengan latar belakang militer juga akan membantu presiden menghadapi situasi geopolitik yang semakin kompleks.

"Presiden Prabowo Subianto yang walaupun seorang Jenderal tetap akan sangat terbantu jika Wakilnya juga Jenderal," ujarnya.

Dokter Tifa Singgung Kompetensi Wapres Pengganti Gibran

Lebih lanjut, Dokter Tifa menilai meluasnya konflik global dapat membawa konsekuensi besar terhadap berbagai dimensi kehidupan manusia. Ia menyebut dampaknya berpotensi menghadirkan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Karena itu, menurutnya, momentum pergantian wakil presiden dapat menjadi kesempatan untuk menghadirkan sosok yang dinilai lebih kompeten, terutama dalam menghadapi tantangan geopolitik.

Dokter Tifa juga menyindir Gibran dengan menyinggung polemik terkait ijazahnya. Ia menyebut Prabowo tidak perlu lagi menjalankan peran sebagai "babysitter anak kurang ijazah".

"Entah prediksi saya ini benar atau meleset, kita patut bersyukur bahwa menjelang PD III yang meluas ini, Presiden Prabowo tidak perlu lagi jadi babysitter anak kurang ijazah," tulisnya.

Ia kemudian mengaitkan prediksinya dengan buku Ghost Fleet yang menggambarkan skenario konflik masa depan. Meski demikian, prediksi mengenai sosok wakil presiden pengganti Gibran tersebut merupakan pandangan pribadi Dokter Tifa dan belum menjadi keputusan resmi Presiden Prabowo.

NASIONAL

Mengapa Relawan Gibran Dukung Sufmi Dasco Jadi Wapres? Ini Hitung-hitungannya

Oleh Redaksi · 16 Nov, 19.32 WIB

BANDA ACEH - Pegiat media sosial Hasyim Muhammad menilai dukungan sejumlah kelompok relawan Gibran Rakabuming Raka yang menginginkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi Wakil Presiden pengganti Gibran merupakan langkah yang logis.Menurut Hasyim, jika Dasco dipilih sebagai wakil presiden, peluang munculnya figur dari luar Partai Gerindra yang berpotensi menjadi pesaing Gibran untuk kembali mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2029 dapat diminimalkan.

"Jika pendukung Gibran sekarang dukung Dasco, itu masuk akal. Karena dengan begitu tak ada figur di luar Gerindra yang akan menjadi pesaing Gibran untuk digandeng Prabowo di 2029," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Senin (16/11).

Ia kemudian menilai pengangkatan Dasco sebagai wakil presiden justru dapat menjadi sinyal bahwa Prabowo masih membutuhkan Gibran untuk mendampinginya pada Pilpres 2029.

"Jadi menurut saya, menjadikan Dasco sebagai wapres adalah bukti ke Jokowi bahwa 2029 Prabowo akan tetap perlu Gibran," lanjutnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jokowi Disebut Tak Akan Tinggal Diam, Pengamat Ungkap Dugaan Perlawanan Geng Solo

Oleh Redaksi · 17 Nov, 16.00 WIB



BANDA ACEH - Pengamat Politik Rudi S. Kamri menduga kelompok yang disebutnya sebagai Geng Solo tengah menyiapkan langkah Politik untuk menghadapi dinamika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bukan sosok yang akan tinggal diam menghadapi perkembangan situasi politik.“Kan mereka melihat bahwa Geng Solo, Mas, kita tahu karakter seorang Jokowi tidak akan mungkin diam begitu saja,” kata Rudi dikutip dari YouTube Forum Keadilan, Selasa (17/11/2026).

Rudi menilai pernyataan Jokowi yang menyatakan dukungan kepada Prabowo belum tentu menggambarkan seluruh sikap politiknya. Ia menduga ada strategi lain yang mungkin dijalankan di balik pernyataan tersebut.

“Di depan dia bilang dukung Prabowo, tapi di belakang dia garap juga pasti. Bisa jadi sekarang bahwa dia bilang, 'Wah, jabatan itu sementara,' dan sebagainya. Itu karakter Jowo,” ujarnya.

Rudi kemudian membeberkan tiga skenario yang menurutnya beredar dalam analisis politik terkait kemungkinan perlawanan kelompok tersebut. Skenario pertama, Gibran Rakabuming Raka disebut akan menjadi presiden apabila Prabowo berhasil dijatuhkan, sementara sosok berinisial Mr. D diproyeksikan sebagai wakil presiden.

“Plan A kalau Geng Solo sukses tumbangkan Prabowo, maka Gibran Presiden dan saya bilang Mr. D jadi Vice President,” ungkapnya.

Ia mengklaim skenario tersebut telah dibicarakan dan disepakati sejumlah partai politik, yakni Golkar, PKB, PAN, dan PSI. Namun, Rudi tidak membeberkan bukti maupun identitas pihak yang disebut menyepakati rencana tersebut.

“Ini sudah disepakati partai-partai katanya Golkar, PKB, PAN, PSI,” katanya.

Skenario kedua, menurut Rudi, adalah mendorong sosok Mr. D menjadi wakil presiden. Ia menyebut identitas sosok tersebut masih terbuka dan bisa berasal dari siapa saja.

“Plan B mereka paksakan Mr. D jadi wapres. Mr. D itu bisa siapa aja, ya kan? Can be anyone,” ujarnya.

Rudi menduga langkah tersebut bertujuan mempertahankan pengaruh kelompok yang disebutnya sebagai Geng Solo di pemerintahan, termasuk mengamankan posisi orang-orang yang disebut berada di jajaran komisaris.

“Agar kekuatan Solo masih ada di pemerintahan. Orang-orang Geng Solo yang ada di komisaris-komisaris masih bisa diamankan,” jelasnya.

Adapun skenario ketiga yang disampaikan Rudi adalah dugaan upaya menciptakan kerusuhan. Namun, ia tidak menjelaskan secara terperinci bentuk kerusuhan maupun pihak-pihak yang diduga terlibat.

“Mereka akan membuat kerusuhan,” katanya.

NASIONAL

Ray Rangkuti Minta Prabowo Libatkan Publik Tentukan Cawapres: Jangan Seperti Ganti Menteri

Oleh Redaksi · 17 Nov, 20.05 WIB



BANDA ACEH - Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengimbau Presiden Prabowo Subianto memberi waktu kepada publik untuk menilai calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dia mengusulkan masyarakat diberi kesempatan setidaknya empat hari untuk menyampaikan pandangan sebelum nama calon diajukan kepada MPR.

Ray menilai, proses pengisian jabatan wapres tidak bisa disamakan dengan pergantian menteri yang menjadi hak prerogatif presiden. Menurutnya, jabatan wapres memiliki kedudukan tersendiri karena dipilih bersama presiden.

"Secara administratif, yang mengusulkan kepada MPR adalah presiden bersama dengan koalisi. Tapi hak mengusulkan semua warga negara boleh, berhak," kata Ray dalam program Rakyat Bersuara bertajuk "Bursa Kursi Wapres, Siapa Pengganti Gibran?" di iNews, Selasa (17/11/2026).

Dia menilai partisipasi masyarakat perlu diperhatikan dalam proses pengisian jabatan tersebut. Karena itu, presiden diharapkan tidak langsung mengajukan nama tanpa terlebih dahulu memberi ruang bagi publik untuk menyampaikan penilaian.

"Oleh karena itu unsur partisipasi masyarakatnya sebaiknya tidak dilupakan oleh presiden. Saya mengimbau agar presiden memberi empat hari setidaknya kepada publik untuk menilai nama-nama yang disodorkan presiden kepada MPR," ujarnya.

Ray menegaskan, proses tersebut perlu melibatkan masyarakat karena jabatan wapres bukan sekadar posisi pembantu presiden.

"Jadi jangan dipandang ini seperti mengganti menteri yang memang hak prerogatifnya ada pada presiden. Tapi wakil presiden menurut saya tidak bisa begitu. Harus ada proses yang disebut dengan pelibatan publik di dalamnya," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ray juga menanggapi munculnya nama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat pengganti Gibran.

Ray menyambut baik munculnya nama Dasco. Namun, dia menilai publik tetap perlu diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan mengenai kelayakan calon tersebut kepada presiden.

"Saya senang kalau misalnya saat ini Gerindra sudah menyebutkan nama yang agak unggul namanya Dasco. It's okay. Nah tinggal sekarang publik memberi masukan kepada presiden apakah calon ini layak atau tidak," tuturnya

NASIONAL

Presiden Serahkan Dua Nama Calon Wapres ke MPR Paling Lambat 19 November

Oleh Redaksi · 16 Nov, 18.37 WIB

BANDA ACEH - Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu hingga 19 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden (wapres) kepada MPR RI.Dua nama tersebut nantinya akan menjalani proses verifikasi sebelum dipilih melalui sidang paripurna MPR RI.

“19 November ini,” sebut Habiburokhman saat dikonfirmasi mengenai batas waktu pengajuan nama calon wapres oleh Presiden, Senin (16/11).

Habiburokhman mengatakan, proses persiapan verifikasi perlu dilakukan sejak dini. Sebab, waktu yang tersedia untuk verifikasi hanya 14 hari sehingga pemeriksaan berbagai dokumen calon perlu dipersiapkan lebih awal.

Ia menyebut, dirinya ditunjuk Partai Gerindra sebagai anggota tim verifikasi dan akan mengusulkan agar MPR mulai berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait.

“Karena waktu verifikasi yang hanya 14 hari, maka kami, saya kebetulan ditunjuk oleh partai untuk menjadi anggota tim verifikasi, mengusulkan bahwa proses persiapannya dilakukan sejak saat-saat ini,” tuturnya.

Salah satu dokumen yang menjadi perhatian dalam proses verifikasi adalah ijazah calon wapres. Habiburokhman menilai, pemeriksaan ijazah perlu dipersiapkan dengan mekanisme yang lebih baik agar tidak menimbulkan persoalan seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

“Yang paling krusial kan ijazah. Misalnya kalau SMA itu kan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau misalnya nanti ada yang menyampaikan ijazah sarjana ke Kementerian Mendikbud, ke Prof Brian, itu harus disiapkan,” terangnya.

Selain ijazah, persiapan juga perlu dilakukan untuk pemeriksaan kesehatan dan dokumen dari pengadilan. Pemeriksaan kesehatan mencakup keterangan bebas narkoba, sedangkan dokumen pengadilan meliputi surat keterangan tidak pailit dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara lima tahun atau lebih.

Ketua Komisi III DPR itu pun mengusulkan, agar rumah sakit yang sebelumnya ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pemeriksaan kesehatan kembali dipersiapkan sehingga para calon dapat menjalani pemeriksaan lebih awal.

“Kami juga akan usulkan agar rumah-rumah sakit yang kemarin sudah ditunjuk KPU sekarang juga sudah membuka kepada para calon yang merasa mungkin sudah diinformasikan akan ditunjuk dan lain sebagainya, mempersiapkan diri,” katanya.

Ia juga mengingatkan pengurusan dokumen dari pengadilan membutuhkan waktu. Berdasarkan pengalamannya mengurus dokumen persyaratan Prabowo sebelumnya, proses tersebut dapat memakan waktu dua hingga tiga hari.

“Ini pengalaman kemarin waktu saya ngurus dokumen-dokumennya Pak Prabowo, dua dokumen ini enggak …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Eks Komisioner KPU sebut KDM yang Jadi Wapres Gantikan Gibran

Oleh Redaksi · 16 Nov, 17.35 WIB

BANDA ACEH - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Gusti Putu Artha menyebut sejumlah nama yang dinilai berpeluang menjadi calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.Salah satu nama yang menurut dugaannya berpotensi dipilih Presiden Prabowo Subianto adalah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Putu Artha menduga Prabowo akan mempertimbangkan Dedi Mulyadi atau KDM untuk mendampinginya demi memastikan program pemerintahan berjalan lancar sekaligus membuka peluang memenangkan periode kedua.

"Dugaan saya agar Prabowo mulus mengeksekusi program dan melenggang di periode kedua, beliau akan minta Dedi Mulyadi jadi wapresnya," kata Putu Artha.

Selain Dedi Mulyadi, ia turut menyebut tiga nama lain yang berpotensi masuk dalam bursa pengganti Gibran. Mereka adalah Khofifah Indar Parawansa, Ahmad Luthfi, dan Amran Sulaiman.

Di sisi lain, sejumlah petinggi partai Politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus disebut memilih tidak mengusulkan kader masing-masing untuk menjadi pengganti Gibran.

Sikap tersebut diketahui dari sejumlah pernyataan yang disampaikan para ketua umum partai politik koalisi. Situasi ini membuat penentuan calon wakil presiden baru semakin bergantung pada pembahasan antara Prabowo dan para pimpinan partai pendukung pemerintah.

Sebelumnya, sejumlah petinggi partai politik menghadiri undangan pertemuan tertutup dengan Prabowo di Istana Bogor.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Hard Gumay Ungkap Kericuhan Politik hingga Dugaan Kudeta di 2027

Oleh Redaksi · 17 Nov, 13.33 WIB



BANDA ACEH - Ramalan paranormal bernama Hard Gumay membocorkan soal situasi Politik Indonesia yang akan menjadi perhatian di 2027.Mulai dari potensi aksi provokasi, demonstrasi anarkis, hingga dugaan percobaan kudeta terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Meski demikian, ramalan Hard Gumay ini tetap merupakan prediksi yang tidak dapat dipastikan 100 persen kebenarannya.

Seluruh pernyataan Hard Gumay dalam pembahasan ini perlu dipahami sebagai klaim atau penglihatan pribadi, bukan fakta yang telah terbukti.

Sebelumnya, Hard Gumay pernah mengungkapkan pandangannya mengenai kemungkinan munculnya ketegangan politik di Indonesia.

Hard Gumay menyebut masih ada pihak yang belum menerima kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dalam sebuah percakapan, Hard Gumay ditanya mengenai situasi politik Indonesia dalam waktu dekat, termasuk kemungkinan terjadinya perpecahan dan aksi provokasi.

"Perpecahan, anarkis, provokasi," demikian gambaran awal yang disampaikan Hard Gumay, dikutip dari kanal YouTube Sumbu Cahaya pada Selasa, 17 November 2026.

Hard Gumay kemudian menjelaskan bahwa menurut penglihatannya, masih ada sosok yang tidak menerima hasil kemenangan Prabowo dan Gibran.

"Jadi yang terjadi itu ada orang yang masih enggak legawa, enggak terima atas kemenangan terpilihnya Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran itu. Jadi, ada sosok yang enggak terima dan memprovokasi, jadi provokator yang demo, melakukan hal-hal anarkis," ujarnya.

Hard Gumay bahkan memperkirakan potensi kericuhan tersebut bisa lebih besar dibandingkan peristiwa 2019.

"Walaupun ini cukup besar nih terjadinya, cukup besar dibanding 2019. Cukup besar ini, lebih besar," katanya.

Ia pun mengingatkan pemerintah, terutama Presiden Prabowo, agar berhati-hati menghadapi kemungkinan tersebut.

"Jadi ini catatan penting menurut gue untuk pemerintah kita, terutama untuk Bapak Prabowo, hati-hati," lanjutnya.

Akan tetapi Hard Gumay juga menyampaikan pesan kepada pihak yang menurutnya berpotensi melakukan provokasi.

"Percuma. Yang ada ini akan merugikan diri dia sendiri atas ketidakterimaan dia, atas kemenangan Bapak Prabowo Subianto," tuturnya.

Hard Gumay Singgung Dugaan Percobaan Kudeta Presiden

Dalam percakapan yang sama, Hard Gumay juga ditanya mengenai kemungkinan adanya percobaan kudeta terhadap presiden.

Ia membenarkan bahwa menurut penglihatannya terdapat sosok yang berencana merebut posisi kepala negara.

Ketika ditanya apakah kudeta tersebut melibatkan upaya merebut kekuasaan presiden, Hard Gumay menjawab:

"Iya, dia mencoba. Ada orang yang mau mencoba untuk kudeta. Walaupun ujung-ujungnya enggak berhasil, tapi dia sudah merencanakan itu, sudah …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Polisi Temukan Celana Korban Dugaan Pemerkosaan di Rumah Dinas Bupati Kupang

Oleh Redaksi · 17 Nov, 20.06 WIB



BANDA ACEH - Polisi mengungkap temuan saat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah jabatan Bupati Kupang, Yosep Lede, di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Olah TKP tersebut berkaitan dengan kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami seorang mahasiswi berusia 21 tahun."Olah TKP sudah kami laksanakan dan hasilnya kami temukan satu celana yang digunakan pada saat korban disuruh menggantikan celananya," ujar Kapolda NTT Irjen Reza Arief Dewanto, Selasa (17/11/2026).

Reza mengatakan, olah TKP dilakukan oleh personel Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT bersama tim Inafis Ditreskrimum Polda NTT.

Menurut Reza, kasus tersebut ditangani sebagai dugaan tindak pidana kekerasan seksual fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

"Korban merupakan seorang perempuan berinisial RWM (21) dan pihak terlapor berinisial YL selaku pejabat publik," jelas Reza.

Ia menjelaskan, peristiwa tersebut bermula ketika RWM diajak dua perempuan berinisial EK dan LS dengan alasan akan mendapatkan pekerjaan. Keduanya kemudian membawa RWM ke rumah jabatan Bupati Kupang.

Di lokasi tersebut, RWM diduga mengalami pemaksaan dan kekerasan seksual secara fisik oleh Yosep Lede.

Reza mengatakan, Polda NTT memberikan perhatian serius terhadap penanganan kasus tersebut.

"Kami memandang kasus ini sebagai atensi serius karena menyangkut harkat dan martabat manusia," katanya.

Korban Merupakan Anak Anggota Polisi

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengungkapkan, RWM merupakan anak seorang anggota polisi aktif yang bertugas di Polres Rote Ndao.

Ayah RWM diketahui berpangkat Aiptu. Sementara itu, RWM merupakan mahasiswi semester empat di Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang.

"Iya benar, ayah korban itu anggota polisi, tugas di Rote Ndao," ungkap Henry.

NASIONAL

Dasco Minta Kader Gerindra Setop Dukung Dirinya Jadi Wapres, Ada Apa?

Oleh Redaksi · 16 Nov, 17.39 WIB

BANDA ACEH - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad disebut telah meminta kader Partai Gerindra menghentikan dukungan terbuka terhadap dirinya untuk menjadi Wakil Presiden RI menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Gerindra, Sugiat Santoso, menyusul munculnya gelombang dukungan dari sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra yang mengusulkan nama Dasco.

Menurut Sugiat, Dasco bahkan telah menyampaikan pesan kepada para kader melalui grup WhatsApp agar tidak lagi mengeluarkan pernyataan dukungan. Ia menegaskan penentuan calon wakil presiden sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

"Kemarin pun ketika misalnya banyak sekali suara-suara DPD provinsi dan DPC-DPC yang mengusulkan nama Bang Dasco, Bang Dasco sendiri di grup WA kami mengatakan bahwa dihentikan terkait pernyataan-pernyataan itu," kata Sugiat dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Senin (16/11/2026).

"Kita hormati apa yang menjadi kewenangan konstitusional Pak Prabowo. Biarlah Pak Prabowo diberi ruang sebebas-bebasnya untuk katakanlah menilai siapa dua nama yang paling tepat," lanjutnya.

Sugiat menegaskan dukungan terhadap Dasco bukan hasil instruksi maupun gerakan terkoordinasi dari partai. Menurutnya, usulan tersebut merupakan inisiatif masing-masing kader di daerah.

Meski demikian, Sugiat menilai Dasco memiliki sejumlah kelebihan untuk menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia. Ia menyoroti loyalitas Dasco kepada Prabowo serta kemampuannya menjalin komunikasi dengan berbagai elemen partai Politik dan masyarakat sipil.

Di sisi lain, Gerindra ternyata memiliki sejumlah kriteria untuk sosok yang nantinya mendampingi Prabowo. Sugiat mengatakan wakil presiden berikutnya diharapkan mampu menjaga soliditas koalisi sekaligus membantu pelaksanaan program strategis pemerintah.

"Kami berharap calon wakil presiden itu memiliki ideologi yang sama dengan Pak Prabowo Subianto," kata Sugiat.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kaesang Blak-Blakan: Mulai Tertunduk Lemas dan Hampir Kehilangan…

Oleh Redaksi · 16 Nov, 17.17 WIB

BANDA ACEH - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengklaim semakin banyak masyarakat yang mulai bergabung dengan partainya. Kabar tersebut disebut menjadi suntikan semangat bagi PSI untuk terus bergerak menghadapi agenda Politik ke depan, termasuk Pemilu 2029.Kaesang menyampaikan hal itu melalui unggahan di media sosial. Ia mengaku sempat merasa kehilangan semangat sebelum akhirnya mendapat kabar bahwa gerakan LOGIN PSI ramai diperbincangkan warganet dan semakin banyak orang yang bergabung.

"Ketika mulai tertunduk lemas dan hampir kehilangan semangat, teman-teman datang membawa kabar baik LOGIN PSI tengah …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Resmi Dilantik, Sohibul Iman Gantikan Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil Ketua MPR

Oleh Van · 16 Nov, 15.58 WIB

JAKARTA — Mohamad Sohibul Iman resmi dilantik menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Senin, 16 November 2026. Ia menggantikan Hidayat Nur Wahid yang mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

Pelantikan Sohibul berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia akan mengisi posisi tersebut hingga berakhirnya masa jabatan pimpinan MPR periode 2024–2029.

Pergantian ini merupakan bagian dari penataan penugasan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di lembaga legislatif. Sohibul sebelumnya menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro PKS.

Sohibul Iman Gantikan Hidayat Nur Wahid

PKS sebelumnya menunjuk Sohibul untuk menggantikan Hidayat di jajaran pimpinan MPR. Penunjukan tersebut menyusul perubahan penugasan Hidayat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.

Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyampaikan keputusan partainya pada 10 November 2026. Penugasan Hidayat di BKSAP diarahkan untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di tingkat internasional.

PKS menilai pengalaman dan jejaring internasional Hidayat dapat mendukung kerja sama parlemen dengan berbagai negara. Salah satu perhatian yang disorot partai tersebut adalah dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

Dengan penugasan baru itu, posisi Wakil Ketua MPR dari unsur PKS kemudian diisi oleh Sohibul. Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri kekosongan kursi pimpinan MPR setelah pengunduran diri Hidayat.

Jabatan Sohibul Iman di PKS

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Prof Connie Ungkap Kabar dari AS soal Pengganti Gibran: Bukan Nama yang Selama Ini Beredar

Oleh Redaksi · 17 Nov, 13.04 WIB



BANDA ACEH - Nama-nama yang berpotensi menjadi pengganti Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mulai ramai diperbincangkan di ruang publik.Sejumlah tokoh Politik seperti Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, hingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut masuk dalam bursa spekulasi.

Namun, Pengamat pertahanan dan militer, Prof Connie Rahakundini Bakrie, justru memberikan sinyal berbeda.

Ia mengaku mendapat kabar penting dari Amerika Serikat terkait kemungkinan sosok pengganti Gibran.

Menariknya, menurut Connie, sosok yang dimaksud belum tentu berasal dari nama-nama yang selama ini ramai dibicarakan di media sosial maupun pemberitaan.

"Saya mendengar kabar penting dari Amerika (Amerika Serikat) malah bukan dari Jakarta," ungkap Connie dikutip dari YouTube Prof. Topo Sutopo yang tayang pada 14 November 2026.

Meski demikian, Connie tidak menyebutkan secara gamblang siapa sosok yang dimaksud.

Ia justru menitipkan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mempertimbangkan figur sipil apabila nantinya harus menentukan pengganti Gibran.

Menurut Connie, pilihan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan hubungan sipil dan militer dalam sistem pemerintahan.

Ia menilai supremasi sipil perlu tetap dijaga, tanpa mengesampingkan profesionalisme militer.

Connie pun menyerahkan keputusan akhir kepada Prabowo.

Ia mengaku percaya presiden memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan sosok yang tepat.

"Ini bukan sikap anti militer tapi bagaimana menurut saya keseimbangan kepemimpinan nasional itu sangat, sangat, sangat diperlukan, dan sekali lagi profesional militer kita harus dijaga supremasi sipil mereka harus diperkuat dan keduanya enggak boleh dipertentangkan dan enggak boleh juga dibuat tidak seimbang," katanya.

Sejumlah Nama Masuk Bursa Pengganti Gibran

Sebelumnya, sejumlah nama tokoh politik memang mulai dikaitkan dengan kemungkinan pengganti Gibran.

Nama Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Luar Negeri Sugiono, hingga Ketua MPR Ahmad Muzani turut disebut dalam berbagai spekulasi.

Selain itu, ada pula Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, AHY, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta Sultan Hamengku Buwono X.

Ketua DPP PKB sebelumnya menyampaikan partainya menginginkan Muhaimin Iskandar menjadi salah satu figur yang dipertimbangkan.

Sementara itu, PDI-P melalui juru bicaranya, Guntur, menyatakan partai tersebut belum mengajukan nama dan masih mengutamakan proses konstitusional.

Adapun Sultan Hamengku Buwono X menilai persoalan tersebut merupakan urusan pemerintah pusat.

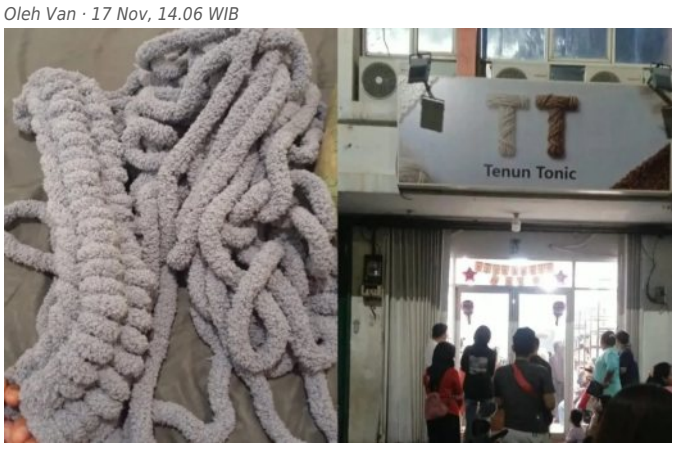
» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Viral Kasus Tenun Tonic: Polisi Ungkap Laporan 96 Korban hingga Kerugian Rp1,9 Miliar

Oleh Van · 17 Nov, 14.06 WIB



Benang rajut tebal yang lembut dan suasana ramai di depan toko Tenun Tonic.

JAKARTA — Kasus dugaan penipuan melalui aplikasi Tenun Tonic menjadi perhatian setelah puluhan orang melaporkan kerugian akibat tawaran pekerjaan merajut syal dari rumah atau work from home (WFH).

Para korban mengaku tergiur iming-iming mendapatkan penghasilan dari hasil pekerjaan merajut, tetapi justru diminta menyetorkan sejumlah uang sebagai deposit.

Kasus tersebut pun telah masuk ke dalam laporan Polda Metro Jaya secara kolektif dengan nomor LP/B/8754/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.

“Benar, Polda Metro Jaya telah menerima laporan terkait dugaan penipuan dan/atau penggelapan melalui aplikasi investasi Tenun Tonic,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto kepada awak media pada Selasa, 17 November 2026.

Budi membeberkan bahwa laporan yang masuk ke pihaknya dibuat oleh seorang berinisial RW (25) bersama dengan 95 orang lainnya pada Senin, 16 November 2026.

Kronologi Dugaan Penipuan Tenun Tonic

Berdasarkan informasi yang beredar dari para korban, kasus Tenun Tonic bermula dari tawaran pekerjaan merajut syal yang dipromosikan melalui media sosial, seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan Threads.

Pekerjaan tersebut ditawarkan dengan sistem WFH, di mana pekerja dijanjikan memperoleh bayaran setelah menyelesaikan produk rajutan yang nantinya diklaim akan dibeli kembali oleh pihak pengelola.

Namun, sebelum mulai bekerja, peserta diminta menyetorkan deposit dengan nominal mulai sekitar Rp865 ribu hingga jutaan rupiah.

Besaran deposit disebut memengaruhi tingkat komisi yang bisa diperoleh peserta.

Selain itu, beredar informasi bahwa peserta ditawarkan bonus sekitar 10 persen apabila berhasil mengajak orang lain bergabung.

Seiring berjalannya waktu, sejumlah peserta mengaku mengalami kesulitan mendapatkan kembali uang yang telah disetorkan.

Para korban kemudian mendatangi lokasi usaha Tenun Tonic di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, untuk meminta kejelasan.

Polisi Catat Kerugian Rp1,9 Miliar

Mengenai total kerugian, Budi menyampaikan yang tercatat dalam laporan polisi mencapai Rp1,9 miliar.

“Nilai kerugian yang dilaporkan sebesar Rp1,9 miliar, adapun informasi mengenai dugaan kerugian mencapai Rp200 miliar masih perlu didalami,” imbuhnya.

“Termasuk kemungkinan adanya korban lain yang belum tercakup dalam laporan tersebut,” jelasnya lagi.

Polda Metro Jaya menyatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai ketentuan hukum.

Kasus Tenun Tonic saat ini masih dalam proses pendalaman, sehingga dugaan penipuan maupun keterlibatan pihak tertentu tetap harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan.(*)

NASIONAL

Wartawan Senior Bongkar Jejak Penyadapan dari Era Densus 88, Awalnya untuk Cegah Teror

Oleh Redaksi · 16 Nov, 17.13 WIB

BANDA ACEH - Wartawan senior Kisman Latumakulita mengungkap dugaan adanya jaringan penyadapan di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang disebut telah berkembang sejak pembentukan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror.Menurut Kisman, penyadapan yang pada awalnya dimaksudkan untuk kepentingan pencegahan terorisme diduga mengalami pergeseran fungsi. Dari instrumen pemberantasan terorisme, kewenangan tersebut disebut-sebut berkembang menjadi alat untuk kepentingan Politik dan penguasaan informasi di lingkungan elite kekuasaan.

Kisman menyebut sejumlah nama yang menurut pengetahuannya memiliki peran penting dalam sejarah awal Densus 88, di antaranya Gories Mere dan Tito Karnavian. Ia juga menyebut Ansyaad Mbai serta Suryadarma, meskipun peran masing-masing dalam dugaan praktik penyadapan tersebut masih memerlukan penjelasan dan verifikasi lebih lanjut.

“Sadap-menyadap ini jangan dilihat hanya dari persoalan hari ini. Cerita awalnya ketika ada Densus 88. Awalnya untuk pencegahan teror, tetapi di tengah jalan berubah menjadi penyadapan untuk kepentingan kolektivitas,” ungkap Kisman dalam sebuah perbincangan di Podcast, Senin (16/11/2026).

Pernyataan tersebut membuka kembali pertanyaan mengenai sejarah penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat keamanan, siapa yang mengendalikan perangkatnya, serta sejauh mana pengawasannya.

Secara historis, Densus 88 memang dirintis oleh Gories Mere dan diresmikan pada 26 Agustus 2004 oleh Kapolda Metro Jaya saat itu, Firman Gani. Tito Karnavian menjadi komandan awal satuan tersebut di Polda Metro Jaya.

Namun, fakta sejarah pembentukan Densus 88 tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan penyadapan sebagaimana dugaan yang disampaikan Kisman.

Kisman kemudian mengaitkan perkembangan tersebut dengan periode ketika Tito Karnavian menjabat Kapolri. Ia menyebut adanya sejumlah satuan tugas yang menurut keterangannya memiliki hubungan dengan jaringan penyadapan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

Bareskrim Sita Rp28 Miliar dari Situs Judol, Uangnya Tersebar di 322 Rekening

Oleh Van · 16 Nov, 22.50 WIB

JAKARTA — Bareskrim Polri menyita uang lebih dari Rp28 miliar yang diduga berasal dari praktik judi online. Uang tersebut ditemukan dalam penelusuran terhadap 322 rekening yang terhubung dengan sebuah situs judi online berinisial A.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Suhasto menyebut total aset yang disita mencapai Rp28.010.228.458. Pengungkapan kasus ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari aktivitas perjudian daring.

"Dari hasil analisis PPATK, penyidik meningkatkan status ke penyidikan dan telah melakukan pemblokiran rekening perbankan sebanyak 322 rekening," ujar Suhasto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Situs Judol Gunakan Server Luar Negeri

Kasus ini bermula dari patroli siber yang dilakukan Subdit IV Dittipideksus Bareskrim sejak 2025. Pada Oktober 2026, hasil penyelidikan tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Loyalis Prabowo: Pengganti Gibran Harus Figur Premium, Sosok Itu Adalah…

Oleh Redaksi · 17 Nov, 12.37 WIB



Gambar memperlihatkan foto resmi Prabowo Subianto dalam balutan pakaian formal dengan tanda jasa, diletakkan pada penyangga kayu di depan dinding marmer hijau. Latar belakangnya dihiasi dengan lambang Garuda Pancasila dan deretan bendera Merah Putih, sementara sebuah penyangga kosong terlihat di sampingnya. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto diminta mempertimbangkan sosok dengan kapasitas dan pengalaman mumpuni dalam memilih pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Figur tersebut dinilai harus mampu langsung bekerja mendampingi kepala negara, bukan sekadar menjadi pelengkap dalam struktur pemerintahan.

Ketua Laskar Trisakti 08, Fernando Rorimpandey menyebut calon wakil presiden pengganti harus berasal dari kalangan figur premium.

Menurutnya, posisi wakil presiden merupakan bagian penting dari kepemimpinan nasional sehingga kekosongan jabatan tersebut tidak seharusnya berlangsung terlalu lama.

Fernando menegaskan, keputusan mengenai sosok pengganti sepenuhnya berada di tangan Prabowo.

Terlebih, partai-partai Politik pendukung pemerintah disebut telah sepakat untuk tidak mengajukan kader masing-masing dalam proses tersebut.

"Yang jelas wapres baru nanti harus figur yang premium. Supaya bisa menjadi tandem yang loyal, solid dan bekerja penuh untuk Presiden. Bukan sekedar formalitas politik belaka dan cuma sebatas ban serep," ujar Fernando, dikutip Selasa (17/11/2026).

Fernando menjelaskan, istilah figur premium merujuk pada sosok yang memiliki pengalaman, kapasitas, serta pemahaman memadai mengenai pola kepemimpinan dan arah kebijakan Prabowo.

Menurutnya, wakil presiden baru idealnya tidak membutuhkan waktu panjang untuk menyesuaikan diri dengan cara kerja presiden.

Dengan pemahaman tersebut, figur yang terpilih diharapkan bisa segera mengambil peran dan membantu menjalankan agenda pemerintahan.

Ia menilai wakil presiden bukan sekadar jabatan formal untuk melengkapi pasangan kepemimpinan nasional.

Posisi tersebut harus diisi seseorang yang mampu menjadi tandem presiden dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Fernando juga menekankan pentingnya loyalitas dan soliditas antara presiden dengan wakil presiden.

Hubungan kerja yang kuat dinilai dapat membantu mempercepat pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk agenda Asta Cita.

Fernando sendiri secara terbuka mengatakan bahwa figur premiun tersebut ada dalam Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco menurutnya memiliki pengalaman politik dan pemahaman terhadap dinamika pemerintahan yang dapat menjadi modal untuk mendampingi Prabowo.

Posisinya sebagai pimpinan dewan sekaligus pengurus teras partai juga dinilai memberikan pengalaman dalam memahami proses politik dan hubungan antarlembaga negara.

"Kalau kami ditanya, siapa figur premium tersebut? Kami bisa menjawab dengan mudah, yakni figur tersebut adalah Prof Dasco. Semoga aspirasi kami ini bisa didengarkan oleh Presiden dan menjadi pertimbangan beliau," tutur Fernando.

Diketahui Gibran meletakkan jabatannya setelah 2 tahun 23 hari duduk sebagai Wakil Presiden RI.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

BBPOM Aceh Dukung Asesmen Akreditasi Labkesmas Banda Aceh

Oleh Redaksi · 16 Nov, 22.38 WIB

BANDA ACEH – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) menghadiri kegiatan Pembukaan Asesmen Awal dan Witness SNI ISO/IEC 17025:2017 di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Senin (16/11/2026). Kehadiran BBPOM Aceh merupakan bentuk dukungan terhadap peningkatan kompetensi, mutu, dan keandalan laboratorium dalam memberikan pelayanan pengujian kepada masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Balai Labkesmas Banda Aceh tersebut merupakan bagian dari proses penilaian kesesuaian laboratorium oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). BBPOM Aceh hadir melalui Ayu Miranda Away yang mewakili Kepala BBPOM Aceh, Riyanto. Pembukaan kegiatan dilakukan secara resmi oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Nizarli.

Asesmen awal dan witness dilaksanakan selama dua hari, pada 16–17 November 2026, oleh tim asesor KAN yang terdiri atas Tati Ariyanti, Anissa Tiana Sheilayanti Putri dan Sitoresmi Triwibowo.

Penilaian ini bertujuan memastikan kesesuaian penerapan standar SNI ISO/IEC 17025:2017, yang mencakup persyaratan manajemen dan teknis laboratorium. Standar tersebut menjadi acuan penting untuk memastikan laboratorium memiliki kompetensi dalam melakukan pengujian serta mampu menghasilkan data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam sambutannya, Nizarli menyampaikan bahwa penerapan standar SNI ISO/IEC 17025:2017 merupakan aspek penting dalam menjamin kompetensi laboratorium dan keandalan hasil pengujian. Penerapan standar ini juga menjadi wujud komitmen laboratorium dalam menjaga kualitas pelayanan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pengujian yang dihasilkan.

Partisipasi BBPOM Aceh dalam kegiatan ini mencerminkan pentingnya sinergi antarlaboratorium dan pemangku kepentingan dalam membangun sistem pengujian yang berkualitas. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendorong pertukaran pengetahuan, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta peningkatan penerapan standar mutu laboratorium di Aceh.

“Laboratorium memiliki peran strategis dalam menghasilkan data pengujian yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Karena itu, penerapan standar mutu dan kompetensi laboratorium harus terus diperkuat.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ini yang Diprediksi Bakal Terjadi Jika Sufmi Dasco Ahmad Terpilih sebagai Wapres

Oleh Redaksi · 17 Nov, 09.57 WIB



Foto ini menampilkan Sufmi Dasco Ahmad yang mengenakan jas hitam dan kacamata saat sedang berbicara di depan mikrofon. Ia tampak serius menyampaikan pendapatnya dalam

BANDA ACEH - Nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mulai mencuat sebagai salah satu kandidat pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Namun, jika benar-benar terpilih menjadi wakil presiden, ada sejumlah konsekuensi Politik yang diperkirakan bisa muncul.

Pegiat media sosial Yudhistira Ismara pun membeberkan enam hal yang menurutnya berpotensi terjadi.

"What if Prof Dasco jadi wakil presiden? Pertama, kita akhirnya mungkin punya guru besar ilmu hukum pertama yang jadi wakil presiden," tulisnya di akun X, Senin (16/11/2026).

Menurut Lulusan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana itu, terpilihnya Dasco juga berpotensi membuat Presiden Prabowo Subianto tidak perlu khawatir munculnya dua pusat kekuasaan dalam pemerintahan.

Sebab, presiden dan wakil presiden berasal dari partai politik yang sama, yakni Gerindra.

Namun, kondisi tersebut juga dinilai bisa menjadi beban tersendiri bagi partai berlambang kepala garuda itu.

"Kedua, Prabowo tidak perlu takut ada matahari kembar di pemerintahan. Ketiga, Gerindra jadi sasaran empuk kalau program Prabowo dinilai jelek. Presiden dan wapresnya-> satu partai," ujar dia.

Ia juga mengingatkan adanya kemungkinan penurunan elektabilitas Gerindra menjelang Pemilu 2029 apabila kritik terhadap pemerintah terus berlanjut.

"Keempat, kalau pemerintah terus dikritik, elektabilitas Gerindra bisa anjlok parah di 2029. Kelima, Wapres yang terlalu “nurut”. Keenam, koalisi partai bisa menjauh pelan-pelan dari program jelek prabowo," lanjutnya.

Yudhistira kemudian menduga dukungan sejumlah partai koalisi terhadap Dasco sebagai calon wakil presiden memiliki motif politik tertentu.

"Gue duga ada motif partai koalisi dukung Dasco yang maju jadi cawapres," pungkasnya.

Sebelumnya, dukungan terhadap Dasco memang mulai disuarakan sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra. Beberapa pengurus daerah secara terbuka mendorong Ketua Harian DPP Gerindra tersebut untuk masuk dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran.

Salah satunya datang dari Ketua DPD Gerindra Banten, Andra Soni. Ia menilai Dasco memiliki loyalitas kepada Prabowo, sekaligus kapasitas untuk menjaga kepercayaan publik dan membangun hubungan dengan partai-partai koalisi.

"Sebagai wakil rakyat yang berangkat dari Dapil Banten III, rekam jejak dan pengabdian Sufmi Dasco Ahmad dinilai telah teruji secara nyata di tengah masyarakat maupun dalam kancah politik nasional," kata Andra Soni dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).

Dukungan serupa disampaikan Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade. Menurutnya, Dasco merupakan figur dengan loyalitas kuat kepada Prabowo.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

INTERNASIONAL

Di Hadapan PM China, Prabowo Sampaikan Pesan Tegas soal Laut China Selatan

Oleh Van · 16 Nov, 22.41 WIB

MANILA — Presiden Prabowo Subianto meminta konflik di Laut China Selatan diselesaikan secara damai. Ia juga mendorong negara-negara ASEAN dan China segera menuntaskan kesepakatan aturan bersama untuk menjaga stabilitas kawasan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam KTT ke-29 ASEAN-Tiongkok di Manila, Filipina, Senin, 16 November 2026. Forum tersebut turut dihadiri Perdana Menteri China Li Qiang.

Prabowo menilai penyelesaian konflik membutuhkan kemauan politik yang kuat dan berkelanjutan dari seluruh negara terkait. Ia juga menekankan pentingnya persatuan dan peran ASEAN dalam menjaga kawasan.

Prabowo Desak Kesepakatan Aturan Bersama

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ketua MPR RI Sebut Ada 22 Syarat Calon Wapres Usulan Prabowo, Apa Saja?

Oleh Redaksi · 17 Nov, 10.33 WIB



BANDA ACEH - Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan, terdapat 22 persyaratan yang harus dipenuhi oleh dua calon wakil presiden yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Namun, Muzani belum bersedia membeberkan secara terperinci seluruh persyaratan tersebut."Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi," ujar Muzani dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Selain persyaratan calon, Muzani juga belum menjelaskan mekanisme pemilihan wakil presiden dalam sidang paripurna MPR. Mekanisme tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan pemungutan suara atau metode lainnya, akan disiapkan oleh tim ad hoc yang dipimpin Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI-P, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

Sementara itu, tim verifikasi yang dipimpin Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai NasDem, Lestari Moerdijat, bertugas memeriksa kelengkapan persyaratan para calon wakil presiden.

"Soal tim kesehatan apa segala macam juga akan dijelaskan oleh tim verifikasi, karena tim verifikasi itu nanti akan menjelaskan secara detail, termasuk ijazah dan seterusnya," kata Muzani.

20 Syarat Calon Wakil Presiden Menurut UU Pemilu

Sebagai informasi, Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur 20 persyaratan yang harus dipenuhi calon presiden dan wakil presiden.

Berikut daftar persyaratan tersebut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.
3. Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden merupakan Warga Negara Indonesia.
4. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
6. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
8. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya dan merugikan keuangan negara.
9. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
10. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
11. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD.
12. Terdaftar sebagai pemilih.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LIFESTYLE

Enggak Kaleng-kaleng, Segini Harta Dasco yang Digadang Jadi Wakil Presiden RI

Oleh Redaksi · 16 Nov, 20.20 WIB

BANDA ACEH -Nama Politisi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad disebut-sebut menjadi calon terkuat Wakil Presiden RI menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Sejumlah elemen masyarakat hingga Politisi mengusulkan nama Dasco untuk diusulkan menjadi Wakil Presiden RI.

Misalnya saja Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) periode 2025–2026 sekaligus Ketua BEM Universitas Sumatera Utara periode 2025–2026, Muzammil Ihsan memberikan dukungan untuk Dasco sebagai Wapres RI.

Pun sejumlah elemen politisi juga mendukung Dasco menjadi Wakil Presiden RI.

Sejauh ini, Dasco menjadi nama terkuat yang diusulkan menjadi Wapres RI.

Wakil Ketua DPR RI itu disebut sebagai salah satu orang terpenting dalam kemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Dasco yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra juga menjadi salah satu otak dari sejumlah program kampanye Prabowo seperti makan bergizi gratis (MBG).

Harta Dasco juga tidak kaleng-kaleng untuk seorang pejabat.

Dasco mengaku memiliki harta Rp81.642.193.033 berdasarkan laporan harta kekayaan negara (LHKPN) yang dikelola Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Hingga 31 Desember 2025, harta Dasco melonjak dari tahun 2024 yang hanya Rp79,9 miliar.

Mayoritas harta Dasco terdiri dari tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Pusat, Tangerang Selatan, dan Bandar Lampung senilai Rp39.748.278.000.

Kemudian Dasco mengaku memiliki kas atau setara kas senilai Rp25.148.880.615.

Isi garasi Dasco sebagai Wakil Rakyat juga enggak kaleng-kaleng. Politisi Partai Gerindra itu memiliki kendaraan senilai Rp5.025.000.000 yang terdiri dari Jaguar, Bentley, dan Toyota Century.

Dasco mengaku memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp5.720.466.382 dan surat berharga Rp3.886.611.520 juga harta lainnya senilai Rp2.112.956.516.

Dasco tidak memiliki utang sehingga total hartanya Rp81.642.193.033.

Berikut rincian lengkap LHKPN Sufmi Dasco Ahmad yang dilaporkan 31 Desember 2025

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 39.748.278.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI 3.001.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 266 m2/232 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI 2.235.386.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 261 m2/271 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI 2.185.854.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 261 m2/271 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI 3.225.538.000

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Nasib Irjen Eko Hadi Ditentukan Hari Ini, Hadapi Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden

Oleh Redaksi · 17 Nov, 08.56 WIB



BANDA ACEH - Propam Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso, Selasa (17/11/2026) hari ini. Sidang ini menjadi penentu nasib jenderal bintang dua tersebut usai terlibat kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, persidangan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri.

"Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri," kata Trunoyudo, Selasa (17/11/2026).

Adapun dugaan pelanggaran yang dipersangkakan terhadap Eko Hadi meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal (illegal access).

Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan penggunaan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Akses tersebut diduga digunakan saat Irjen Eko menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik

Sidang KKEP terhadap Irjen Eko Hadi akan dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi merangkap anggota. Sementara itu, Irjen Agus Dwi Hermawan menjabat Wakil Ketua Komisi merangkap anggota.

Adapun tiga anggota komisi lainnya yakni Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Atas dugaan pelanggaran tersebut, Irjen Eko Hadi dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Trunoyudo menegaskan, seluruh rangkaian persidangan akan mengedepankan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas.

"Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas," katanya.

Irjen Ahrie Sonta Sudah Dipecat

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Mereka di antaranya Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dalam perkembangan perkara tersebut, Polri telah menetapkan keempatnya sebagai tersangka. Dugaan penyadapan disebut berlangsung pada periode 2025-2026 dan tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh Politik, media massa, organisasi masyarakat …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

Utang Indonesia Bertambah, BI Ungkap Angkanya Capai USD458,9 Miliar

Oleh Van · 16 Nov, 20.42 WIB

JAKARTA — Utang luar negeri Indonesia mencapai USD458,9 miliar atau sekitar 458,9 miliar dolar AS pada kuartal III 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya yang tercatat sebesar USD455,4 miliar.

Data Bank Indonesia (BI) yang dirilis Senin, 16 November 2026, menunjukkan utang luar negeri Indonesia tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan tersebut terutama berasal dari bertambahnya utang pemerintah. Sementara itu, utang luar negeri sektor swasta justru mengalami sedikit penurunan.

Utang Pemerintah Naik, Swasta Menurun

BI mencatat utang luar negeri pemerintah mencapai USD220,2 miliar pada kuartal III 2026. Jumlah ini meningkat dari kuartal sebelumnya yang sebesar USD216,3 miliar.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Oleh Redaksi · 17 Nov, 08.50 WIB



0leh:Rosadi Jamani

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini makin melempem. Semenjak "dilecehkan" Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, gigi KPK seperti rontok. Macan ompong. Kalau pun nangkap, sasarannya paling bupati atau kepala dinas. Semakin receh.

Dulu, mendengar nama KPK saja pejabat bisa mendadak masuk angin. Telepon dimatikan, sopir disuruh siaga, koper disiapkan. Sekarang? Jangan-jangan koruptor malah tidur nyenyak. Malah asyik healing ke Manila. Sementara pegawai KPK sibuk mengawasi sesama pegawainya. Macan yang akan berubah jadi tikus.

Lihat statistik OTT. Menurut pemantauan ICW, tahun 2018 KPK melakukan 30 OTT. Tahun 2024 tinggal lima. Tahun 2025 naik menjadi 11, 2026 baru 23 kali. Lumayan, tetapi belum membuat koruptor kehilangan selera makan.

Padahal KPK punya teknologi penyadapan, penyelidik, penyidik, dan kemampuan melacak transaksi. Peralatan canggih, tetapi hasilnya kadang seperti mencari jarum di tumpukan jerami menggunakan teropong bintang.

Belum lagi cerita penyitaan. Februari 2025, KPK menyita sekitar Rp59,49 miliar dari rumah Japto Soerjosoemarno dan Ahmad Ali dalam pengembangan perkara Rita Widyasari.

Dalam perkara lain, uang dan aset juga diamankan. Tentu, penyitaan bukan bukti pemiliknya bersalah. Tetapi publik berhak bertanya, bagaimana kelanjutan penelusuran aset dan pertanggungjawaban hukumnya? Jangan sampai uangnya sudah masuk gudang barang bukti, kasusnya malah masuk gudang kenangan.

Kasus Ridwan Kamil juga menarik. Rumahnya digeledah pada Maret 2025 dalam perkara pengadaan iklan Bank BJB dengan perkiraan kerugian negara Rp223,6 miliar. Sejumlah kendaraan disita. RK diperiksa sebagai saksi, tetapi status tersangka entah kapan.

Lalu muncul cerita lebih absurd. November 2026, tiga pegawai KPK berinisial TS, MS, dan AS dilaporkan MAKI ke Dewas karena diduga membocorkan informasi perkara ATR/BPN kepada pihak yang sedang berperkara.

KPK menyatakan dugaan itu sedang diperiksa. Belum terbukti, tetapi bayangkan, lembaga bertugas mengintai koruptor malah memiliki pegawai memberi tahu koruptor kapan sedang diintai. Ini CCTV rekamannya dikirim kepada maling!

Sebelumnya, pegawai KPK berinisial DIS juga menjadi tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terkait kasus Pemalang.

Ada pula laporan terhadap penyidik AKBP Rossa Purbo Bekti oleh Hasto Kristiyanto ke Dewas atas dugaan intimidasi. Semua harus diperiksa secara objektif, tetapi rentetan persoalan internal ini jelas bukan prestasi.

Kasus Bobby Nasution pun menambah panjang daftar pertanyaan. Hakim Tipikor Medan, Khamozaro Waruwu, meminta Bobby dihadirkan sebagai saksi dalam …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Pj Sekda Lantik Asnawi sebagai Kadis PUPR Aceh, Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Jadi Prioritas

Oleh Redaksi · 16 Nov, 19.02 WIB

BANDA ACEH – Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taufik atas nama Gubernur Aceh melantik Asnawi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh. Pelantikan berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Senin (16/11/2026).

Asnawi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh. Setelah pergeseran jabatan tersebut, Gubernur Aceh menunjuk Irwansyah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM Aceh.

Dalam sambutan Gubernur Aceh yang dibacakan Taufik, Kadis PUPR yang baru diminta memprioritaskan pemulihan infrastruktur pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir November 2025.

Gubernur menilai, PUPR memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, terutama dalam memastikan kualitas jalan, jembatan, sumber daya air, serta penataan ruang yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

"Pastikan setiap program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Prioritaskan penanganan infrastruktur pada wilayah-wilayah yang mengalami gangguan akses, agar konektivitas antarwilayah dan roda kehidupan masyarakat dapat segera pulih," demikian pesan Gubernur.

Selain itu, Kadis PUPR diminta memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), TNI, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur.

Gubernur juga menekankan pentingnya membangun infrastruktur yang lebih tangguh dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana sebagai pelajaran dari bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh.

Di sisi internal, Asnawi diminta segera melakukan konsolidasi organisasi, membangun tim kerja yang solid, menempatkan aparatur sesuai kompetensi, serta meningkatkan disiplin dan profesionalisme pegawai.

Percepatan realisasi anggaran juga menjadi perhatian. Pengendalian program, proses pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan pekerjaan konstruksi harus diperkuat agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan pada akhir tahun anggaran.

Meski demikian, Gubernur mengingatkan agar percepatan serapan anggaran tetap mengutamakan kualitas pekerjaan, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap anggaran yang digunakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Gubernur berharap Asnawi dapat segera bekerja dan menghadirkan langkah-langkah konkret dalam menjalankan amanah, khususnya mempercepat pembangunan serta pemulihan infrastruktur Aceh.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Asisten Sekda, Staf Ahli Gubernur dan para Kepala SKPA. []

NASIONAL

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Oleh Redaksi · 17 Nov, 18.38 WIB



BANDA ACEH -Bursa calon wakil presiden yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka, sedang hangat dibahas publik.

Sejumlah nama bermunculan. Salah satunya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, menyebut Yusril Ihza Mahendra punya pengalaman panjang dengan pernah menduduki jabatan di eksekutif, bahkan sejak era pemerintahan orde baru.

"Saya kira soal kapasitas dia sebagai seorang pejabat di pemerintahan, tidak perlu diragukan lagi. Dia juga cukup cakap, misalnya di urusan administrasi tata negara," ujar Lucius kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 17 November 2026.

Menurut Lucius, sosok wapres yang ideal untuk mendampingi Presiden Prabowo harus memiliki pengalaman dan punya pengetahuan mengelola negara.

Selain itu, kata Lucius, figur itu juga harus mendapat kepercayaan dari presiden untuk menjalankan tugas-tugas yang didelegasikan kepadanya.

"Dan di situ kalau kita lihat, Yusril adalah menterinya Presiden Prabowo. Ada relasi baik di sana. Tapi apakah relasi baik juga sekaligus mengatakan bahwa presiden percaya dia dan mau mendelegasikan tugas-tugas sebagian ke wakil presiden. Itu kan kita belum tahu," lanjutnya.

Menyoal dukungan partai Politik, Lucius menilai Yusril tidak punya cukup daya tawar atau bargaining power lantaran Partai Bulan Bintang (PBB) yang pernah dipimpinnya tidak masuk Parlemen.

"Jadi dukungan politik itu yang saya kira minim dari Yusril. Walaupun dia mantan ketua PBB, tapi kan tidak cukup punya power untuk dijadikan alat bargaining, dengan presiden dan juga dengan partai-partai koalisi," pungkasnya.

EKONOMI

OJK Ungkap Alasan Warga RI Pakai Pinjol, Banyak untuk Kebutuhan Mendesak

Oleh Van · 16 Nov, 22.31 WIB

JAKARTA — Kebutuhan mendesak menjadi salah satu alasan masyarakat Indonesia mengandalkan pinjaman online (pinjol).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut pinjaman jangka pendek dengan nominal kecil banyak digunakan untuk menutup kebutuhan hidup yang harus segera dipenuhi.

Kondisi tersebut ikut terlihat dari besarnya pembiayaan konsumtif dalam industri pinjaman daring atau pindar.

Pembiayaan jenis ini digunakan untuk kebutuhan pribadi, bukan untuk menjalankan atau mengembangkan usaha.

OJK menjelaskan, kebutuhan mendesak membuat masyarakat cenderung mencari pinjaman yang prosesnya relatif cepat.

Sementara itu, pembiayaan untuk kegiatan produktif membutuhkan pemeriksaan usaha dan pengelolaan risiko yang lebih mendalam.

Pembiayaan Pinjol Tembus Rp106,48 Triliun

Data OJK mencatat outstanding atau total pembiayaan pinjaman daring mencapai Rp106,48 triliun pada September 2026. Jumlah tersebut tumbuh 17,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Angka itu menunjukkan besarnya dana yang masih beredar dan belum dilunasi peminjam kepada penyelenggara pinjaman daring.

Pada Agustus 2026, pertumbuhan pembiayaan industri ini bahkan tercatat lebih tinggi, yakni 22,07 persen secara tahunan.

OJK juga mencatat pembiayaan kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tumbuh 12,49 persen secara tahunan.

Artinya, layanan pinjaman daring tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pribadi, tetapi juga memiliki penyaluran ke sektor usaha.

Survei APJII: Kebutuhan Mendesak Jadi Alasan Teratas

Gambaran alasan masyarakat menggunakan pinjol juga terlihat dalam survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada awal 2026.

Sebanyak 22,8 persen pengguna pinjol menyebut kebutuhan mendesak, seperti biaya kesehatan dan membayar utang, sebagai alasan menggunakan layanan tersebut.

Alasan berikutnya adalah membeli barang kebutuhan sehari-hari sebesar 18,3 persen.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ngaku Teman SMP Listyo Sigit, Sosok Ini Sebut Eks Kapolri Tak Punya Nyali Makar ke Prabowo

Oleh Redaksi · 17 Nov, 10.36 WIB



BANDA ACEH - Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mengaku sebagai teman SMP mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (LSP), yang disebut sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.Dalam keterangannya, Dokter Tifa menilai tidak mungkin Listyo Sigit menjadi dalang di balik dugaan aksi makar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo melalui kasus penyadapan tersebut.

"MAKAR LHO! Ngga mungkin dan mustahil banget teman SMPku mas Listyo Sigit Prabowo aka LSP mau makar for himself!" tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Senin (16/11).

"Ngapain coba Sigit mau makar. Mau merebut Pemerintah, gitu? Mau mengkudeta Presiden, gitu.?" imbuhnya.

Dokter Tifa kemudian menyebut Listyo Sigit tidak mungkin memiliki keberanian untuk melakukan aksi tersebut. Ia bahkan menilai mantan Kapolri itu hanya menjalankan perintah pihak lain.

"Mana mungkin lah Sigit punya keberanian ngga ngotak. Sigit itu, seseKAPOLRI adalah cuma suruhan doang. Mentalnya ngga nyampe jadi Front Man," lanjutnya.

Menurut Dokter Tifa, pihak yang berada di balik dugaan aksi tersebut justru merupakan sosok lain yang disebutnya sebagai pihak yang memiliki kepentingan lebih besar. Namun, ia tidak menyebutkan secara jelas siapa sosok yang dimaksud.

"End Usernya udah pasti adalah seseorang yang ngga tahu malu, ngga tahu diri, ngga tahu batas, ngga punya kenyang, jahat banget, kampungan, udik, kere munggah bale," tegasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi (LP) baru terkait dugaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Penjelasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis (12/11/2026).

“Di samping dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dsn atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau bersama atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” kata Suyudi.

Suyudi menegaskan bahwa indikasi permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintahan tersebut masih memerlukan pendalaman dan pembuktian secara terpisah.

Fokus penyelidikan diarahkan untuk menelusuri sumber perintah, tujuan penyadapan, memeriksa personel yang mengetahui operasi tersebut, serta mengungkap rangkaian kegiatan lapangan yang dilakukan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri Buntut Kasus Penyadapan Prabowo, Langsung Banding

Oleh Redaksi · 17 Nov, 20.01 WIB



BANDA ACEH - Eko Hadi Santoso mengajukan banding atas putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Polri dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Putusan tersebut dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri, Selasa (17/11/2026).

“Atas Putusan tersebut pelanggar EHS menyatakan banding,” kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Trunoyudo menjelaskan, dalam sidang KKEP terungkap dugaan permufakatan akses ilegal terhadap sistem milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Sidang KKEP tersebut digelar secara tertutup oleh Polri. Eko diduga melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Dengan putusan tersebut, Eko Hadi menyusul Ahrie Sonta yang lebih dahulu dijatuhi sanksi PTDH dari Polri. Putusan terhadap Ahrie dibacakan dalam sidang etik pada Selasa (10/11/2026).

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Selain Listyo Sigit, tiga perwira tinggi Polri lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Listyo Sigit, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta kini ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi berstatus tahanan rumah

NASIONAL

Parpol Takut Kehilangan Muka Usulkan Wapres Pengganti Gibran

Oleh Redaksi · 17 Nov, 10.42 WIB



BANDA ACEH -Sikap partai-partai Politik yang tidak agresif mengusulkan nama calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka dinilai memiliki dua kemungkinan alasan.

Pengamat Politik Nurul Fatta mengatakan, partai-partai kemungkinan telah membaca arah politik Istana sehingga memilih tidak berbenturan dengan preferensi Presiden Prabowo Subianto.

"Ada kemungkinan posisi wapres ini sudah dikunci Istana," kata Nurul Fatta kepada RMOL, Selasa, 17 November 2026.

Kemungkinan kedua, partai-partai menghindari risiko kehilangan muka apabila kandidat yang mereka usulkan ternyata tidak terpilih.

"Dengan demikian, sikap diam partai bukan berarti tanpa kepentingan, tapi memang menjadi strategi menjaga posisi tawar dan hubungan dengan Presiden," jelas Fatta.

Di sisi lain, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyepakati perubahan jadwal sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden (Wapres) dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, perubahan jadwal dilakukan setelah pihaknya menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar pelaksanaan sidang paripurna diundur satu pekan.

Presiden membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai-partai pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh guna memperoleh pertimbangan sebelum mengusulkan dua nama calon Wapres kepada MPR.

ACEH

Mualem Buka Konsolidasi dan Percepatan 11 Aksi Konkret Pemerintah Aceh

Oleh Redaksi · 16 Nov, 18.43 WIB

BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) membuka kegiatan Konsolidasi dan Percepatan 11 Aksi Konkret Pemerintah Aceh Periode November 2026–Januari 2027 melalui sambungan Zoom Meeting, Senin (16/11/2026).Kegiatan tersebut diikuti para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan jajaran pejabat pengelola anggaran dari Gedung Pusat Pengendalian dan Koordinasi (P2K), Kompleks Kantor Gubernur Aceh. Jalannya kegiatan dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh, Taqwallah, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.Dalam arahannya, Mualem menyampaikan 11 aksi konkret yang harus menjadi perhatian dan dilaksanakan secara serius oleh seluruh SKPA. Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan penyelesaian berbagai agenda pemerintahan pada akhir 2026 sekaligus mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik pada awal 2027.Sebelas aksi konkret tersebut dibagi dalam tiga kelompok utama, yakni penuntasan APBA 2026, percepatan persiapan APBA 2027, serta penguatan kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPA.Pada kelompok pertama, Mualem menekankan tiga hal yang harus dituntaskan, yaitu realisasi keuangan APBA 2026 di atas 95 persen dengan penyelesaian fisik kegiatan. “Dan memastikan ketersediaan dan keamanan dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), serta menuntaskan Dana Transfer ke Daerah (TKD),” kata Mualem.Selanjutnya, pada kelompok percepatan APBA 2027, terdapat enam langkah yang harus menjadi perhatian seluruh SKPA.

”Langkah tersebut meliputi memastikan kelengkapan dokumen dan kegiatan, mempercepat pengesahan anggaran sebelum 20 November 2026, serta menyelesaikan penandatanganan RKA-DPA sebelum 31 Desember 2026,” sebut Mualem.Selain itu, SKPA juga diminta memastikan penerbitan SK pengelola anggaran sebelum 4 Januari 2027, melaksanakan kegiatan perdana pada awal Januari atau sebelum 7 Januari 2027, serta menandatangani kontrak perdana sebelum 20 Januari 2027.Sementara itu, dua aksi lainnya berfokus pada penguatan kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPA. “Saya meminta seluruh perangkat daerah mengawal 12 layanan publik serta memastikan pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) dan komitmen kampanye,” kata Mualem.Melalui konsolidasi tersebut, seluruh SKPA diharapkan memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam menjalankan setiap target yang telah ditetapkan. Percepatan pelaksanaan program juga diperlukan agar tidak terjadi keterlambatan dalam realisasi anggaran maupun pelaksanaan kegiatan pemerintahan.Usai pengarahan Gubernur, kegiatan dilanjutkan dengan pembekalan dan desk finalisasi komitmen SKPA.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Prihatin Mahasiswi Diduga Diperkosa Bupati Kupang, Komisi X DPR Dorong Hukuman Maksimal

Oleh Redaksi · 17 Nov, 09.13 WIB



BANDA ACEH - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani prihatin atas laporan dugaan kekerasan seksual terhadap mahasiswi berinisial RW (21) yang menyeret nama Bupati KupangYosef Lede. Dia mendorong terlapor dijatuhi hukuman maksimal jika terbukti melakukan tindak pidana.

Lalu mengatakan, kasus tersebut menjadi perhatian di tengah upaya Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memberantas kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

"Tapi silakan aparat penegak hukum untuk menyelidiki kebenaran dari hal tersebut," ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Dia mengaku belum menerima laporan mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut. Meski demikian, dia mengecam tindakan kekerasan seksual apabila dugaan itu terbukti dilakukan oleh terlapor.

Legislator Fraksi PKB tersebut berharap aparat penegak hukum mengusut laporan itu secara tuntas. Dia juga mendorong pemberian hukuman maksimal apabila terlapor terbukti bersalah, terlebih yang bersangkutan merupakan seorang kepala daerah.

"Ya harapannya begitu (dihukum maksimal). Sebagai public figure, sebagai kepala daerah apalagi, tentu harus memberikan contoh yang baik, memiliki etika, adab, moral, dan akhlak yang menjadi panutan bagi seluruh masyarakat yang dipimpinnya," katanya.

Sebelumnya, Bupati Kupang Yosef Lede dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) atas dugaan kekerasan seksual terhadap perempuan berinisial RW (21). Laporan tersebut diterima pada Kamis, 12 November 2026, dengan Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan penyidik Direktorat Reserse PPA dan PPO masih mendalami laporan tersebut untuk mengungkap peristiwa yang dilaporkan.

“Polda NTT memastikan akan melakukan klarifikasi terhadap pihak terlapor dalam penanganan laporan dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21),” katanya.

Henry menjelaskan, penyidik tidak hanya mengandalkan keterangan awal korban. Polisi juga akan mengumpulkan alat bukti dan meminta keterangan saksi-saksi lain untuk memperjelas perkara tersebut.

"Berdasarkan laporan dan keterangan awal yang diterima penyidik, dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu komplek rumah dinas, Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Namun, seluruh informasi yang diperoleh masih terus didalami melalui proses penyelidikan," ucapnya.

Berdasarkan keterangan awal korban, peristiwa itu bermula ketika dirinya bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi mengenai penawaran pekerjaan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Tiga Nama Sudah Disodorkan ke Prabowo, Syahganda: Mereka Paham Ideologi Presiden

Oleh Redaksi · 17 Nov, 10.48 WIB



BANDA ACEH - Penentuan sosok yang akan mengisi posisi strategis di pemerintahan masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Meski tiga nama telah mencuat dari kalangan partai Politik koalisi, keputusan akhir tetap berada di tangan kepala negara setelah mempertimbangkan berbagai masukan.

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengatakan dirinya belum menerima arahan langsung dari Presiden terkait penentuan tersebut. Namun, ia menilai ketiga nama yang telah diusulkan merupakan sosok yang sudah lama bekerja sama dengan Prabowo.

"Kalau dari Presiden, saya belum diarahkan. Tetapi saya tahu bahwa tiga orang yang disebut tadi merupakan orang-orang yang sudah lama bekerja sama dengan Bapak Presiden," kata Syahganda usai menyampaikan sambutan dalam acara Kick Off Pemagangan Nasional (MagangHub) di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurut Syahganda, keputusan tersebut kemungkinan masih membutuhkan pertimbangan lebih luas, termasuk komunikasi dengan partai-partai pendukung pemerintah.

Terlebih, Presiden Prabowo saat ini tengah berada di China untuk menghadiri agenda APEC. Sementara itu, agenda yang semula dijadwalkan pada 2 Desember juga mengalami penundaan.

"Karena Bapak Presiden sekarang masih di China untuk APEC, kemudian acaranya ditunda. Harusnya 2 Desember, tetapi ditunda. Tentu Bapak Presiden perlu mempertimbangkan lebih besar, termasuk masukan dari teman-teman koalisi partai," ujarnya.

Saat ditanya mengenai kriteria khusus yang menjadi pertimbangan Presiden, Syahganda menilai ketiga kandidat tersebut sudah memiliki pemahaman yang baik terhadap pemikiran dan ideologi politik Prabowo.

"Saya pikir ketiganya sebenarnya sudah merupakan orang-orang yang sangat mengerti ideologi Bapak Presiden. Tetapi nanti keputusannya tentu menyangkut pembicaraan atau berembuk dengan partai-partai politik pendukung," jelasnya.

Syahganda juga menanggapi kemungkinan munculnya nama lain di luar tiga kandidat yang telah disebutkan. Menurutnya, partai-partai koalisi sudah menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Prabowo.

"Ini kan sudah diumumkan oleh teman-teman koalisi partai bahwa mereka menyerahkan semuanya kepada Pak Prabowo," pungkasnya

NASIONAL

Terungkap! Dua Eks Napiter Bakar Warung Mi Babi Sukoharjo karena Alasan Ini

Oleh Van · 17 Nov, 18.13 WIB

JAWA TENGAH — Motif pembakaran Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Sukoharjo, Jawa Tengah, akhirnya terungkap.

Dua tersangka yang merupakan mantan narapidana terorisme diduga melakukan aksi tersebut karena tidak menyukai penjualan mi babi di lokasi itu.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut pada Selasa, 17 November 2026.

Dua Eks Napiter Tak Suka Penjualan Mi Babi

“Mereka tidak suka ada orang yang jualan mie babi di tempat tersebut,” ungkap Anwar pada Selasa, 17 November 2026.

Kedua tersangka dalam perkara ini berinisial ST dan I. Keduanya telah diperiksa penyidik setelah ditangkap dalam rangkaian pengungkapan kasus.

Warung Mi dan Babi Tepi Sawah berada di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

Tempat usaha tersebut dibakar dan dirusak pada Sabtu, 12 September 2026, oleh sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aksi tersebut.

Dua Tersangka Sudah Ditangkap Polisi

Tersangka ST atau AS ditangkap lebih dahulu pada Senin, 19 Oktober 2026, di sebuah rumah di Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Sukoharjo.

Sementara itu, tersangka I ditangkap di wilayah Kota Surakarta pada Jumat, 6 November 2026, setelah sebelumnya masuk daftar pencarian orang.

Kapolres Sukoharjo AKBP Indra Maulana Saputra menyampaikan penangkapan I dalam keterangan pers di Mapolda Jawa Tengah pada Sabtu, 7 November 2026.

“Tersangka I sebelumnya sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO dan berhasil diamankan di wilayah Solo atau Surakarta,” kata Indra.

Dalam perkembangan penyidikan sebelumnya, polisi menduga I berperan mengajak rekannya untuk melakukan pembakaran dan perusakan warung.

Polisi Dalami Pasal yang Dikenakan

Anwar menyebut penyidik mempertimbangkan sejumlah pasal untuk menjerat kedua tersangka, termasuk Pasal 308, Pasal 307, Pasal 262, Pasal 521, atau Pasal 476 KUHP.

Penyidik masih mendalami perkara tersebut untuk memastikan penerapan pasal sesuai dengan perbuatan dan bukti yang ditemukan.(*)

HIBURAN

Raffi Ahmad Diserang Sana-sini, Ribuan Investor Pilih Kabur dari Saham RANS

Oleh Redaksi · 16 Nov, 17.20 WIB

BANDA ACEH - Jumlah pemegang saham PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk (RANS) kembali menyusut pada Oktober 2026. Dalam kurun waktu satu bulan, perusahaan milik pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu kehilangan 10.883 investor, sehingga jumlah pemegang sahamnya kini tersisa 115.370.Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah tersebut turun dari posisi akhir September 2026 yang masih mencapai 126.253 investor.

Penyusutan ini sekaligus memperpanjang tren berkurangnya pemegang saham RANS sejak perusahaan resmi melantai di bursa melalui penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) pada awal Juli 2026.

Saat pertama kali mencatatkan sahamnya di BEI, RANS memiliki 754.691 pemegang saham. Penurunan jumlah pemegang saham ini berlangsung di tengah perhatian publik terhadap keterlibatan anak usaha RANS dalam sejumlah proyek pengadaan jasa yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya pengadaan jasa oleh dua kementerian yang melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad, yakni PT Rans Animasi Indonesia. Pengadaan tersebut berlangsung sepanjang 2024 hingga 2026 dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 14,69 miliar.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Peran Partai Ummat dalam Menumbangkan Jokowi dan Geng Solo

Oleh Redaksi · 17 Nov, 08.05 WIB



SAAT sebagian besar partai Politik memilih bergabung dengan pemerintah, suara kritik di dalam parlemen nyaris hilang. Banyak tokoh memilih diam dan bermain aman demi menjaga posisi. Di tengah situasi politik yang seragam itu, Partai Ummat justru mengambil jalan berbeda.

Sejak awal berdiri, Partai Ummat secara terbuka memposisikan diri sebagai penentang kebijakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi. Tokoh utamanya, Profesor Amien Rais, bersama jajaran pengurus partai rutin melontarkan kritik pedas soal isu-isu sensitif yang dihindari partai lain.

Partai Ummat menolak keras wacana presiden tiga periode dan menyoroti kuatnya pengaruh kelompok pemodal di sekitar istana. Partai Ummat terus mengkritik lonjakan utang negara serta proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sikap berani di luar parlemen ini membuat Partai Ummat menjadi tempat bersandar bagi warga yang haus akan kebenaran dan keadilan. Partai Ummat memang tidak punya kursi di DPR dan sering menghadapi tekanan politik.

Namun, konsistensinya dalam bersuara membuat fungsi pengawasan terhadap kekuasaan tetap berjalan. Partai Ummat membuktikan diri sebagai pengkritik yang lantang saat banyak elit politik memilih bungkam.

Sepanjang periode 2021 hingga 2024, kritik Partai Ummat terhadap pemerintahan Jokowi berfokus pada sejumlah isu utama, yakni penolakan perpanjangan masa jabatan presiden, tuduhan menguatnya oligarki, melemahnya penegakan hukum, beban ekonomi serta utang negara, dan praktik dinasti politik menjelang Pilpres 2024.

Kritik tersebut disampaikan secara konsisten oleh Ketua Majelis Syura Profesor Amien Rais, Ketua Umum Dr Ridho Rahmadi, dan kader lainnya. Pada tahun pertama kelahirannya, Partai Ummat langsung memposisikan diri sebagai pengawas ketat terhadap arah demokrasi dan evaluasi kinerja tujuh tahun pemerintahan Jokowi.

Pada Maret 2021, Profesor Amien Rais melontarkan peringatan keras mengenai adanya dugaan skenario politik untuk mengubah pasal masa jabatan presiden dalam UUD 1945 dari dua menjadi tiga periode melalui Sidang Istimewa MPR. Partai Ummat menilai wacana tersebut sebagai ancaman serius bagi demokrasi pascareformasi.

Pada Oktober 2021, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi secara resmi memberikan "rapor merah" tujuh tahun kepemimpinan Jokowi. Evaluasi ini mencakup sektor hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Dalam evaluasi tersebut, Dr Ridho Rahmadi menilai pemerintah hanya mengumbar slogan kosong terkait penegakan hukum yang berkeadilan. Partai Ummat menyoroti penyempitan ruang kebebasan berpendapat dan menguatnya praktik oligarki di lingkar kekuasaan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gibran Harus Kerja Keras Jika Ingin Kembali Bertarung di 2029

Oleh Redaksi · 17 Nov, 10.54 WIB



BANDA ACEH -Peluang Gibran Rakabuming Raka kembali berkompetisi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 masih terbuka. Namun, ada sejumlah tantangan Politik dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi jika ingin kembali maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.

Pengamat Politik Adi Prayitno mengatakan, setiap warga negara memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Namun, pencalonan tidak bisa dilakukan secara perseorangan karena harus mendapatkan dukungan partai politik atau gabungan partai politik.

"Jadi kalau Gibran atau siapapun jika ingin maju di Pilpres wajib hukumnya diusung oleh partai ataupun dari gabungan partai politik," kata Adi lewat akun Instagram miliknya, Selasa 17 November 2026.

Menurutnya, kondisi Gibran yang hingga kini belum menjadi bagian dari partai politik menjadi tantangan tersendiri. Terlebih, jika ingin masuk dalam kontestasi Pilpres 2029, Gibran harus membangun akses dan dukungan dari partai-partai politik yang memiliki kursi di parlemen.

"Ini tentu Gibran harus kerja keras karena per hari ini rasa-rasanya Gibran belum punya akses terhadap partai-partai politik yang lolos parlemen," ujarnya.

Adi juga menyoroti persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yakni minimal berpendidikan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.

Persyaratan tersebut menjadi perhatian karena persoalan ijazah Gibran sebelumnya memicu polemik hukum hingga muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Direktur Parameter Politik Indonesia itu menilai Gibran juga perlu memperhitungkan peta elektabilitas jika ingin kembali bersaing pada Pilpres 2029.

Menurutnya, tingkat elektabilitas Gibran saat ini belum terlalu kompetitif dibandingkan sejumlah figur politik lain, seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan, maupun KDM.

"Kalau membaca argumen elektabilitas, Gibran tidak terlampau kompetitif, tidak terlalu mentereng. Masih kalah elektabilitas dari Prabowo ataupun figur lain misalnya dari Anies Baswedan atau KDM," pungkas Adi.

NASIONAL

Raffi Ahmad Akhirnya Minta Maaf Setelah Dihujat Siang Malam soal Rp14,6 Miliar

Oleh Redaksi · 17 Nov, 09.20 WIB

0leh:Rosadi Jamani

DUNIA artis sudah cukup membesarkan namanya. Uangnya melimpah. Ternyata itu belum cukup. Raffi Ahmad mencoba peruntungan dengan membibik uang rakyat. Dana Rp14,6 miliar disiapkan untuknya.

Belum sempat dinikmati, ICW mengungkap, lalu netizen menghujatnya siang dan malam. Aa Raffi pun minta maaf.

Ceritanya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti belanja jasa influencer yang berkaitan dengan perusahaan Raffi senilai Rp14.696.955.002. Rinciannya, sekitar Rp3,9 miliar melalui enam paket pekerjaan Kemendikbudristek pada 2024 dan Rp10,8 miliar melalui tiga paket pekerjaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025-2026.

Masalahnya, ketika kontrak KKP berlangsung, Raffi sudah menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Jabatan negara dan bisnis swasta seperti pasangan pengantin baru tidur sekamar, tetapi tetangga mulai bertanya siapa membayar listrik.

ICW mempertanyakan proses pengadaan, penentuan harga, hasil pekerjaan, transparansi kontrak, dan potensi konflik kepentingan. Fiersa Besari ikut menyentil urgensi anggaran influencer. Tompi mempertanyakan angka Rp14 miliar. Jehian Sijabat mengungkit pengalaman polemik kampanye berbayar influencer. Netizen pun menghujat berjamaah.

Siang malam. Kalau hujatan bisa dijadikan pupuk, mungkin seluruh kebun sawit Indonesia sudah tumbuh sampai menembus orbit Jupiter.

Akhirnya Raffi muncul melalui video permintaan maaf. Kalimatnya manis, wajahnya serius, suasananya menyentuh. Kalau diputar menjelang berbuka puasa, mungkin penonton langsung membatalkan niat makan karena sibuk mengusap air mata.

Ia menjelaskan kerja sama dengan Kemendikbudristek berlangsung sebelum menjabat Utusan Khusus Presiden. Ia juga menyatakan siap diperiksa Inspektorat, BPKP, dan BPK sesuai kewenangan.

Tetapi, tunggu! Drama belum tamat. Bersama Ariel, Desta, dan Gading Marten melalui The Dudas Minus One, Raffi berkomitmen mengalokasikan Rp15 miliar untuk korban bencana, terutama di Pidie Jaya dan Gayo Lues, Aceh. Dana disebut berasal dari uang pribadi Raffi serta honor Ariel, Desta, dan Gading dari kerja sama dengan KKP.

Waduh! Angka donasi lebih besar sekitar Rp303 juta dari nilai kontrak yang dipersoalkan. Kalkulator sampai minta cuti tahunan. Tukang hitung di pasar pun mendadak ingin kuliah matematika lagi.

Membantu korban bencana tentu mulia. Tetapi, jangan mencampuradukkan donasi dengan pertanggungjawaban pengadaan. Itu dua urusan berbeda. Jangan sampai orang bertanya kuitansi malah dituduh tidak punya hati. Ini bukan lomba siapa paling dermawan, melainkan pemeriksaan bagaimana uang negara dibelanjakan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Nusron Wahid Digugat Rp1 Miliar ke PN Jaksel

Oleh Redaksi · 17 Nov, 09.01 WIB



BANDA ACEH - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid digugat Rp1 miliar atas dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Berdasarkan penelusuran Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan pada Minggu (15/11/2026), gugatan tersebut diajukan oleh Waterman David Gea pada Kamis (12/11/2026). Perkara itu terdaftar dengan nomor 1419/Pdt.G/2026/PN Jkt.Sel.

Nusron bukan satu-satunya pihak yang digugat. Ada lima nama lain yang turut masuk sebagai tergugat, yakni Komjen Pol Pudji Prasetijanto Hadi, Nugraha, Pangasian Hatigoran Sirait, Darius Duhuzaro Gulo, dan Barnabas Laowo.

Dalam SIPP, perkara tersebut tercatat dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum. Namun, petitum atau tuntutan penggugat belum tersedia sehingga alasan gugatan dan hal yang diminta kepada para tergugat belum diketahui secara terperinci.

PN Jakarta Selatan menjadwalkan sidang perdana perkara ini pada Kamis (3/12/2026) pukul 09.30 WIB. Sidang akan digelar di Ruang Sidang 03 dengan agenda pemanggilan para pihak

NASIONAL

Indonesia Butuh Wapres Berjiwa Kebangsaan, Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Oleh Redaksi · 17 Nov, 08.31 WIB



BANDA ACEH - Indonesia membutuhkan sosok Wakil Presiden yang memiliki karakter kebangsaan kuat, memahami keberagaman masyarakat, serta mampu menjadi jembatan persatuan dari Sabang sampai Merauke.

Kepemimpinan nasional tidak cukup hanya mengandalkan popularitas dan kedekatan dengan lingkaran kekuasaan, tetapi harus ditopang integritas, kepekaan sosial, dan kemampuan melayani seluruh rakyat Indonesia.

Pandangan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Noor Azhari, yang menekankan pentingnya menghadirkan kepemimpinan nasional yang membumi, inklusif, dan memiliki pemahaman mendalam terhadap realitas sosial serta keragaman geografis Indonesia.

"Indonesia bukan hanya Jakarta atau Pulau Jawa. Indonesia adalah seluruh wilayah Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Karena itu, bangsa ini membutuhkan Wakil Presiden yang memiliki jiwa kebangsaan kuat, mampu merangkul seluruh elemen masyarakat, dan tidak terjebak dalam kepemimpinan elitis yang berjarak dengan rakyat," ujar Noor Azhari dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Menurutnya, jabatan Wakil Presiden harus dipahami sebagai amanah konstitusional untuk membantu Presiden menjalankan pemerintahan, sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat di berbagai daerah.

Ia menilai karakter kebangsaan seorang pemimpin tidak cukup diukur dari kemampuannya menyampaikan jargon persatuan, tetapi harus tercermin dalam keberanian mendengar aspirasi, memahami persoalan daerah, serta memperjuangkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.

"Kekuatan Indonesia justru terletak pada keberagamannya. Seorang Wakil Presiden harus mampu memahami perasaan masyarakat Aceh, kebutuhan warga perbatasan Kalimantan, harapan masyarakat kepulauan Maluku, hingga aspirasi masyarakat adat Papua. Mereka semua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia," tegasnya.

Noor Azhari juga mengingatkan bahwa kepemimpinan nasional tidak semestinya terperangkap dalam eksklusivitas Politik, kepentingan kelompok, maupun simbol-simbol kekuasaan yang menjauhkan pemimpin dari kehidupan masyarakat.

Lanjut dia, seorang pemimpin yang memiliki karakter kebangsaan akan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok, menghormati kemajemukan, serta menjadikan pelayanan publik sebagai ukuran utama keberhasilan kepemimpinan.

"Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang hanya hadir ketika ada kepentingan politik. Rakyat membutuhkan pemimpin yang mau mendengar ketika mereka menghadapi kesulitan, hadir ketika daerah membutuhkan perhatian, dan bekerja untuk memastikan negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga," jelasnya.

Lebih jauh, Noor Azhari menekankan pentingnya perspektif kewilayahan dalam kepemimpinan nasional.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Yusril Ungkap Kemungkinan Tersangka Baru Penyadapan Prabowo, Dalang bakal Terungkap?

Oleh Redaksi · 17 Nov, 18.46 WIB



BANDA ACEH - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan terdapat kemungkinan bertambahnya jumlah tersangka kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Penyelidikan yang dilakukan polisi diharapkan dapat menguak tujuan penyadapan, pihak yang memanfaatkannya, serta kepentingan di balik tindakan tersebut.

"Mungkin juga akan ada tersangka-tersangka baru, dan juga akan juga akan terungkap sebenarnya ke mana arah daripada penyadapan dan kemudian juga dari manfaat dari penyadapan itu siapa yang menggunakan dan untuk kepentingan apa," ujar Yusril di Sawah Besar, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Meski begitu, dia menegaskan hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut lantaran masih dalam proses pendalaman.

Yusril menghormati proses hukum yang dilakukan polisi secara cermat dan hati-hati. Pasalnya penyadapan yang dilakukan mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo mengarah ke dugaan makar.

"Karena masalah makar itu bukan masalah sederhana. Masalah makar itu masalah sangat serius, ya," katanya.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta akses ilegal.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi tak ditahan di situ karena alasan kesehatan.

Mabes Polri juga menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026

INTERNASIONAL

VIRAL Makhluk Mirip Pterodactyl Terbang di Langit Meksiko, Belum Punah?

Oleh Redaksi · 16 Nov, 20.42 WIB

BANDA ACEH – Dunia sains diguncang hebat! Video kamera keamanan yang direkam di kawasan Anapra, Ciudad Juárez, menampilkan siluet gelap bersayap raksasa yang terbang rendah di malam hari. Banyak pihak, termasuk peneliti fenomenal Jaime Maussan, yakin ini adalah pterodactyl hidup — reptil terbang yang seharusnya sudah punah 66 juta tahun lalu.Menurut kesaksian dan analisis awal Maussan, makhluk tersebut memiliki lebar sayap 3–4 meter, panjang tubuh sekitar 10 meter, serta bentuk kepala dengan “crest” khas pterosaur. Video pendek berdurasi 1,5 detik yang beredar sejak akhir Oktober–awal November 2026 ini sempat ditangkap kamera rumah warga setelah dipicu gerakan kucing, lalu menyebar viral. Video kedua yang dikaitkan dengan area dekat Bandara Internasional Abraham González semakin memperkuat spekulasi bahwa makhluk prasejarah ini sedang berkeliaran di langit perbatasan.

Alleged pterodactyl filmed in Mexico

A large dark-winged creature flapping across the daytime sky over Mexico recently went viral on TikTok

Many now claim it's a flying dinosaur, though local officials dismissed the claims, saying it's likely a large bird https://t.co/xYVNOvFPZw

— RT (@RT_com) November 16, 2026

Maussan tidak main-main. Di programnya, ia menyebut dua kemungkinan mengejutkan:

- Populasi pterosaur yang berhasil bertahan di wilayah terpencil hingga zaman modern.

- Atau bahkan makhluk yang muncul dari portal dimensional!

Netizen langsung heboh. Komentar “ini Jurassic Park versi nyata!”, “Meksiko punya naga terbang!”, hingga seruan warga untuk berburu bukti lebih lanjut membanjiri media sosial. Beberapa klaim avistamiento tambahan di Monterrey juga mulai beredar, membuat teori bahwa ada lebih dari satu makhluk semakin liar.

Sementara itu, pihak Perlindungan Sipil Ciudad Juárez hanya menyebut materi tersebut sebagai “hiburan digital”. Namun bagi banyak orang, penjelasan resmi itu justru menambah kecurigaan. Mengapa tidak ada investigasi besar-besaran dari ilmuwan internasional jika ini hanya burung biasa? Apakah ada yang sengaja menutup-nutupi penemuan terbesar abad ini?

Fakta yang tak terbantahkan: pterosaur pernah hidup di wilayah yang kini menjadi Meksiko (fosil ditemukan di Coahuila).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

INTERNASIONAL

Manila Mengangkat Isu, Tokyo Mengirim Peralatan Militer: Dua Manuver Politik Menjelang APEC

Oleh Redaksi · 16 Nov, 18.58 WIB

MANILA - Menjelang pembukaan KTT APEC di Shenzhen, muncul dua perkembangan yang kurang sejalan dengan semangat kerja sama regional, masing-masing di kawasan Laut China Selatan dan Laut China Timur.

Filipina, selaku Ketua ASEAN 2026, berupaya membawa perselisihan bilateral ke dalam agenda multilateral melalui persiapan Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN Plus (ADMM-Plus).

Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengonfirmasi rencana untuk terlebih dahulu mengunjungi Manila guna menghadiri rangkaian pertemuan ASEAN, sebelum melanjutkan perjalanan ke Shenzhen untuk menghadiri Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC.

Melalui pemberitaan media, pihak Jepang juga disebut menginginkan jaminan dari China bahwa Takaichi akan menerima perlakuan diplomatik yang setara. Jika tidak, Tokyo dikabarkan akan menyampaikan protes.

Kedua perkembangan tersebut terjadi di negara yang berbeda, tetapi memperlihatkan pola yang serupa: memanfaatkan forum multilateral untuk membangun narasi Politik dan memasukkan konfrontasi keamanan ke dalam agenda kerja sama regional.

Pertemuan ADMM-Plus ke-13 diselenggarakan di Cebu, Filipina, dengan China pada akhirnya mengirim atase pertahanan dari Kedutaan Besarnya di Filipina sebagai perwakilan.

Pihak China menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena Filipina dinilai telah menyalahgunakan perannya sebagai tuan rumah dan menciptakan berbagai hambatan selama persiapan pertemuan, sehingga forum multilateral berisiko dijadikan sarana untuk kepentingan politik dalam negeri.

Penurunan tingkat perwakilan China bukan berarti negara tersebut menarik diri dari mekanisme multilateral, melainkan menunjukkan penolakannya untuk terlibat dalam kerangka konfrontasi yang dianggap telah dirancang sebelumnya.

Hal lain yang patut diperhatikan adalah bahwa sejumlah negara ASEAN, termasuk Indonesia, Thailand, dan Kamboja, juga tidak mengirimkan menteri pertahanannya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Oleh Redaksi · 17 Nov, 08.43 WIB



BANDA ACEH -Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor diduga kuat ikut mendampingi buronan kasus tindak pidana fitnah, Silfester Matutina, dalam peresmian restoran milik anaknya yang diberi nama "Neng Geulis" di Bandung.

Dalam video yang beredar luas, tampak sosok yang diduga kuat adalah Silfester Matutina turut berada di lokasi acara.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2019 yang diputus pada 20 Mei 2019, Silfester Matutina dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan atas tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Namun, ironisnya, hingga hari ini atau hampir 7 tahun berlalu, Silfester tercatat tidak pernah sekalipun menjalani masa tahanan di balik jeruji besi. Pihak Kejaksaan sebelumnya berdalih kesulitan mendeteksi keberadaan yang bersangkutan," kata politisi PDIP M Guntur Romli dikutip dari akun Instagram gunromli, Senin, 16 November 2026.

Menurut Guntur, hal itu kini menjadi bahan tertawaan publik setelah Silfester secara terang-terangan muncul di depan publik.

Wajah Silfester terekam jelas dalam acara peresmian restoran. Tak hanya sekadar hadir, dia bahkan terlibat dalam sesi sambutan dan berbagi panggung dengan pejabat tinggi negara.

Dalam cuplikan video yang beredar luas, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor terlihat menyapa dan menyebut nama Silfester dalam sambutannya.

"Pak Silfester. Beliau mengundang saya pada hari ini, bersama kami dari Kementerian Tenaga Kerja Tentu saja, saya berbahagia pada siang hari ini saudara saya ini katanya restoran punya anaknya Pak Silfester. Ini Nama restoranya Neng Geulis," kata Wamenaker Afriansyah Noor dalam cuplikan video yang dibagikan Guntur Romli.

Guntur Romli mempertanyakan seorang pejabat negara ikut memeriahkan perayaan di ruangan yang sama dengan seseorang yang semestinya sudah lama mendekam di penjara.

"Pertanyaannya sederhana: kalau wamenaker bisa bertemu dengan Silfester di acara peresmian restoran tersebut, tapi kenapa jaksa eksekutor tidak bisa?" kata Guntur bertanya.

Guntur Romli mengaku heran, apakah kejaksaan ini tidak mampu atau memang tidak mau?

"Inilah potret hukum yang diinjak-injak di negeri ini. Rakyat kecil yang mencuri sandal dikejar diburu sampai ke ujung desa, sementara terpidana yang dekat dengan lingkar kekuasaan justru bebas melenggang, berpesta, dan berbagi panggung dengan pejabat," kata Guntur Romli.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Diminta Mundur dari Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad: Saya Ikut Arahan Prabowo

Oleh Redaksi · 17 Nov, 09.08 WIB



BANDA ACEH – Raffi Ahmad belum mau berspekulasi mengenai desakan publik agar dirinya mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Di tengah polemik kerja sama jasa publikasi dengan sejumlah kementerian, Raffi memilih menyerahkan keputusan terkait posisinya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga meminta masyarakat memberinya kesempatan untuk membuktikan tanggung jawabnya dalam menjalankan amanah tersebut.

Raffi mengaku desakan untuk mundur bukan kali pertama muncul setiap dirinya menghadapi polemik.

Namun, ia menyadari jabatan yang diembannya merupakan amanah yang bersifat sementara.

"Iya ini sudah sekian kalinya setiap kali ada gonjang-ganjing, setiap ada masalah, pasti arahnya ke situ (minta mundur)," ucap Raffi Ahmad di kawasan Wijaya, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).

"Ya yang pertama, yang namanya amanah dan jabatan, saya tahu ini semua hanya sementara," kata Raffi.

Suami Nagita Slavina itu memahami bahwa posisi sebagai Utusan Khusus Presiden bukan pekerjaan yang mudah.

Meski demikian, ia mengaku berusaha menjalankan tanggung jawab sesuai sumpah yang diucapkan saat dilantik.

"Menjadi posisi saya juga bukan posisi yang gampang. Tapi saya berusaha sekuat tenaga, segenap janji, sumpah saya saat saya dilantik, saya akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat dan bangsa," tutur Raffi.

"Dan saya akan bertanggung jawab sebaik-baiknya," ujarnya.

Raffi pun meminta masyarakat memberinya kesempatan untuk terus membuktikan kemampuannya dalam mengemban jabatan tersebut.

Ia kembali menegaskan bahwa keputusan terkait kelanjutan posisinya akan mengikuti arahan Presiden Prabowo.

"Kalau untuk masalah ini saya pasti akan ikut arahan Pak Presiden bagaimana baiknya," beber Raffi.

"Tapi berilah saya kesempatan karena menjadi di sini tidak mudah. Saya juga terus belajar, belajar, dan belajar," ucapnya

ACEH

Bupati Muharram: SPAM Regional Jadi Solusi Perluasan Layanan Air Bersih Aceh Besar

Oleh Redaksi · 16 Nov, 17.49 WIB

ACEH BESAR – Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengajak masyarakat khususnya warga Kecamatan Leupung yang lahannya masuk dalam rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Aceh Besar- untuk mendukung program strategis tersebut demi memperluas pelayanan air bersih bagi masyarakat.

Ajakan itu disampaikan Muharram dalam musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian pengadaan tanah pembangunan SPAM Regional Aceh Besar- di Aula Gedung UDKP Kecamatan Leupung, Senin (16/11/2026).

Muharram mengatakan, hingga saat ini pelayanan air bersih kepada masyarakat Aceh Besar belum terpenuhi secara maksimal. Berdasarkan data yang disampaikannya, pelayanan Perumdam Tirta Mountala baru menjangkau sekitar 40 persen dari total penduduk Aceh Besar.

“Pelayanan air bersih kepada seluruh masyarakat Aceh Besar belum terpenuhi dengan maksimal. Hari ini kita mencatat Perumdam Tirta Mountala baru mencapai sekitar 40 persen dari jumlah penduduk Aceh Besar yang mendapatkan layanan air bersih,” ungkapnya.

Menurut Muharram, Aceh Besar memiliki potensi sumber daya air yang besar, mulai dari sungai hingga kawasan hulu yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Karena itu, pembangunan SPAM Regional menjadi kesempatan penting yang harus dimanfaatkan bersama. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat infrastruktur penyediaan air minum sekaligus memperluas jangkauan pelayanan bagi masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar.

“Ini adalah kesempatan bagi kita. Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran untuk program SPAM Regional. Ini merupakan investasi untuk masa depan dengan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Karena itu, saya meminta seluruh jajaran pemerintah kabupaten agar lebih fokus dan jangan sampai kesempatan ini terlewatkan,” tegasnya.

Muharram mengungkapkan, rencana pembangunan tersebut telah berlangsung cukup lama. Bahkan, anggaran pembebasan tanah disebut telah dialokasikan sejak beberapa tahun lalu, tetapi belum terealisasi. Itu sebabnya, ia berharap melalui koordinasi dan keseriusan seluruh pihak, proses pengadaan tanah dapat diselesaikan pada tahun ini sehingga tahapan pembangunan berikutnya dapat segera berjalan.

Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi dan saling menghargai antara pemerintah dengan masyarakat pemilik lahan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

TOKOH

Rekam Jejak Pekerjaan Dasco, Sudah Jadi Direktur di Usia 22 Tahun

Oleh Redaksi · 16 Nov, 20.15 WIB

BANDA ACEH -Tokoh yang disebut menjadi calon kuat Wakil Presiden RI Sufmi Dasco Ahmad ternyata sudah menjadi direktur sebuah perusahaan perseroan terbuka dari usia 22 tahun.

Rekam jejak pekerjaan Dasco sedari muda itu dimuat situs resmi DPR RI.

Diketahui nama Dasco mencuat disebut mengisi kursi Wakil Presiden (Wapres) RI yang kosong usai ditinggal Gibran Rakabuming Raka.

Sejumlah elemen masyarakat hingga Politisi mendukung nama Dasco untuk diajukan Presiden RI Prabowo Subianto ke MPR RI sebagai Wakil Presiden RI.

Profil Dasco pun membuat publik penasaran karena sebelum tahun 2024, Politisi Partai Gerindra itu tidak terlalu mencolok.

Rekam jejak Dasco di awal karirnya ternyata bukan di bidang Politik.

Dasco mengaku pernah menjadi Direktur di PT Randika Dwa Perkasa di usia 22 tahun tepatnya dari tahun 1989 hingga 2007.

Meski tahun 2007 perusahaan tersebut masih ada, namun belum diketahui PT Randika Dwa Perkasa perusahaan di bidang apa dan milik siapa.

Tidak ada satu pun informasi resmi mengenai perusahaan tersebut dan hanya memuat bahwa perusahaan itu adalah perusahaan yang pernah dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Namun Dasco sudah menjadi Direktur saat Politisi Partai Gerindra itu masih menjadi mahasiswa di Universitas Pancasila Fakultas Elektro.

Sebab pria kelahiran Bandung 7 Oktober 1967 itu memulai kuliah tahun 1985 hingga 1993.

Kemudian Dasco melanjutkan karir ke bidang hukum yakni sebagai Senior Partners di Vendetta Law Firm dari tahun 2005 - 2013.

Lalu dia melanjutkan karir di PT Omerta Cipta Securita sebagai Direktur dari 2007 hingga 2010.

Dasco juga tercatat di waktu bersamaan menjadi Direktur Utama di PT Pasopati Indorisk dari tahun 2010 hingga 2014 dan Direktur Pusat Kajian Sengketa Pemilu dari tahun 2011 hingga 2014.

Dasco memulai karir di DPR RI pada tahun 2014 hingga saat ini.

Berikut Rekam Jejak Pekerjaan Dasco

Wakil Ketua DPR RI 2019 – 2024

Anggota DPR RI 2014 – 2019

Pusat Kajian Sengketa Pemilu, Sebagai: Direktur. Tahun: 2011 – 2014

Vendetta Law Firm, Sebagai: Senior Partner. Tahun: 2005 – 2013

PT Randika Dwa Perkasa, Sebagai: Direktur. Tahun: 1989 – 2007

Tanggapan Dasco

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bereaksi usai namanya masuk ke dalam bursa calon wakil presiden …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Direktur ABC Riset & Consulting: Prabowo Kepincut Pramono Anung Jadi Wapres

Oleh Redaksi · 17 Nov, 08.34 WIB



BANDA ACEH -Posisi Wapres berada dalam kekosongan pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada Kamis 12 November 2026.

Sebagai tindak lanjut terhadap kekosongan tersebut, MPR akan menyelenggarakan Sidang Paripurna pada Rabu 9 Desember 2026 untuk memilih satu dari dua calon Wapres yang diajukan Presiden Prabowo Subianto. Wapres terpilih juga akan dilantik pada kesempatan yang sama.

Bursa Cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai mengerucut kepada sejumlah nama dari internal Partai Gerindra.

Menanggapi hal tersebut, Direktur ABC Riset & Consulting Erizal menilai, sebenarnya Presiden Prabowo Subianto kepincut dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

"Tapi sayangnya Pramono Anung ini orangnya ribet," kata Erizal, dikutip Selasa 16 November 2026.

Maksudnya, kata Erizal, belum tentu Pramono mau menjadi Wapres pendamping Prabowo hingga 2029.

"Tapi kalau mau pun, PDIP belum tentu pula merelakan. PDIP malah maunya Puan Maharani yang diambil Presiden Prabowo sebagai Wapresnya," kata Erizal.

Bukan cuma itu, lanjut Erizal, belum tentu pula, partai koalisi pemerintah seperti Demokrat, Golkar, PAN, dan Gerindra sendiri mau menerima.

"Kalau Pramono Anung mungkin mau (diterima partai koalisi pemerintah), tapi bagaimana kalau Puan Maharani," kata Erizal.

Makanya, muncul dukungan dari Golkar dan PAN agar Presiden Prabowo menunjuk kader Gerindra saja sebagai Wapres pengganti Gibran.

"Kenapa? Daripada lepas ke PDIP, lebih baik untuk diri kita sendiri saja. Kira-kira begitulah. Koalisi dengan PDIP itu memang tidak mudah pula. Pilpres 2024 pun, betapa sulitnya Prabowo bertemu dengan Megawati," pungkas Erizal.

NASIONAL

Penunjukan Luhut Jadi Wapres Pengganti Gibran Dinilai Bisa Jadi Kesalahan Fatal Prabowo

Oleh Redaksi · 17 Nov, 10.38 WIB



BANDA ACEH - Pegiat media sosial Bachrum Achmadi menyoroti nama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang menguat sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.Bachrum menilai penunjukan Luhut sebagai wapres akan menjadi salah satu kesalahan fatal yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengingatkan bahwa Luhut pernah memojokkan Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019, ketika Prabowo berhadapan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Klo ini benar, satu lagi kesalahan fatal Presiden Prabowo. Kita semua tahu saat pilpres 2014 & 2019 LBP itu selalu memojokkan Prabowo. Cc: @Gerindra," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Senin (16/11).

Sebagai informasi, nama Luhut mencuat karena posisinya yang strategis di pemerintahan saat ini sebagai Ketua DEN serta kedekatannya dengan Presiden Prabowo.

Pengalamannya sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Kepala Staf Kepresidenan, serta purnawirawan jenderal dinilai sejumlah kalangan dapat membantu menjaga stabilitas Politik dan ekonomi hingga akhir masa jabatan pada 2029.

Selain itu, Luhut juga sempat vokal membela Gibran dari isu pemakzulan sesaat sebelum Gibran mengundurkan diri.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya menegaskan bahwa tidak ada ketentuan konstitusi yang mewajibkan calon wakil presiden pengganti berasal dari partai politik. Pernyataan tersebut membuka peluang bagi figur nonpartai atau pejabat negara seperti Luhut untuk diajukan sebagai calon wapres pengganti Gibran.

ACEH

Pemkab Aceh Besar Gelar Musyawarah Penetapan Ganti Rugi Lahan Pembangunan SPAM Regional

Oleh Redaksi · 16 Nov, 16.04 WIB



ACEH BESAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar bersama pihak terkait menggelar musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kota Banda Aceh–Kabupaten Aceh Besar, yang berlangsung di Aula Gedung UDKP, Kecamatan Leupung, Aceh Besar, Senin (16/11/2026).

Musyawarah tersebut dihadiri Bupati Aceh Besar Muharram Idris, didampingi Asisten I Sekdakab Aceh Besar Farhan AP, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar bersama unsur terkait lainnya.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam tahapan pengadaan tanah untuk mendukung pembangunan SPAM Regional yang direncanakan melayani kebutuhan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.

Penetapan bentuk ganti kerugian menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan proses pengadaan tanah berjalan sesuai ketentuan, dengan memperhatikan hak-hak masyarakat yang terdampak pembangunan.

Melalui musyawarah tersebut, diharapkan tercapai kesepahaman antara pemerintah dan pihak yang berhak atas tanah mengenai bentuk ganti kerugian, sehingga tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan dapat berjalan tertib, transparan, dan memberikan kepastian bagi semua pihak.

NASIONAL

Buronan Silfester Bebas Berkeliaran Bahkan Mengundang Wamenaker Meresmikan Restoran Milik Anaknya

Oleh Redaksi · 17 Nov, 08.22 WIB



BANDA ACEH - Meski berstatus buronan namun Silfester Matutina masih bebas berkeliaran. Bahkan ia tertangkap kamera menghadiri acara peresmian restoran atau kafe milik anaknya di Bandung pada pertengahan November 2026 dengan mengundang Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Afriansyah Noor.Tayangan video ini mengundang kontroversi dari publik dan sejumlah politisi yang menyoroti tajam peristiwa ini karena Silfester merupakan terpidana kasus fitnah yang putusan penjaranya belum dieksekusi oleh Kejaksaan selama kurang lebih tujuh tahun

Hebatnya meski belum juga ditangkap, Silfester Matutina bahkan mampu mengundang Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor terlihat menghadiri acara pembukaan sebuah restoran di Bandung.

Dalam video yang dilihat pada Senin (16/11/26) tersebut tampak sosok yang diduga Silfester Matutina, yang disebut sebagai pemilik restoran tersebut melalui anaknya.

“Teman saya Silfer, beliau mengundang saya pada hari ini bersama kami dari Kementerian ada Pak Alfi, ada Pak Iwan, Pak Dani,” kata Afriansyah Noor.

Wamenaker Afriansyah Noor juga mengungkapkan kalau ia diundang langsung Silfester Matutina untuk meresmikan restoran milik anaknya dengan nama Neng Geulis.

Silfester Matutina merupakan terpidana kasus fitnah terhadap Jusuf Kalla berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2019. Ia dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, tetapi hingga saat ini putusan tersebut belum dilaksanakan.

Kehadiran Afriansyah dalam acara tersebut menjadi sorotan karena putusan hukum terhadap Silfester belum juga dieksekusi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

7 BERITA

ACEH

BBPOM Aceh dan PPMHKP Perkuat Pengawasan Pangan Ikan untuk Program MBG

Oleh Redaksi · 17 Nov, 17.59 WIB



BANDA ACEH – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) bersama Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Banda Aceh memperkuat kolaborasi dalam menjamin mutu dan keamanan pangan asal ikan guna mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berkualitas di Provinsi Aceh.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan Asal Ikan yang berlangsung pada Senin (16/11/2026) dan diikuti oleh seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Aceh Besar.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahan pangan yang digunakan dalam penyelenggaraan MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga terjamin mutu dan keamanannya. Terlebih, ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi masyarakat dan menjadi pilihan bahan pangan bergizi bagi penerima manfaat program, khususnya anak-anak.

Hadir sebagai narasumber, Ketua Tim Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) BBPOM Aceh, Suryani Fauzi, menyampaikan bahwa ikan memiliki kandungan protein berkualitas dan kaya akan asam lemak Omega-3 yang bermanfaat bagi kesehatan. Namun, karakteristik ikan yang mudah mengalami penurunan mutu menjadikan penanganan dan penyimpanannya harus mendapat perhatian khusus.

Beberapa potensi bahaya yang perlu diwaspadai antara lain pembentukan histamin, cemaran bakteri patogen, penggunaan bahan berbahaya, serta kontaminasi yang dapat terjadi selama proses penanganan dan pengolahan.

Menurut Suryani, keamanan pangan merupakan aspek mendasar dalam pelaksanaan MBG karena makanan yang disiapkan oleh SPPG akan dikonsumsi oleh banyak penerima manfaat. Oleh karena itu, kualitas gizi harus berjalan beriringan dengan jaminan keamanan pangan.

“Keamanan pangan bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan persyaratan utama. Makanan yang bergizi tinggi, tetapi tidak aman, bukanlah makanan yang bergizi,” tegas Suryani.

Ia mengingatkan bahwa pengendalian keamanan pangan harus dilakukan sejak bahan baku dipilih hingga makanan disajikan kepada penerima manfaat. Pengelola SPPG perlu memastikan pemasok memenuhi persyaratan, menerapkan rantai dingin (cold chain) untuk menjaga kesegaran ikan, melaksanakan praktik pengolahan pangan yang baik, serta melakukan pencatatan dan penyimpanan sampel makanan sebagai bagian dari pengendalian keamanan pangan.

BBPOM Aceh juga membuka ruang kolaborasi melalui pendampingan, konsultasi, edukasi, dan dukungan pengujian sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian, pengelola SPPG memiliki akses terhadap pembinaan dan informasi yang diperlukan untuk menjaga keamanan pangan secara …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

UIN Ar-Raniry Dorong Manuskrip Jadi Sumber Pengembangan Ilmu dan Peradaban Islam

Oleh Redaksi · 16 Nov, 18.00 WIB

BANDA ACEH – Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh mendorong penguatan penelitian dan pengembangan manuskrip kuno sebagai sumber ilmu pengetahuan sekaligus rekam jejak peradaban Islam di Nusantara.

Hal tersebut disampaikan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Prof Mujiburrahman saat membuka Festival Naskah Nusantara 2026 bertema “Jejak Ulama dan Jaringan Keilmuan dalam Manuskrip” di Mini Teater Museum, Gedung LP2M UIN Ar-Raniry, Senin (16/11/2026).

Mujiburrahman mengatakan manuskrip merupakan bukti penting sejarah dan kebesaran peradaban Aceh. Naskah kuno tidak hanya merekam perjalanan kerajaan dan kebudayaan, tetapi juga menyimpan jejak ulama, tradisi intelektual, serta jaringan keilmuan Islam yang menghubungkan Aceh dengan berbagai kawasan dunia.

“Ketika orang bertanya tentang bukti bahwa Aceh pernah menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara, hari ini bukti fisik yang masih dapat kita tunjukkan antara lain manuskrip dan batu nisan,” kata Mujiburrahman.

Ia mengungkapkan manuskrip Aceh tersebar di sejumlah negara, antara lain Malaysia, Belanda, Inggris, Turki, dan Filipina. Salah satu naskah yang ditemukannya dalam forum akademik di Sophia University, Jepang, bahkan mencantumkan keterangan bahwa naskah tersebut disalin oleh seorang putra raja asal Aceh.

Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan luasnya hubungan intelektual Aceh dengan dunia luar. Karena itu, pelestarian manuskrip tidak cukup dilakukan melalui konservasi, restorasi, dan digitalisasi, tetapi harus dilanjutkan dengan penelitian, pengkajian, serta pengembangan pengetahuan yang bersumber dari naskah.

“Pelestarian manuskrip tidak boleh berhenti pada restorasi dan digitalisasi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Wali Kota Sabang Sampaikan Rancangan Qanun APBK 2027 dalam Rapat Paripurna DPRK

Oleh Redaksi · 17 Nov, 18.16 WIB



SABANG – Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, menyampaikan Rancangan Qanun Kota Sabang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Sabang Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna Ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama DPRK Sabang, Selasa (17/11/2026).

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRK Sabang Magdalaina, unsur pimpinan dan anggota DPRK Sabang, para staf ahli, asisten, kepala OPD, kepala sekretariat lembaga keistimewaan, camat, serta para kepala bagian di lingkungan Setda Kota Sabang.

Dalam pidato pengantarnya, Zulkifli menyampaikan bahwa penyusunan Rancangan Qanun APBK 2027 telah melalui sejumlah tahapan perencanaan dan kesepakatan antara Pemerintah Kota Sabang dan DPRK Sabang, termasuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Ia menegaskan bahwa pembahasan rancangan qanun tersebut membutuhkan keseriusan dan kerja sama seluruh pihak agar dapat menghasilkan kesepahaman antara eksekutif dan legislatif.

Zulkifli berharap berbagai program dan kegiatan yang direncanakan dapat mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Harapan kami, seluruh kepala SKPK beserta jajarannya dan Tim Anggaran Pemerintah Kota Sabang dapat fokus mengikuti agenda pembahasan bersama DPRK sebagaimana yang telah ditetapkan, sehingga tercapai kesepahaman antara pihak eksekutif dan legislatif demi terlaksananya apa yang telah kita rencanakan bersama,” tambahnya.

Melalui pembahasan tersebut, Pemerintah Kota Sabang berharap Rancangan Qanun APBK Tahun Anggaran 2027 dapat dibahas secara optimal dengan memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah serta kepentingan masyarakat Kota Sabang.[]

ACEH

Ikut Apel Gelar Pasukan, Wabup Dukung Operasi Zebra Seulawah 2026 di Aceh Besar

Oleh Redaksi · 16 Nov, 17.04 WIB

ACEH BESAR – Wakil Bupati (Wabup) Aceh Besar Syukri A Jalil menyatakan dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar terhadap pelaksanaan Operasi Zebra Seulawah 2026 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026 yang dinilai sangat penting untuk meningkatkan disiplin pengendara dan menekan angka kecelakaan lalu lintas.

“Kita dari Pemkab Aceh Besar tentu saja mendukung pelaksanaan operasi ini, karena memang keselamatan di jalan raya harus menjadi perhatian semua pengguna jalan,” ujarnya, disela mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Seulawah 2026 di Lapangan Apel Mapolres Aceh Besar, Kota Jantho, Senin (16/11/2026).

Apel gelar pasukan tersebut, dipimpin langsung oleh Kapolres Aceh Besar AKBP Chairul Ikhsan dan dihadiri unsur Forkopimda serta personel gabungan TNI, Polri, Dinas Perhubungan, BPBD, Satpol PP dan pelajar.

Pada kesempatan itu, Syukri mengatakan, kesadaran berlalu lintas tidak cukup hanya dibangun melalui penindakan, tetapi harus tumbuh dari kepatuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Pengendara harus mematuhi rambu lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan dan memastikan kendaraannya memenuhi ketentuan. Jangan sampai kelalaian di jalan raya menyebabkan kecelakaan,” katanya.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak menganggap aturan lalu lintas sekadar kewajiban saat ada operasi kepolisian, tetapi menjadikannya sebagai kebiasaan demi mencegah kecelakaan dan melindungi keselamatan sesama pengguna jalan.

Sementara itu, dalam amanat Kapolda Aceh yang dibacakan Kapolres Aceh Besar, disebutkan bahwa Operasi Zebra Seulawah 2026 merupakan upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Buka Musda VI MPU, Wawako Sabang Ajak Perkuat Sinergi Ulama dan Pemerintah

Oleh Redaksi · 17 Nov, 16.58 WIB



SABANG – Wakil Wali Kota Sabang, Suradji Junus, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara ulama dan umara dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Suradji saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) VI Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Sabang Tahun 2026, yang turut dihadiri Wakil Ketua III MPU Aceh, Tgk. Muhammad Hatta, unsur Forkopimda serta sejumlah undangan lainnya, di Aula Pulau Weh, Kantor Wali Kota Sabang, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, MPU memiliki kedudukan strategis sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pertimbangan, nasihat, dan masukan terhadap berbagai kebijakan daerah agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik dan ekonomi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariat Islam.

"Ulama dan umara harus berjalan seiring, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Karena itu, komunikasi dan koordinasi harus terus terjaga, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan dengan baik serta tetap memperhatikan nilai-nilai syariat Islam," kata Suradji.

Ia juga menyoroti pentingnya peran MPU dalam memberikan masukan dan pertimbangan terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan di Kota Sabang, khususnya sektor pariwisata dan olahraga, agar tetap memperhatikan ketentuan syariat Islam.

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Aceh, Sabang diharapkan mampu menerapkan kearifan lokal yang menjunjung nilai-nilai keislaman, sekaligus memastikan penyelenggaraan kegiatan olahraga tetap memperhatikan norma dan ketentuan syariat.

"Sabang merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Aceh. Karena itu, kita berharap setiap kegiatan pariwisata maupun olahraga tetap memperhatikan ketentuan syariat Islam. Di sinilah peran MPU untuk memberikan masukan dan mengingatkan pemerintah, sehingga penerapan syariat Islam dapat berjalan secara menyeluruh," tegas Suradji.

Sementara itu, Wakil Ketua III MPU Aceh, Tgk. Muhammad Hatta, dalam arahannya menekankan bahwa ulama yang tergabung dalam lembaga MPU memiliki peran penting sebagai mitra sejajar pemerintah dalam mengawal kebijakan daerah. Keberadaan MPU yang memiliki landasan hukum melalui peraturan perundang-undangan dan qanun kekhususan Aceh diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memastikan kebijakan pemerintahan dan pembangunan tetap berpedoman pada nilai-nilai syariat Islam.

"Maka di sinilah peran ulama sangat penting dan kami sangat mengharapkan kepada Bapak Wakil Wali Kota dan semua jajarannya agar bisa terus menjadikan MPU Kota Sabang khususnya sebagai mitra dalam berkomunikasi dan tentunya dalam mengambil ide-ide untuk melahirkan kebijakan-kebijakan di dalam menjalankan pemerintahan di Kota Sabang secara khusus," ujarnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Cegah Pergeseran Tradisi, Pemkab Aceh Barat Perkuat Aturan Adat Perkawinan

Oleh Biro Meulaboh · 17 Nov, 15.50 WIB



Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Aceh Barat, Ruswaidi, S.STP., M.Si,FOTO/ist

MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyosialisasikan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Upacara Adat Perkawinan guna menjaga keaslian tradisi serta memastikan setiap prosesi perkawinan berjalan sesuai ketentuan adat Aceh.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Ruswaidi, S.STP., M.Si., di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat, Selasa (17/11/26).

Dalam sambutannya, Ruswaidi mengatakan adat perkawinan merupakan bagian penting dari identitas dan warisan budaya masyarakat Aceh Barat. Di dalamnya terkandung nilai kekeluargaan, kebersamaan, tata krama, serta penghormatan terhadap tradisi leluhur.

Menurutnya, Perbup Nomor 24 Tahun 2026 hadir sebagai pedoman agar pelaksanaan adat perkawinan tidak menyimpang dari ketentuan yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Ia mencontohkan adanya praktik dalam prosesi pertunangan yang perlu diluruskan, seperti pemasangan cincin yang dilakukan langsung oleh calon mempelai pria (linto).

"Melalui peraturan ini, kita ingin setiap prosesi adat dilaksanakan sesuai tata cara dan ketentuan adat Aceh. Jangan sampai terjadi pergeseran yang menghilangkan nilai-nilai tradisi," ujarnya.

Ruswaidi juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perkawinan, termasuk pembawa acara (MC), penyedia pelaminan, dan jasa katering, memahami serta mendukung pelestarian adat perkawinan khas Aceh Barat.

Ia berharap sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus menjadi momentum untuk memperbaiki praktik adat yang selama ini belum sesuai dengan ketentuan.

"Peraturan bupati ini harus menjadi acuan bersama agar ada keselarasan antara adat yang diterapkan keluarga, prosesi yang dipandu MC, dan seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan perkawinan," katanya.

Ruswaidi menegaskan, pelestarian adat perkawinan juga harus tetap berlandaskan nilai-nilai syariat Islam. Karena itu, ia meminta informasi mengenai Perbup tersebut terus disebarluaskan agar dapat dipahami dan diterapkan oleh masyarakat Aceh Barat.[]

Editorial: Biro Meulaboh.

SPORT

Jeda Internasional November: Mengapa Statistik Klub Sering Menipu

Oleh Redaksi · 16 Nov, 18.48 WIB

Jeda internasional November dapat mengubah konteks statistik klub. Pelajari cara membaca performa, menit bermain, perjalanan, dan risiko sampel kecil.

Jadwal sepak bola domestik berhenti sejenak pada November, tetapi pekerjaan para pemain tidak ikut berhenti. Dalam kalender 2026/27, jendela pertandingan internasional putra berlangsung pada 9–17 November. Premier League, misalnya, kembali bergulir pada Sabtu, 21 November setelah jeda tersebut. Di antara dua tanggal itu, sejumlah pemain menjalani laga bersama tim nasional, sementara rekan setimnya tetap berada di klub untuk berlatih dan memulihkan kondisi.

Perbedaan kecil di balik satu jeda ini dapat mengubah cara kita membaca angka. Catatan gol, kebobolan, penguasaan bola, atau kemenangan sebuah klub sebelum November sering tampak seperti gambaran yang stabil. Padahal, setelah jeda, susunan pemain, beban perjalanan, ritme kompetisi, bahkan tingkat kebugaran bisa bergeser. Angka musim yang terlihat rapi di tabel tidak selalu menjelaskan keadaan tim yang akan turun pada pekan berikutnya.

Jendela internasional adalah periode yang ditetapkan dalam kalender FIFA agar pemain yang dipanggil dapat bergabung dengan tim nasional. Kalender putra 2025–2030 menetapkan jendela November selama sembilan hari, dengan batas maksimal dua pertandingan bagi tiap tim nasional. Pada musim 2026/27, kompetisi yang dimainkan berbeda menurut konfederasi: negara-negara Eropa menjalani UEFA Nations League, sejumlah negara Afrika bermain di kualifikasi Piala Afrika, sementara beberapa tim dari kawasan lain dapat menggelar pertandingan persahabatan.

Bagi penonton, jeda itu bisa terasa seperti masa tenang. Bagi klub, ia justru menjadi periode dengan banyak skenario yang tidak seragam. Pemain yang tidak dipanggil mungkin berlatih dengan beban terukur di pusat latihan. Pemain yang membela negaranya dapat menghadapi dua laga, perubahan zona waktu, perjalanan jarak jauh, serta jadwal pemulihan yang sempit. Ada pula pemain yang berangkat tetapi tidak mendapat menit bermain, sehingga beban pertandingannya berbeda dari rekan yang tampil penuh.

Inilah alasan pertama statistik klub sebelum jeda perlu dibaca dengan hati-hati: angka itu lahir dari kelompok pemain dan kondisi yang mungkin tidak sama dengan keadaan saat kompetisi kembali. Rata-rata gol per pertandingan, misalnya, tidak memberitahu apakah pencetak gol utama tersedia pada laga berikutnya, berapa lama ia bermain untuk negaranya, atau apakah rekan yang biasanya mengirim umpan kunci sedang absen.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

SMSI Aceh Besar Beri Anugerah Kontribusi Ekonomi Daerah kepada Bank Aceh Jantho

Oleh Redaksi · 16 Nov, 16.58 WIB

ACEH BESAR – Bank Aceh Syariah Cabang Jantho menerima penghargaan SMSI Aceh Besar Awards 2026 kategori Anugerah Kontribusi Ekonomi Daerah atas kontribusinya dalam mendukung penguatan ekonomi dan pelayanan perbankan bagi masyarakat Kabupaten Aceh Besar.

Penghargaan tersebut diterima Novarizal, Pimpinan Capem Bank Aceh Lampeneurut, yang mewakili Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Jantho, Mursal. Penyerahan dilakukan Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Aceh, Aldin NL, didampingi Wakil Bendahara SMSI Kabupaten Aceh Besar, Nazarullah, SE, di Ballroom The Pade Hotel, Sabtu (14/11/2026).

Ketua SMSI Provinsi Aceh, Aldin NL, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap lembaga dan mitra strategis yang telah memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

"Perbankan memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Kami berharap Bank Aceh terus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, memperluas akses keuangan, serta mendukung pertumbuhan usaha masyarakat, khususnya di Aceh Besar," ujar Aldin.

Menurutnya, kolaborasi antara lembaga keuangan dan berbagai elemen masyarakat diperlukan untuk memperkuat perekonomian daerah. Karena itu, dukungan dan kemitraan berbagai pihak perlu terus dirawat agar memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Kasdam IM Pimpin Upacara Sertijab dan Tradisi Satuan Pejabat Kodam Iskandar Muda

Oleh Redaksi · 17 Nov, 16.24 WIB



BANDA ACEH – Kepala Staf Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Kasdam IM) Brigjen TNI Ali Imran mewakili Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan Tradisi Satuan Pejabat Kodam Iskandar Muda yang berlangsung di Gedung Malahayati, Makodam Iskandar Muda, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi TNI AD sekaligus proses pembinaan personel guna menjaga kesinambungan kepemimpinan, mengembangkan kemampuan prajurit, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas di lingkungan Kodam Iskandar Muda.

Dalam sambutan Pangdam IM yang dibacakan Kasdam IM, Pangdam menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bergabung kepada Kolonel Inf Adi Aradi, S.Pd., M.Pd., yang dipercaya menjabat sebagai Pamen Ahli Bidang Jemen Sishanneg Sahli Pangdam IM, serta Letkol Arm Nurul Arizain, S.E., M.Tr.Mil., sebagai Danyonarmed 17/RC Kodam IM.

Pangdam berharap, pengalaman, kemampuan, dan dedikasi yang dimiliki para pejabat baru dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan organisasi serta mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas Kodam Iskandar Muda.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam IM juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Letkol Arm Denapoleon Jayakarta, S.Sos., M.H.I., atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama menjabat sebagai Danyonarmed 17/RC. Selanjutnya, Pangdam mengucapkan selamat atas amanah baru yang dipercayakan kepadanya sebagai Dandim 0108/Aceh Tenggara Korem 011/Lilawangsa.

Pangdam menegaskan bahwa setiap pergantian jabatan merupakan momentum untuk menghadirkan semangat, pengalaman, dan gagasan baru bagi organisasi. Oleh karena itu, pejabat yang baru diharapkan segera beradaptasi, memahami karakteristik satuan, mengenali tugas dan tanggung jawab, serta membangun komunikasi dan kerja sama yang solid.

Selain itu, para pejabat baru diharapkan dapat melanjutkan berbagai program positif yang telah dirintis pejabat sebelumnya sekaligus melakukan penyempurnaan secara terukur guna meningkatkan kinerja dan profesionalisme satuan.

Khusus kepada pejabat yang mendapat penugasan di wilayah teritorial, Pangdam juga menekankan pentingnya membina satuan, menjaga kondusivitas wilayah, serta memperkuat kedekatan dan kemanunggalan TNI dengan rakyat sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Pangdam IM juga menyampaikan ucapan selamat bergabung kepada para istri pejabat baru dalam keluarga besar Persit Kartika Chandra Kirana PD Iskandar Muda. Pangdam berharap dukungan dan pendampingan keluarga senantiasa menjadi kekuatan bagi para prajurit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengabdian.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Pendaftaran Fun Walk Banda Aceh Heritage Dibuka, Hadiah Utama Sepeda Motor

Oleh Redaksi · 17 Nov, 11.58 WIB



BANDA ACEH – Pendaftaran peserta Banda Aceh Fun Walk bertema Banda Aceh Heritage resmi dibuka mulai 16 – 20 November 2026. Kegiatan jalan santai yang digagas Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah ini menyediakan hadiah utama satu unit sepeda motor bagi peserta.

Banda Aceh Fun Walk akan digelar pada Minggu (22/11/2026) pagi dengan titik start dan finis di Taman Bustanussalatin atau Taman Sari, Banda Aceh. Kegiatan ini merupakan gagasan Irwansyah yang kemudian diadvokasi dan difasilitasi penyelenggaraannya melalui Dinas Pariwisata Kota bekerja sama dengan Harian Serambi Indonesia.

Irwansyah mengatakan kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi ajang olahraga, tetapi juga ruang kebersamaan bagi masyarakat untuk menjaga kesehatan, mempererat silaturahmi, sekaligus menikmati suasana kota.

"Kita akan jalan santai bersama, bersilaturahmi, menikmati suasana kota, dan yang paling penting, pulangnya bisa membawa doorprize. Hadiah utamanya nanti sepeda motor yang keren," ujarnya, Senin (16/11/2026).

Menurut Irwansyah, jalan santai sebenarnya pernah menjadi agenda olahraga massal yang rutin dilaksanakan di Banda Aceh. Namun, kegiatan tersebut sempat terhenti saat pandemi Covid-19 dan hingga kini belum kembali terlaksana secara konsisten.

Karena itu, ia ingin menghidupkan kembali tradisi olahraga bersama yang dapat diikuti seluruh lapisan masyarakat, mulai dari berbagai kelompok usia hingga komunitas, tanpa membutuhkan perlengkapan olahraga khusus.

Tahun ini, kegiatan tersebut mengangkat tema Banda Aceh Heritage untuk memperkenalkan kembali kekayaan sejarah dan situs peninggalan peradaban yang berada di jantung ibu kota Provinsi Aceh.

Banda Aceh yang dahulu dikenal dengan nama Kutaraja merupakan kota tua berusia 821 tahun. Jejak sejarah masa lalu masih dapat ditemukan melalui berbagai bangunan dan situs bersejarah yang tersebar di kawasan pusat kota.

Melalui kegiatan ini, peserta akan diajak menyusuri sejumlah lokasi bersejarah, di antaranya Pendopo Gubernur, Museum Aceh, makam raja-raja, Taman Putroe Phang, Tugu Menara Air, Masjid Raya Baiturrahman, Museum Tsunami, hingga Taman Bustanussalatin yang saat ini sedang mengalami penataan dan perubahan besar.

Irwansyah mengatakan, mengunjungi langsung situs-situs bersejarah merupakan salah satu cara untuk menjaga ingatan terhadap sejarah dan memperluas wawasan generasi muda.

"Kita melihat situs-situs sejarah ini penting, agar generasi kita terus merawat ingatan dan memperluas wawasan. Sambil bergembira melalui jalan santai, kita juga bisa memperkenalkan warisan sejarah ini kepada anak-anak kita.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

TEKNOLOGI

Cara Membaca Analisis Wajah AI Tanpa Terjebak pada Angka

Oleh Redaksi · 16 Nov, 16.46 WIB

Sebuah layanan analisis wajah dapat menampilkan garis pengukuran, nama bentuk wajah, penjelasan panjang, dan skor dalam satu halaman. Tampilan yang rapi membuat semuanya terlihat seperti satu kesimpulan. Padahal, setiap bagian dihasilkan melalui langkah yang berbeda. Memahami perbedaan ini membantu pengguna menilai apakah hasilnya menjawab pertanyaan yang memang ingin mereka ajukan. Jika tujuannya memilih model rambut, misalnya, perbandingan panjang dan lebar wajah mungkin lebih berguna daripada mengejar skor yang lebih tinggi. Mulailah dari kebutuhan yang konkret, lalu baca cara layanan tersebut menyusun hasilnya.

Alat berbasis titik wajah memperkirakan posisi sejumlah penanda pada foto, seperti sudut mata, dagu, dan garis rahang. Aplikasi kemudian dapat menghitung jarak atau rasio menggunakan titik-titik tersebut. Rasio panjang terhadap lebar menggambarkan hubungan dua jarak yang didefinisikan oleh pembuat alat. Angka itu tetap bergantung pada foto dan ketepatan titik yang terdeteksi. Mengubah rasio menjadi kategori wajah memerlukan aturan tambahan. Mengubahnya menjadi skor estetika memerlukan asumsi lain tentang ciri mana yang dianggap penting. Karena itu, angka dari dua layanan tidak otomatis dapat dibandingkan, meskipun keduanya memakai istilah analisis wajah AI.

Gunakan potret menghadap depan, pencahayaan merata, dan ekspresi santai. Rambut yang menutupi pipi atau rahang dapat mengaburkan kontur. Posisi kepala yang miring dan kamera yang terlalu dekat juga bisa mengubah proporsi yang terlihat. Hindari filter yang membentuk ulang wajah jika ingin memahami foto asli. Bila tersedia, periksa garis pengukuran dan penanda wajah. Apakah titik mengikuti fitur yang benar? Jika tidak, lebih baik memperbaiki foto daripada mengandalkan penjelasan yang tampak meyakinkan. Untuk membandingkan dua foto, pertahankan jarak, sudut, dan cahaya yang serupa.

Sebagai contoh, PSL Scale membedakan alat geometri gratis, laporan AI, dan pratinjau gaya yang dihasilkan dari foto. Penilaian PSL pada halaman utamanya memakai skala 0–8 dengan rentang kategori yang diterbitkan situs tersebut. Skala ini bukan ukuran kecantikan yang tervalidasi secara ilmiah atau peringkat seseorang dalam populasi. Untuk pertanyaan yang lebih sempit, seperti bentuk wajah, detektor bentuk wajah gratis membandingkan empat rasio kontur dengan enam kelompok bentuk. Alat tersebut menampilkan kecocokan terdekat dan pilihan berikutnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Bantuan Ditjen PDSPKP Jadi Stimulan Pemulihan Ekonomi Pengolah Perikanan Pascabencana di Aceh

Oleh Hamdani · 17 Nov, 00.06 WIB



Jajaran Ditjen PDSPKP KKP, DKP Aceh, dan Forikan Aceh berfoto bersama kelompok penerima bantuan dalam kegiatan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan di Aceh

BANDA ACEH – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) menyalurkan Bantuan Pemerintah Tahun 2026 kepada enam kelompok pengolah hasil perikanan dan pemasaran (Poklahsar) di Aceh. Dukungan berupa cool box dan peralatan pengolahan ikan tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pesisir setelah terdampak bencana hidrometeorologi.

Penyerahan bantuan berlangsung di Rumah Ikan Higienis Gedung KKPD DKP Aceh, Senin (16/11/2026), oleh Direktur Jenderal PDSPKP, Prof. Dr. Sc. Agr. Yudi Nurul Ihsan, S.Pi., M.Si., disaksikan Anggota DPR RI Komisi IV, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.S., Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Aceh, Ny. Marlina Usman, serta Asisten II Gubernur Aceh, T. Robby.

Asisten II Gubernur Aceh, T. Robby, menyampaikan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah telah mengganggu aktivitas melaut dan mata pencaharian nelayan. Kerusakan sarana perikanan turut memengaruhi produktivitas serta pendapatan keluarga di kawasan pesisir.

Karena itu, dukungan sarana penanganan dan pengolahan ikan menjadi langkah penting untuk membantu masyarakat kembali menjalankan usaha sekaligus menjaga kelancaran distribusi hasil perikanan.

Direktur Jenderal PDSPKP, Yudi Nurul Ihsan, menjelaskan bantuan tersebut merupakan wujud dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat daya saing sekaligus mendorong percepatan pemulihan usaha masyarakat kelautan dan perikanan di daerah terdampak.

Ia berharap fasilitas yang diberikan dapat menjaga mutu hasil tangkapan, memperkuat ketahanan pangan berbasis sumber daya laut, serta membantu pelaku usaha kembali produktif.

Anggota DPR RI Komisi IV, Rokhmin Dahuri, menyoroti pentingnya ketersediaan sarana rantai dingin (cold chain) dan pengolahan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir menghadapi risiko perubahan iklim.

Menurutnya, fasilitas tersebut memungkinkan hasil tangkapan tetap terjaga kualitasnya ketika kondisi cuaca tidak mendukung aktivitas melaut. Di sisi lain, pengolahan dapat memberikan nilai tambah sehingga nelayan memiliki peluang pendapatan lain di luar penjualan ikan segar.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Safrizal, S.STP., M.Ec.Dev., menyatakan komitmen pihaknya untuk memperkuat pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok penerima, terutama dalam mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang telah disalurkan.

Ia berharap kelompok nelayan tidak hanya mampu memulihkan aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga mengembangkan usaha pengolahan secara kreatif dan inovatif sebagai sumber peningkatan pendapatan keluarga.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

3 BERITA

EKONOMI

Dibalik Efisiensi Uang Negara Malah Lari ke Proyek Influencer Rp14,7 Miliar

Oleh Redaksi · 17 Nov, 13.20 WIB



BANDA ACEH - - Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni,Raffi Ahmad, akhirnya angkat bicara terkait polemik pengadaan jasa pemengaruh atau influencer senilai Rp14,7 miliar di dua kementerian yang dikaitkan dengan perusahaannya, PT Rans Animasi Indonesia.

Raffi mengaku telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2024 mengenai aktivitasnya sebagai pekerja seni yang tetap menerima endorsement dan kerja sama profesional meski telah menjabat sebagai pejabat publik.

Ia juga menyatakan siap menjalani pemeriksaan oleh lembaga pengawas maupun auditor negara terkait kerja sama perusahaan tersebut dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya,” kata Raffi dalam video yang diunggah melalui akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717, Selasa (17/11/2026).

Menurut Raffi, hasil konsultasi saat itu menyatakan aktivitas profesionalnya sebagai pekerja seni yang tetap menerima kerja sama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku,” katanya.

Meski demikian, Raffi mengakui bahwa jabatan kenegaraan yang diembannya melekat dengan aspek etika, kepatutan, dan kepercayaan publik yang harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan.

“Oleh karena itu, saya menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati agar kekeliruan serupa tidak terulang,” ujarnya.

Raffi juga menyatakan kesiapannya untuk diperiksa Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerja sama perusahaannya dengan kedua kementerian tersebut.

Total nilai kerja sama selama periode 2024-2026 mencapai Rp14,7 miliar.

“Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan,” katanya.

Dugaan Korupsi

Sebelumnya, KPK merespons temuan investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa pemengaruh di dua kementerian selama periode 2024-2026 dengan total anggaran mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.

KPK menyatakan tengah mendalami apakah temuan tersebut mengandung unsur tindak pidana korupsi sekaligus memastikan apakah perkara tersebut masuk dalam ranah kewenangan lembaga antirasuah.

"Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat ditemui awak media di Gedung …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Oleh Redaksi · 17 Nov, 18.41 WIB



BANDA ACEH -Polemik terkait wacana relokasi atau pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, makin memanas.

Pengamat kebijakan publik Felix Martuah Purba mengingatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar tidak menjadikan nama maupun kepentingan pihak tertentu sebagai alasan untuk mendorong kebijakan pertambangan yang berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan dan sosial di kawasan Ujung Kulon, Banten.

Felix secara khusus meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengedepankan transparansi dan kehati-hatian dalam menyikapi polemik penetapan wilayah Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di sekitar kawasan tersebut.

Penegasan Felix ini menanggapi Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang ditetapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026. Dalam aturan ini Bahlil memasukkan wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan.

"Bahlil jangan menggunakan badan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo untuk menekan masyarakat menjadikan Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan," kata Felix dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 17 November 2026.

Felix mengingatkan publik agar memahami bahwa Ujung Kulon bukan sekadar hamparan tanah yang bisa dilihat dari sudut pandang investasi dan kepentingan ekonomi.

"Ujung Kulon adalah kawasan konservasi yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, hutan, serta habitat satwa liar yang harus dijaga kelestariannya," kata Felix.

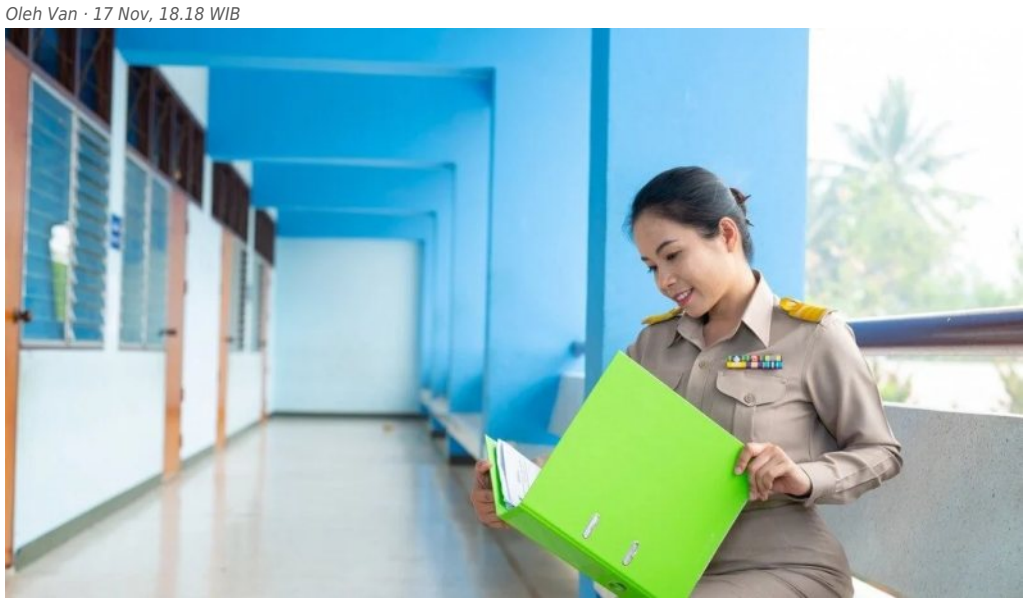
Dari informasi yang diperoleh Felix, Hashim Djojohadikusumo dikenal memiliki perhatian besar terhadap pelestarian satwa dan lingkungan hidup.

Karena itu, kata Felix, jangan sampai nama, kepentingan, ataupun badan usaha yang berkaitan dengan adik kandung Presiden Prabowo Subianto itu justru dipersepsikan sebagai instrumen untuk mendorong kepentingan pertambangan yang berpotensi mengancam ekosistem Ujung Kulon dan merusak kehidupan adat masyarakat Banten

EKONOMI

Kemenkeu Siapkan 1.915 Formasi CPNS 2026, Lulusan SMA Bisa Ikut Daftar!

Oleh Van · 17 Nov, 18.18 WIB



Mempersiapkan materi dengan teliti demi memberikan yang terbaik bagi para siswa.

JAKARTA — Formasi CPNS Kemenkeu 2026 disiapkan sebanyak 1.915 posisi untuk pelamar umum, termasuk lulusan SMA/SMK, D3, dan S1.

Informasi tersebut disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, pada Selasa, 17 November 2026.

Kesempatan rekrutmen ini tidak hanya ditujukan bagi lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), tetapi juga terbuka bagi pelamar dari jalur umum.

Formasi CPNS Kemenkeu 2026 untuk Berbagai Jenjang

Deni menjelaskan bahwa formasi yang disiapkan tersebar di seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan.

Lulusan baru atau fresh graduate juga dapat mengikuti seleksi selama memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan jabatan yang ditentukan.

Jenjang pendidikan yang disebutkan mencakup SMA/SMK, Diploma III (D3), hingga Sarjana (S1).

Dengan demikian, peluang mengikuti rekrutmen Kemenkeu tidak terbatas pada lulusan perguruan tinggi kedinasan.

Meski jumlah formasi telah disampaikan, rincian pembagian posisi berdasarkan jabatan, unit kerja, dan kualifikasi pendidikan belum dipaparkan secara lengkap.

Pendaftaran CPNS Melalui Portal SSCASN

Pendaftaran CPNS secara nasional menggunakan portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang dikelola Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Calon pelamar dapat mengakses portal resmi melalui alamat sscasn.bkn.go.id untuk memperoleh informasi dan mengikuti tahapan pendaftaran sesuai pengumuman resmi.

Sementara itu, informasi khusus mengenai rekrutmen pegawai Kementerian Keuangan dapat dipantau melalui situs rekrutmen.kemenkeu.go.id.

Pelamar perlu memperhatikan pengumuman resmi untuk mengetahui jadwal, persyaratan administrasi, pilihan jabatan, serta dokumen yang harus disiapkan.

Kementerian Keuangan menerapkan prinsip rekrutmen yang transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel dalam proses seleksi pegawainya.

Karena itu, calon peserta sebaiknya tidak mengandalkan informasi dari tautan tidak resmi atau pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. (*)

HIBURAN

3 BERITA

HIBURAN

Beredar Isu Raffi Ahmad Sekeluarga Mau Kabur ke LN Usai Polemik Rp14,69 Miliar

Oleh Redaksi · 17 Nov, 10.42 WIB



BANDA ACEH - Kabar mengejutkan beredar di tengah polemik kontrak kerja sama influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan perusahaan Raffi Ahmad dengan dua kementerian.Presenter sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu diisukan bakal meninggalkan Indonesia bersama keluarganya untuk sementara waktu dan bertolak ke Singapura.

Informasi itu pertama kali ramai diperbincangkan setelah sebuah akun Threads bernama @thoughts.buffered mengunggah kabar yang diklaim berasal dari sumber terpercaya.

"Info A1 katanya si Raffi sekeluarga mau ngungsi ke Singapura," tulis akun tersebut.

Unggahan itu langsung memancing beragam komentar warganet. Sebagian mempertanyakan tanggung jawab Raffi apabila benar-benar berada di luar negeri, mengingat dirinya masih mengemban jabatan di lingkungan pemerintahan.

"Kalau mau ngungsi mundur dulu dari stafsus, enak banget makan gaji buta," balas seorang warganet.

"Nggak presidennya nggak staffsus-nya kabur mulu hobinya jiyaaaaakkkkhhhh," tambah warganet.

Namun, tidak semua pengguna media sosial percaya dengan kabar tersebut. Ada pula yang menilai isu kepergian Raffi ke Singapura hanya rumor belaka.

"Hoax, mana mau & nggak akan berani utk Raffi ninggalin Indonesia," ungkap warganet lainnya.

Hingga kini, kabar mengenai rencana Raffi Ahmad dan keluarganya pindah sementara ke Singapura masih sebatas rumor yang beredar di media sosial. Belum ada konfirmasi resmi dari Raffi maupun pihak keluarga yang membenarkan isu tersebut.

Di tengah rumor itu, Raffi pun telah muncul ke hadapan publik pada Senin (16/11/2026) untuk menyampaikan permintaan maaf terkait kontrak kerja samanya dengan sejumlah kementerian. Ia juga menanggapi desakan agar dirinya mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden.

Raffi mengaku sudah beberapa kali menghadapi desakan serupa setiap kali muncul persoalan yang menyeret namanya.

"Sudah sekian kalinya setiap kali ada gonjang-ganjing, setiap ada masalah, pasti arahnya ke situ. Yang pertama, yang namanya amanah dan jabatan, saya tahu ini semua hanya sementara," kata Raffi Ahmad dalam konferensi pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).

Ia juga mengakui bahwa posisi yang saat ini ditempatinya bukanlah jabatan yang mudah. Meski demikian, Raffi mengaku berusaha menjalankan sumpah dan janji ketika dilantik dengan memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan bangsa.

"Menjadi posisi saya juga bukan posisi yang gampang. Tapi saya berusaha sekuat tenaga, segenap janji, sumpah saya saat saya dilantik, saya akan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

Dihujat Pandji hingga Windah Soal Kontrak Rp 14,69 M dari Pemerintah, Raffi Ahmad Ogah Mundur

Oleh Redaksi · 17 Nov, 13.33 WIB



Raffi Ahmad menyatakan belum ingin mundur dan meminta kesempatan untuk melanjutkan tanggung jawab yang diembannya. Sikap tersebut menjadi sorotan di tengah berbagai perhatian

BANDA ACEH – Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, belum menunjukkan keinginan untuk meninggalkan jabatan yang dipercayakan kepadanya oleh Presiden Prabowo Subianto.

Di tengah gelombang kritik dan desakan mundur akibat sejumlah polemik, Raffi justru meminta publik memberinya kesempatan untuk terus membuktikan diri.

Ia menegaskan akan mengikuti arahan Presiden Prabowo terkait kelanjutan tugasnya di pemerintahan.

Menariknya, Raffi juga menyebut sejumlah figur publik yang selama ini melontarkan kritik terhadap dirinya.

Mulai dari komika Pandji Pragiwaksono, streamer Windah Basudara, Bintang Emon, Jerome Polin, hingga Andovi dan Abdur.

Alih-alih menganggap kritik tersebut sebagai serangan pribadi, Raffi mengaku menerimanya sebagai bentuk perhatian yang harus dijadikan bahan evaluasi.

"Ya yang mengkritik pun saya mengucapkan terima kasih, itu adalah bentuk perhatian meskipun ekspresinya berbeda-beda," ujar Raffi dalam konferensi pers di kawasan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).

Ia bahkan menyampaikan apresiasi secara langsung kepada para figur publik yang telah menyuarakan kritik melalui media sosial.

"Terima kasih buat Mas Pandji, buat Windah Basudara, Andovi, Abdur, Bintang Emon, Jerome Polin, semuanya. Mohon maaf kalau saya enggak bisa sebutkan satu per satu," ujarnya.

Raffi Ahmad Tegaskan Jabatan Utusan Presiden adalah Amanah

Raffi menyadari desakan agar dirinya mundur bukan kali pertama muncul ketika ia terseret polemik.

Namun, suami Nagita Slavina itu menegaskan bahwa jabatan yang diembannya merupakan amanah yang bersifat sementara dan harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

"Iya ini sudah sekian kalinya setiap kali ada gonjang-ganjing, setiap ada masalah, pasti arahnya ke situ (minta mundur)," ucap Raffi.

"Ya yang pertama, yang namanya amanah dan jabatan, saya tahu ini semua hanya sementara," lanjutnya.

Ia mengakui menjalankan tugas sebagai Utusan Khusus Presiden bukan pekerjaan mudah.

HIBURAN

KPK Persilakan Masyarakat Laporkan Dugaan Korupsi Terkait Raffi Ahmad

Oleh Redaksi · 17 Nov, 10.37 WIB



Utusan Presiden Prabowo Subianto, Raffi Ahmad. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan masyarakat melaporkan informasi dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan Raffi Ahmad.

Namun, laporan tersebut harus disertai kecukupan dokumen dan fakta pendukung agar dapat ditelaah lebih lanjut oleh KPK.

Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengatakan, hingga saat ini belum ada kegiatan penindakan yang dilakukan KPK berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat terkait Raffi Ahmad.

"KPK membuka peluang untuk masyarakat melaporkan gitu ya, sejauh memang kecukupan dari dokumen fakta-fakta yang memungkinkan fakta-fakta dokumen itu menjadi bahan telaah yang itu bisa dikatakan masuk kategori sebuah tindak pidana gitu. Jadi silakan, ini masih informasi yang berkembang dari masyarakat tentunya ya, dan belum bisa untuk menyampaikan secara detail," kata Taufik kepada wartawan, Selasa, 17 November 2026.

Taufik menjelaskan, informasi yang belum masuk ke ranah penindakan tidak serta-merta dapat disampaikan oleh pihaknya.

Namun, masyarakat tetap memiliki kesempatan menyampaikan pengaduan melalui unit lain di KPK, termasuk Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

"Tapi ini tentunya kabar gembira buat masyarakat yang memang peduli dalam hal isu-isu yang terkait dengan pemberantasan korupsi," pungkasnya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, dengan total nilai kontrak mencapai Rp14.696.955.002.

Temuan tersebut berdasarkan penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dari delapan paket tersebut, lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar.

Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025-2026 dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar.

ICW menyoroti pengadaan tersebut karena dinilai berpotensi menimbulkan persoalan, mulai dari transparansi dan persaingan dalam proses pengadaan, manfaat penggunaan jasa influencer, hingga dugaan benturan kepentingan.

Sorotan tersebut turut menjadi perhatian lantaran Raffi Ahmad saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

OPINI

5 BERITA

OPINI

Perang Politik Prabowo-Jokowi

Oleh Redaksi · 17 Nov, 20.13 WIB



Gambar ini menampilkan Prabowo Subianto dan Joko Widodo sedang bermain catur dengan bidak-bidak yang melambangkan instrumen negara seperti hukum dan opini publik. Di sekeliling mereka terdapat kutipan strategi perang dari Sun Tzu dan Mao Zedong, sementara rakyat di bagian bawah memprotes bahwa negara bukanlah medan perang politik bagi kepentingan kelompok tertentu.

Oleh: Lukas Luwarso

AO Zedong dalam On Protracted War (1938) bilang: "Politics is war without bloodshed, while war is politics with bloodshed" (Politik adalah perang tanpa pertumpahan darah, sedangkan perang adalah politik dengan pertumpahan darah).

Politik adalah bagaimana meraih kekuasaan, pengaruh, sumber daya, dan legitimasi. Dalam politik, senjata yang digunakan bukan bedil dan meriam, melainkan koalisi, institusi, hukum, dan opini publik.

Relasi Prabowo-Jokowi adalah dua kekuatan politik yang pernah bersekutu, tetapi kini perang kepentingan. Mundurnya Gibran dari kursi wapres dan soal penyadapan adalah babak penting dalam "perang" ini.

Sun Tzu dalam The Art of War, mengemukakan: "Seni perang tertingg adalah menundukkan lawan tanpa harus bertempur".

Dalam politik, kemenangan tidak selalu diperoleh dengan menghancurkan lawan secara terbuka. Cukup dengan mengubah keseimbangan kekuatan, memutus jalur pengaruh, menggeser loyalitas, atau membuat lawan kehilangan relevansinya.

Prabowo tidak harus berkonfrontasi terbuka dengan Jokowi untuk menaklukkan. Sebaliknya, Jokowi juga tidak harus menyatakan permusuhan kepada Prabowo untuk mempertahankan pengaruhnya. Keduanya bisa tetap tersenyum di depan kamera dan publik, sementara kepentingan syahwat politik masing-masing bertabrakan.

Relasi Prabowo-Jokowi sejak awal adalah perkawinan kepentingan (marriage of convenience). Jokowi membutuhkan Prabowo untuk keberlanjutan pengaruh politiknya.

Prabowo memerlukan Jokowi untuk memenangkan Pilpres 2024.

Dalam perkawinan politik transaksi ini, kesetiaan hanya sejauh kesamaan kepentingan. Masalah muncul ketika kepentingan mulai berseberangan.

Prabowo ingin lepas dari kendali Jokowi yang mulai membangun kekuatan sendiri melalui PSI.

Dalam perspektif Sun Tzu, salah satu strategi penting adalah "serang strategi lawan". Gibran adalah strategi Jokowi agar terus punya pengaruh politik. Sebagai instrumen kesinambungan pengaruh Jokowi di pemerintahan Prabowo. Namun, Gibran juga adalah titik rentan kekuatan Jokowi.

Ia didudukkan mendampingi Prabowo, tapi alih-alih menambah kekuatan bargaining, justru memperlemah Jokowi.

Apakah tersingkirnya Gibran bagian operasi politik Prabowo untuk menjatuhkan Jokowi?

Gibran bukan sekadar seorang wapres, ia juga simbol keberlanjutan politik dinasti Jokowi.

Pasti ada yang lebih substantif dari sekadar urusan administratif ijazah SMA yang membelit Gibran, yang membuatnya terpaksa mundur.

Sun Tzu mengajarkan: "Kenali lawan dan kenali diri sendiri".

Dalam perseteruan Prabowo-Jokowi, keduanya memiliki sumber daya yang berbeda.

Prabowo memiliki kekuasaan formal sebagai presiden, aparat pemerintahan, dan kepemimpinan Gerindra. Jokowi memiliki jaringan politik, relawan, loyalis, pengaruh personal.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

Transformasi Bank Aceh, Valuta Asing, dan Paradigma Ekonomi Islam

Oleh Redaksi · 17 Nov, 09.10 WIB



Poster promosi ini menampilkan berbagai elemen ekonomi dan budaya Aceh, termasuk gedung bank, pelabuhan, kopi Gayo, serta Masjid Raya Baiturrahman. Fokus utamanya adalah

Oleh: Prof. Dr. Azharsyah Ibrahim, S.E.Ak., M.S.O.M.((Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.))

ACANA peningkatan status Bank Aceh Syariah menjadi bank devisa sudah lama bergulir, tetapi belum banyak memperoleh perhatian publik. Diskusi-diskusi yang muncul umumnya berfokus pada aspek modal, aset, dan persyaratan regulator. Padahal ada dimensi lain yang tidak kalah penting dan justru menyentuh identitas bank ini, yaitu kesyariahan transaksi yang kelak digunakan.

Dalam sebuah tulisan di Harian Aceh Indonesia, 28 Oktober 2026, Khalil Ismail mengingatkan bahwa transformasi ini merupakan keniscayaan historis sekaligus ekonomi. Pandangan tersebut tentu tidak salah karena memiliki argumentasi yang mendasar.

Namun, di samping melihatnya sebagai kebutuhan ekonomi, kita juga perlu melengkapinya dengan paradigma syariah yang menjadi identitas daerah ini dan menjadi prinsip dasar bank syariah.

Sejak didirikan di tahun 1958, Bank Aceh tidak diposisikan sebagai bank biasa karena ia memiliki peran yang melampaui fungsi intermediasi perbankan. Ia adalah instrumen pembangunan daerah yang diharapkan menjadi lokomotif kesejahteraan masyarakat Aceh. Mandat itu kini berhadapan dengan ironi struktural. Aceh memiliki kopi arabika Gayo yang mendunia, minyak nilam berkualitas ekspor, dan hasil laut yang melimpah. Tetapi bank kebanggaan daerah ini belum memiliki fasilitas devisa sendiri.

Eksportir, importir, dan masyarakat yang membutuhkan layanan internasional terpaksa menyandarkan transaksinya pada bank nasional di luar Aceh. Eksportir kopi di Gayo mengurus letter of credit (L/C) melalui bank di Jakarta atau Medan. Keluarga yang mengirim biaya kuliah anaknya di luar negeri menempuh jalur yang sama. Jemaah haji dan umrah pun demikian. Akibatnya, perputaran uang dari hasil bumi Aceh tidak sepenuhnya mengendap di Aceh.

Kondisi ini memicu pelarian modal secara perlahan. Devisa hasil ekspor masuk ke rekening di luar daerah, lalu baru kembali dalam bentuk pembiayaan yang terbatas.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kondisi tersebut tentu kurang ideal. Karena itu, langkah menuju bank devisa, disamping sebagai bagian dari ekspansi bisnis, ia adalah strategi untuk mengunci likuiditas agar tetap berada di Aceh dan diinvestasikan kembali untuk membiayai usaha mikro, kecil, dan menengah, serta menggerakkan sektor riil.

Persoalannya, ketika bank syariah memasuki ranah valuta asing, yang berubah bukan hanya izin usaha, melainkan cara pandang terhadap uang itu sendiri.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

Taqwallah dan Akal Sehat Birokrasi: Jangan Dipahlawankan, Jangan Dipolitisasi

Oleh Redaksi · 17 Nov, 08.50 WIB



Menyoroti dinamika politik, pesan ini menekankan keadilan bagi sosok Taqwallah.

Oleh: Masry((Pemerhati Sosial & Politik UBA))

ALAM politik Aceh, rupanya ada satu pekerjaan yang tidak pernah selesai meskipun Pilkada sudah usai: menghitung jasa. Ada yang menghitung berapa kali turun ke lapangan, berapa banyak baliho dipasang, berapa banyak massa dikumpulkan, berapa liter bensin dihabiskan, dan berapa malam tidak tidur demi memenangkan pasangan calon.

Semua itu tentu memiliki nilai perjuangan. Tidak ada yang perlu membantah bahwa kemenangan politik tidak lahir dari ruang kosong. Ada tim pemenangan, relawan, simpatisan, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen yang bekerja dengan caranya masing-masing.

Namun, apakah seluruh persoalan pemerintahan harus selalu dikembalikan kepada daftar orang yang berjasa dalam Pilkada?

Di sinilah tulisan Risman Rachman tentang Taqwallah menarik untuk dibaca. Risman tampaknya sedang mengingatkan publik agar tidak terjebak dalam cara berpikir politik yang terlalu sederhana: siapa kawan, siapa lawan, siapa berjasa, dan siapa yang dianggap tidak punya tempat dalam pemerintahan.

Sayangnya, dalam dinamika politik, orang yang mencoba mengemukakan argumentasi profesional terkadang justru ditarik ke arena pertarungan kelompok. Padahal, membicarakan kapasitas seorang birokrat tidak otomatis berarti merendahkan perjuangan tim pemenangan.

Kita perlu memisahkan dua perkara yang sebenarnya berbeda: perjuangan memenangkan Pilkada dan kebutuhan menjalankan pemerintahan.

Keduanya sama-sama penting, tetapi tidak bisa dicampuradukkan secara serampangan.

Risman Rachman dan hak untuk berpikir di luar barisan politik

Ada sesuatu yang perlu diapresiasi dari keberanian Risman Rachman menyampaikan pandangannya.

Dalam suasana politik yang sering kali penuh sensitivitas, mengemukakan pendapat tentang figur birokrasi bisa menjadi pekerjaan yang tidak nyaman. Apalagi ketika figur tersebut memiliki sejarah hubungan dengan pemerintahan sebelumnya atau pernah berada dalam lingkungan politik yang berbeda.

Tetapi bukankah demokrasi memang membutuhkan orang yang berani menyampaikan argumentasi, bahkan ketika pendapatnya tidak selalu menyenangkan semua pihak?

Risman tidak harus dianggap sedang mengangkat Taqwallah menjadi pahlawan. Membela kapasitas seseorang tidak sama dengan mengkultuskan orang tersebut.

Ini dua perkara yang sangat berbeda.

Kalau seseorang mengatakan bahwa Taqwallah memiliki kemampuan birokrasi yang baik, apakah itu berarti ia sedang menghapus sejarah politik? Kalau seseorang mengakui pengalaman dan kemampuan eksekusi Taqwallah, apakah itu berarti seluruh relawan Mualem-Dek Fadh sedang dikesampingkan?

Tentu tidak.

Dalam logika yang sehat, seseorang bisa saja tidak menjadikan Taqwallah sebagai pahlawan, tetapi tetap mengakui bahwa ia memiliki kemampuan …

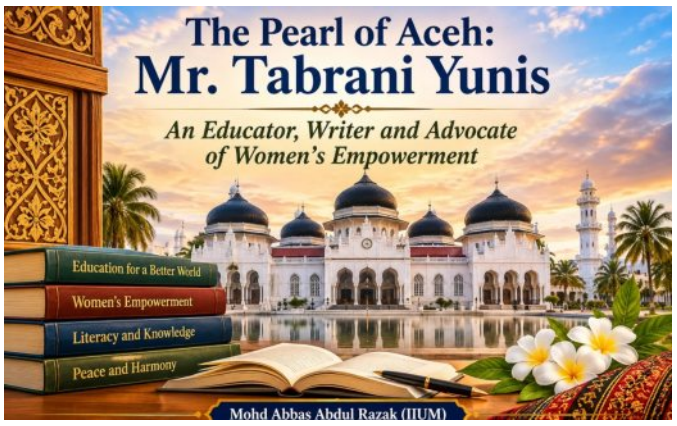
» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

The Pearl of Aceh: Mr. Tabrani Yunis

Oleh Redaksi · 17 Nov, 08.30 WIB



Sebuah penghormatan bagi Mr. Tabrani Yunis sebagai pendidik dan aktivis pemberdayaan perempuan dari Aceh.

By: Mohd Abbas Abdul Razak((The views expressed are those of Dr. Mohd Abbas Abdul Razak from the Department of Fundamental and Interdisciplinary Studies, AHAS KIRKHS, IIUM, and do not necessarily reflect the views of Potret Online))

T a time when the world is losing its trust in mainstream media, humanity has shifted its attention to the Internet and social media. As a result of this shift in perspective, we are now witnessing, all over the world, the emergence of bloggers, podcasters, YouTubers, and other technology-mediated news providers and political analysts.

In relation to this topic, this time around, I would like to write about and celebrate the great contributions made by Mr. Tabrani Yunis, the founder of Potret, a women's magazine, Anak Cerdas, and Potret Online.

All these media platforms were established to cultivate a reading habit and broaden the horizons of the people of Aceh and others in Indonesia.

Interestingly, in 1993, he also established the Centre for Community Development and Education (CCDE), an organisation dedicated to women's empowerment.

Potret magazine, which was first published on 11 January 2003, has now reached its 23rd year of existence.

What began as a women's magazine featuring contributions from ordinary grassroots writers has gradually spread its wings and reached maturity.

Today, alongside creative writing contributions by children and articles by high school students addressing school-related and social issues, the magazine also features quality academic writings submitted by reputed scholars and professionals from within Indonesia and Malaysia.

Tabrani, who hails from Manggeng, Southwest Aceh (Aceh Barat Daya), is a well-known retired teacher, poet, author, workshop facilitator, public speaker, and critical analyst of his country's education policy.

He holds a degree in English Education from the Faculty of Teacher Training and Education, Syiah Kuala University, Banda Aceh.

It is also worth mentioning that he was one of the survivors of the 2004 Indian Ocean Tsunami, a tragedy in which he lost several members of his family.

Earlier in his teaching career, Tabrani travelled to the United States of America, Australia, Finland, and neighbouring ASEAN countries to attend workshops and present papers.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Oleh Redaksi · 17 Nov, 08.47 WIB



Mantan Presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi. FOTO/Net.

Oleh: Erizal((Direktur ABC Riset & Consulting))

INASTI Politik yang dibangun Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi relatif cepat terbentuk, tapi relatif cepat pula runtuh.

Pasca lengser dari kursi Presiden, Jokowi meninggalkan jejak dinasti yang sangat kuat. Putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka langsung duduk di posisi Wakil Presiden. Belum ada dinasti politik yang seperti itu di Indonesia.

Menantunya di Medan, Bobby Nasution, langsung pula menjabat Gubernur Sumatera Utara. Untung saja Perubahan UU Pilkada tidak jadi dilakukan. Kalau jadi, maka bukan mustahil putra bungsunya, Kaesang Pangarep, sudah jadi Gubernur di Jawa Tengah atau di DKI Jakarta. Tidak hanya Ketua Umum PSI saja.

Tapi, belum setahun jadi Gubernur, menantunya Bobby Nasution, hampir saja tergelincir dalam kasus proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.

Kepala Dinas PUPR-nya, Topan Obaja Ginting, terkena OTT KPK. KPK seperti tak bernyali hanya memeriksa menantu Jokowi itu. Entah kenapa? Orang tahu sama tahu saja.

Persis dua tahun lebih sedikit, giliran putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, terpaksa berhenti sebagai Wakil Presiden.

Ada quote dari Denny Indrayana yang bunyinya begini, "Jangan sampai Bapak, saya saja mundur." Akhirnya, Gibran benar-benar menyerahkan surat berhentinya kepada pimpinan MPR. Begitu cepat.

Makanya, saya katakan di atas, dinasti politik Jokowi relatif cepat terbentuk, tapi relatif cepat pula runtuh.

Bahkan, tak satu dua yang mengatakan bahwa pasca terbongkarnya kasus penyadapan ilegal yang dilakukan Eks Kapolri Listyo Sigit cs, dinasti politik Jokowi akan segera tamat. Entah kenapa orang berkata seperti itu?

Apalagi, setelah itu petinggi-petinggi PSI ramai-ramai mengundurkan diri. PSI yang digadang-gadang Jokowi akan menjadi partai besar dan ditakuti partai-partai lainnya, seperti kehilangan darah.

Benar-benar seperti hendak mengalami senjakala sejarah yang sama sekali tidak pernah diduga. Layu sebelum berkembang.

Tapi, setelah Gibran menyatakan berhenti dari posisi Wapres, sejarah baru atau narasi baru sedang dibuat.

Para pendukungnya langsung meneriakkan Gibran Presiden 2029. Video terakhir yang dibuatnya, tembus 70 juta tayangan. Seolah-olah sebanyak itulah pemilih Gibran nantinya. Apakah itu mungkin? Tentu saja, tidak.

Sebab, tiga tahun ke depan itu adalah waktu yang lama. Jangankan merawatnya, bertahan saja akan sangat sulit, apalagi akan melakukan ekspansi ke atas.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ANEKA BERITA

8 BERITA

OTOMOTIF

Modifikasi Toyota Land Cruiser 300 Diubah Arctic Trucks, Kaki-kaki Dibuat Lebih Tangguh

Oleh Van · 17 Nov, 21.57 WIB



Siap menaklukkan segala medan dengan Toyota Land Cruiser modifikasi yang tangguh ini.

JAKARTA — Toyota Land Cruiser 300 dikenal sebagai SUV besar dengan kemampuan menjelajah berbagai medan. Namun, bagi Arctic Trucks, kemampuan standar kendaraan tersebut masih bisa dikembangkan lebih jauh.

Perusahaan modifikasi asal Islandia itu menghadirkan paket AT35 yang membuat Land Cruiser 300 memiliki karakter lebih siap menghadapi medan berat.

Modifikasi ini bukan sekadar mengubah tampilan agar terlihat lebih kekar. Arctic Trucks melakukan sejumlah penyesuaian pada bagian kaki-kaki, dimensi roda, hingga komponen pendukung lainnya.

Tujuannya meningkatkan kemampuan kendaraan ketika harus melintasi permukaan tanah tidak rata, pasir, bebatuan, maupun jalur berlumpur.

Dalam brosur resmi pengembangan LC300 AT35, Arctic Trucks menjelaskan bahwa penggunaan ban berukuran 35 inci memberikan keuntungan ketika kendaraan melintasi medan sulit. Salah satunya berkaitan dengan distribusi tekanan kendaraan terhadap permukaan tanah.

"Dengan tekanan ban yang disesuaikan, bidang kontak ban dapat menjadi lebih luas sehingga membantu kendaraan bergerak di permukaan lunak seperti pasir." Tulis Arctic Trucks dalam situs resminya yang dilihat Selasa (17/11/2026).

Perubahan paling mencolok terlihat pada penggunaan ban all-terrain berukuran 35 inci yang dipadukan dengan pelek 17 inci. Ukuran tersebut membutuhkan penyesuaian pada bagian rumah roda serta pemasangan fender tambahan agar ban memiliki ruang gerak yang memadai.

Arctic Trucks juga melakukan peningkatan pada sistem suspensi. Perubahan mencakup penggunaan pegas dan peredam kejut yang disesuaikan dengan karakter ban lebih besar.

Suspensi tersebut dirancang untuk meningkatkan jarak terendah kendaraan dari permukaan tanah sekaligus membantu menjaga artikulasi roda ketika melintasi jalur tidak rata.

Berdasarkan spesifikasi pengembangan LC300 AT35, peningkatan ground clearance mencapai sekitar 40 milimeter. Jarak terendah kendaraan yang sebelumnya berada di kisaran 220–230 milimeter meningkat menjadi sekitar 260–270 milimeter, bergantung pada varian penggeraknya.

Selain suspensi dan ban, tampilan eksterior juga mengalami perubahan. Fender dibuat lebih lebar untuk mengakomodasi dimensi roda, sementara komponen pelindung tambahan dipasang untuk mengurangi risiko kerusakan bodi ketika melintasi jalur berbatu.

Untuk kebutuhan ekspedisi, snorkel dan pelindung kolong menjadi komponen pendukung yang tidak kalah penting. Snorkel membantu menyediakan jalur masuk udara mesin pada kondisi tertentu, terutama ketika melewati genangan air.

Sementara itu, pelindung kolong berfungsi mengurangi risiko benturan pada komponen penting ketika kendaraan melintasi bebatuan atau permukaan tidak rata.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EDUKASI

Gus Ipul Siapkan 8 Hektare Lahan UI untuk Sekolah Rakyat, Ini Tahap Selanjutnya

Oleh Van · 17 Nov, 13.50 WIB



Menjelajahi ruang terbuka hijau di tengah kota menggunakan Google Earth. Alat ukur menunjukkan area yang dipilih seluas 8 hektar.

JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di atas lahan sekitar 8 hektare milik Universitas Indonesia (UI). Rencana tersebut dibahas bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Senin, 16 November 2026.

Gus Ipul mengatakan UI bersedia menyediakan lahan di sisi kampus yang masuk wilayah administratif DKI Jakarta. Dalam keterangannya, ia menyebut area tersebut merupakan bagian dari Hutan Kota UI.

“Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari hutan kota UI,” kata Gus Ipul.

Ia menyebut luas Hutan Kota UI lebih dari 100 hektare. Dari kawasan tersebut, pemerintah merencanakan pemanfaatan sekitar 8 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

“Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Menunggu Peninjauan dan Perjanjian Kerja Sama

Gus Ipul menjelaskan rencana tersebut masih membutuhkan koordinasi administratif dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan UI.

Pemerintah juga berencana meninjau langsung lokasi yang diusulkan sebelum melanjutkan proses kerja sama. Setelah peninjauan, PKS akan disiapkan sebagai dasar pelaksanaan rencana tersebut.

“Nanti kita ke sana mengecek tempatnya, setelah itu PKS. Mudah-mudahan bisa segera dieksekusi untuk dibangun,” kata Gus Ipul.

Pertemuan Gus Ipul dan Pramono juga membahas rencana perluasan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Margaguna, Jakarta Selatan. Perluasan itu direncanakan dengan memanfaatkan lahan fasilitas panti sosial milik Pemprov DKI yang akan direlokasi.

Namun, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di lahan UI kemudian mendapat penjelasan lebih lanjut dari pihak kampus. Pada Selasa, 17 November 2026, UI menegaskan bahwa lahan yang diusulkan untuk proyek tersebut bukan berada di dalam kawasan Hutan Kota UI. (*)

DIGITAL

47 Persen Korban Penipuan Digital Tertipu Berulang, Dampaknya Bikin Warga Tak Lagi Percaya Platform Online

Oleh Van · 17 Nov, 21.51 WIB



Waspadai ancaman siber dan penipuan telepon dari identitas yang tersembunyi.

JAKARTA — Korban penipuan digital berulang di Indonesia mencapai 47 persen dalam setahun terakhir, berdasarkan laporan Global Anti-Scam Alliance (GASA) 2026.

Laporan bertajuk State of Scams in Indonesia 2026 itu dipublikasikan pada Senin, 16 November 2026, dengan melibatkan 1.200 orang dewasa di Indonesia.

Temuannya menunjukkan penipuan digital tidak hanya mengancam kondisi keuangan, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan psikologis masyarakat.

Hampir Separuh Korban Mengalami Penipuan Berulang

GASA mencatat 70 persen responden pernah menghadapi upaya penipuan dalam 12 bulan terakhir.

Dari kelompok tersebut, 35 persen mengaku pernah berinteraksi dengan pelaku, sementara 10 persen mengalami kehilangan uang atau data pribadi.

Sebanyak 47 persen korban juga mengaku mengalami penipuan berulang, sehingga ancaman tersebut tidak berhenti setelah satu kejadian.

Dampaknya turut dirasakan secara psikologis, dengan 76 persen korban menyatakan pengalaman penipuan memengaruhi kesejahteraan mental mereka.

Sebanyak 58 persen responden mengaku percaya diri mampu mengenali penipuan, tetapi temuan tersebut menunjukkan risiko tetap ada.

OJK Catat Ratusan Ribu Laporan Penipuan

Di Indonesia, penanganan penipuan transaksi keuangan dilakukan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang dikoordinasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam siaran pers pada 6 November 2026, OJK mencatat IASC menerima 737.686 laporan sejak beroperasi pada 22 November 2024 hingga 28 Oktober 2026.

Sebanyak 743.589 rekening terkait penipuan telah diblokir, dengan dana korban yang berhasil diamankan mencapai Rp967,5 miliar.

Dari jumlah tersebut, dana sebesar Rp208,9 miliar telah dikembalikan kepada korban melalui rekening di 24 bank.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi sebelumnya menyebut pengembalian dana korban sebagai bentuk perlindungan negara.

"Pengembalian dana korban scam ini juga menjadi simbol nyata kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan saat ini yang semakin kompleks, semakin inovatif, semakin unthinkable modus-modusnya," kata Friderica.

Korban Diminta Segera Melapor

IASC mengimbau masyarakat yang mengalami penipuan transaksi keuangan segera melaporkan kejadian melalui situs resmi iasc.ojk.go.id.

Pelapor perlu menyiapkan bukti transfer, identitas rekening tujuan, nomor telepon pelaku, serta tangkapan layar percakapan.

Selain melapor ke IASC untuk upaya pemblokiran dana, korban juga perlu membuat laporan kepada kepolisian untuk proses hukum.

Kecepatan pelaporan menjadi penting karena dana hasil penipuan dapat segera dipindahkan ke rekening lain atau digunakan pelaku.(*)

LINGKUNGAN

Karhutla di Kaltim Berlangsung hingga Subuh, Api Disebut Menyebar di Sejumlah Titik

Oleh Van · 17 Nov, 14.50 WIB



KALTIM — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilaporkan terjadi di kawasan Bonles, Kalimantan Timur, sejak Senin sore hingga Selasa, 17 November 2026. Api disebut masih menyebar di beberapa titik hingga waktu subuh.

Informasi tersebut disampaikan akun Threads @puturmdn pada Selasa pagi. Dalam unggahannya, pemilik akun menyebut petugas masih berupaya memadamkan api di sejumlah lokasi.

"Mengabarkan dari KALTIM, sejak Senin sore hingga subuh tadi 05.14 WITA. Masih terjadi KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN di kawasan Bonles, di beberapa titik api masih menyebar dan para petugas masih berjibaku dengan api," tulis akun tersebut.

Pemilik akun juga berharap kebakaran segera dapat dipadamkan. Namun, unggahan itu belum menyertakan keterangan mengenai luas area yang terbakar maupun lokasi administratif kawasan Bonles.

BPBD Kaltim Catat Sejumlah Kejadian Karhutla

Berdasarkan data kejadian pada situs resmi BPBD Kalimantan Timur, sejumlah kebakaran lahan tercatat di beberapa wilayah selama November 2026.

Lokasi yang tercantum antara lain Batu Kajang dan Jone di Kabupaten Paser serta Bukuan di Kota Samarinda.

Sementara itu, laporan BNPB tertanggal 15 November 2026 menyebut satuan tugas darat berhasil memadamkan karhutla seluas sekitar 2,33 hektare pada empat titik api di Kabupaten Paser dan Kutai Kartanegara.

Penanganan tersebut melibatkan BPBD, pemadam kebakaran, TNI, Polri, Manggala Agni, relawan, dan unsur masyarakat. Meski demikian, laporan itu tidak menyebut kawasan Bonles sebagai lokasi kebakaran.

Hingga berita ini disusun, belum ditemukan keterangan resmi BPBD Kaltim yang secara khusus mengonfirmasi kebakaran di kawasan Bonles pada 16–17 November 2026.

Data resmi yang tersedia juga belum memberikan rincian mengenai titik api, luas lahan terbakar, maupun kondisi terakhir pemadaman di lokasi tersebut.(*)

LIFESTYLE

Berawal dari Fans, Tiara Andini Bersanding Bersama Iqbaal Ramadhan menjadi BA Momoyo

Oleh Redaksi · 17 Nov, 15.33 WIB



BANDA ACEH - Tiara Andini Resmi Bergabung Jadi Brand Ambassador Momoyo Bersama Iqbaal Ramadhan, Luncurkan White Peach Oolong Milktea di Hadapan 700+ Fans.

Momoyo, brand minuman segar favorit anak muda Indonesia, menggelar acara spesial Meet & Greet Momoyo bersama Iqbaal Ramadhan dan Tiara Andini di Summarecon Mall Serpong.

Acara yang dipandu oleh MC Dave Hendrik ini menjadi momen spesial untuk dua pengumuman besar: bergabungnya Tiara Andini sebagai Brand Ambassador terbaru Momoyo dan peluncuran produk terbaru White Peach Oolong Milktea.

Setelah sukses berkolaborasi dengan Iqbaal Ramadhan, Momoyo kini menghadirkan Tiara Andini untuk melengkapi energi baru brand yang lebih fresh, sweet, dan uplifting. Kolaborasi dua figur muda inspiratif ini diharapkan dapat semakin dekat dengan konsumen setia Momoyo, khususnya Gen Z dan Millennials. Antusiasme terlihat luar biasa, lebih dari 700 orang memadati area atrium Summarecon Mall Serpong untuk bertemu langsung dengan kedua idolanya. Acara dikemas secara interaktif melalui talkshow "Cerita Segar Bareng Iqbaal & Tiara", di mana keduanya berbagi cerita perjalanan menjadi bagian dari keluarga Momoyo dan kesan pertama mereka saat mencoba varian baru. Keseruan berlanjut dengan sesi Product Making Show, di mana Iqbaal dan Tiara meracik langsung White Peach Oolong Milktea dan membagikannya kepada fans beruntung, serta sesi foto bersama.

Varian White Peach Oolong Milktea menjadi bintang utama hari itu. Memadukan keharuman buah White Peach yang manis dan juicy, dengan karakter teh Oolong yang ringan, wangi, dan elegan, serta creamy milktea khas Momoyo yang lembut. Cocok untuk teman yang mencari kesegaran dengan rasa yang tidak terlalu berat.

"Aku excited banget resmi jadi bagian dari keluarga Momoyo. Dari dulu ngikutin Momoyo, sekarang bisa jadi BA bareng Iqbaal. Semoga teman-teman suka White Peach Oolong Milktea seperti aku," Tiara Andini, Brand Ambassador Momoyo

Perwakilan Momoyo menyampaikan bahwa peluncuran ini adalah komitmen untuk terus berinovasi.

"Kehadiran Tiara melengkapi semangat Momoyo. Kami percaya kolaborasi Iqbaal dan Tiara akan membawa warna baru. White Peach Oolong Milktea adalah jawaban kami atas tren rasa buah dan teh yang sedang digemari anak muda, tapi dengan sentuhan khas Momoyo yang creamy dan menyegarkan," ujar perwakilan Momoyo. White Peach Oolong Milktea sudah tersedia di seluruh outlet Momoyo di Indonesia mulai 14 November 2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

VIDEO

Video Pengunduran Diri Gibran Tembus 156,2 Juta Views, Potensi Dapat Rp2,9 Miliar

Oleh Redaksi · 17 Nov, 13.26 WIB



Mantan Wakil Presiden RI yang terhormat, Gibran Rakabuming Raka. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Hampir sepekan berlangsung, video pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI masih menjadi topik hangat di media sosial.

Video pengunduran diri Gibran di instagram Selasa (17/11/2026) tembus 73,5 juta views.

Dalam video tersebut Gibran memohon maaf atas pengunduran dirinya.

Gibran terlihat memakai dasi merah dan setelan jas berwarna hitam dalam video pengunduran dirinya.

Selain video pengunduran diri, ada 27 video yang diunggah Gibran secara bersamaan sebelum mengumumkan mundur dari pemerintahan.

Puluhan video yang diunggah serempak sehari sebelum pengunduran diri itu juga mendulang views cukup tinggi.

Maka apabila ditotal 28 video tersebut mendulang views hingga 156,2 juta views.

Apabila monetisasi dibuka, maka Gibran bisa mendapatkan potensi Reels Play Bonus senilai Rp1,9 miliar hingga Rp2,9 miliar.

Namun biasanya akun pejabat negara monetisasinya tidak dibuka sehingga Gibran kemungkinan tidak mendapatkan adsanse dari video pengunduran dirinya.

Seperti diketahui dalam video tersebut Gibran Rakabuming Raka mengakui keputusannya maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 sempat mengecewakan partai Politik yang selama ini membimbing dan membesarkannya.

Keputusan Gibran saat itu membuat dirinya berada di posisi berseberangan dengan partai yang memiliki peran dalam perjalanan politiknya.

Pengakuan tersebut disampaikan Gibran dalam keterangan resmi yang diunggah melalui akun instagramnya Kamis (12/11/2026) sesaat setelah menyerahkan surat pengunduran diri.

Dalam pernyataannya, Gibran tidak menampik bahwa pilihan politik yang diambilnya saat itu membawa konsekuensi, termasuk kekecewaan dari partai yang telah membimbing perjalanan politiknya.

Meski demikian, Gibran menjelaskan bahwa keputusan menerima tawaran untuk mendampingi Prabowo dilandasi oleh niat baik dan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Menurut dia, keputusan tersebut berkaitan dengan pesan besar mengenai keberlanjutan pembangunan bangsa, keterlibatan generasi muda, serta pentingnya menyatukan berbagai elemen masyarakat.

EDUKASI

Mendikdasmen Abdul Mu’ti Ungkap Banyak Anggota Dewan Lulusan Paket C

Oleh Redaksi · 17 Nov, 13.24 WIB



BANDA ACEH - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan banyak anggota dewan yang merupakan lulusan pendidikan kesetaraan Paket C. Informasi tersebut diperolehnya dari pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) saat melakukan kunjungan ke Majalengka, Jawa Barat.Mu’ti menceritakan, salah satu PKBM yang dikunjunginya memiliki lebih dari 300 peserta didik. Dari jumlah tersebut, peserta program pendidikan kesetaraan Paket C menjadi kelompok terbanyak.

“Bahkan, banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C. Ini cerita dari pengelolanya,” ujar Mu’ti sambil tertawa dalam rapat bersama anggota DPR RI, Senin (16/11/2026).

Menurut Mu’ti, tingginya jumlah peserta pendidikan kesetaraan menunjukkan pentingnya keberadaan PKBM dalam membuka akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak dapat menempuh jalur sekolah formal.

Terlebih, angka anak tidak sekolah di Indonesia masih menjadi persoalan. Penyebabnya tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga faktor sosial, budaya, dan kondisi geografis.

Kemendikdasmen Perkuat Program Paket A, B, dan C

Mu’ti menjelaskan, sejumlah anak tidak dapat melanjutkan pendidikan formal karena berbagai kendala. Faktor kultural, seperti pernikahan pada usia muda, menjadi salah satu penyebab. Selain itu, kondisi geografis juga membuat sebagian anak kesulitan menjangkau sekolah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemendikdasmen berencana memperkuat pendidikan kesetaraan melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C.

Pemerintah juga akan meningkatkan penyelenggaraan berbagai program kursus serta memperkuat peran PKBM sebagai penyedia layanan pendidikan bagi masyarakat.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia.

Pendidikan kesetaraan menjadi salah satu jalur alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Melalui program ini, peserta didik tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan sesuai jenjang yang dibutuhkan.

Kemendikdasmen Benahi Tata Kelola PKBM

RUU Sisdiknas Ditargetkan Rampung Akhir September, Komisi X Terima Masukan Publik

Di samping memperluas akses pendidikan, Mu’ti menegaskan perlunya pembenahan tata kelola PKBM. Menurutnya, pengawasan harus diperkuat karena lembaga tersebut menerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

Pendataan peserta didik dan pelaksanaan pembelajaran harus dipastikan berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah juga perlu memastikan proses pendidikan kesetaraan dilaksanakan secara tertib berdasarkan jenjang.

Mu’ti mencontohkan adanya laporan peserta didik yang menyelesaikan Paket C sebelum menuntaskan Paket B. Menurutnya, praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pendidikan kesetaraan karena setiap jenjang harus …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ISLAM

Job Fair, Atasi Pengangguran Tanpa Kesejahteraan

Oleh Rut sw · 17 Nov, 10.38 WIB



Bursa kerja mungkin membuka peluang, namun kesejahteraan pekerja tetap menjadi tanda tanya besar. Mari kita renungkan solusi nyata untuk masa depan yang lebih sejahtera. FOTO/AI for HAI.

EMERINTAH Kota (Pemkot) Surabaya memperluas akses kesempatan kerja yang inklusif melalui Grand Job Fair November 2026 yang mulai digelar, Selasa, 17 November 2026.

Sebanyak 49 perusahaan membuka 3.013 lowongan kerja, 1.500 posisi ditawarkan untuk pekerjaan dalam negeri, 912 lowongan luar negeri dan 601 posisi bagi penyandang disabilitas mencakup jenis disabilitas tunanetra parsial, tunarungu, tunawicara, dan tunadaksa ringan.

Melalui kegiatan ini, Pemkot tidak hanya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, tetapi juga mendorong proses rekrutmen yang memberikan kesempatan setara bagi seluruh pencari kerja.

Grand Job Fair yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya ini menjadi salah satu upaya Pemkot Surabaya memperluas akses masyarakat terhadap lapangan kerja sekaligus meningkatkan peluang pencari kerja untuk mendapatkan penempatan.

Hal ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Disperinaker Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro.

Pendataan melalui aplikasi ASSiK juga menjadi salah satu upaya Pemkot Surabaya dalam memperluas jangkauan layanan ketenagakerjaan.

Sepanjang 2025 hingga 2026, tercatat sekitar 14.000 pencari kerja dalam sistem tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 1.000 warga yang masuk kelompok desil 1–5 telah berhasil mendapatkan pekerjaan.

Kesejahteraan Masih Dipertanyakan

Berdasarkan data dari Pemkot Surabaya dan BPS, untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,91 persen (turun dari tahun sebelumnya 6,76 persen ditahun 2023 dan 7,62 peesen di tahun 2012) dari jumlah angkatan kerja: Sekitar 152,11 juta orang. Jadi total jumlah pengangguran terbuka sekirar 7,47 juta orang.

Sungguh bukan angka main-main. Sementara Grand Job Fair hanya menyediakan 3.013 lowongan pekerjaan dari 40 perusahaan. Ini hanya angka pengangguran di Surabaya, bagaimana dengan wilayah yang lain di Indonesia?

BPS juga mendata ada penurunan angka pengangguran, tentu ini masih mengundang tanya, benarkah semua sudah mendapat pekerjaan, pindah kota, atau sudah bekerja meski hanya 1 jam perhari sebagaimana definisi bekerja terbaru dari BPS? B

elum ada data yang bisa memastikannya.

Artinya, masalah pengangguran masih belum teratasi tuntas.

Yang sudah bekerja pun sebetulnya masih ketar-ketir sebab sistem rekrutmen karyaawan hari ini menggunakan sistem outsorshing (kerja kontrak) , antara 3,6 hingga 12 bulan saja.

Apalagi, rata-rata perusahaan mensyaratkan fresh graduate, dalam 1 tahun bekerja, tentu pengalaman masih minim masih dihadapkan pula pada habisnya masa kontrak.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

REDAKSI

PENERBIT PT. Harian Aceh Indonesia
PEMIMPIN REDAKSI Muhammad Saman
REDAKTUR PELAKSANA Adam
REDAKTUR Hayat
SEKRETARIS REDAKSI Ola

Jurnalis
Banda Aceh:
1. IRWAN SAPUTRA - NOMOR 12334-PWI/WDa/DP/XII/2017/01/01/912.
2. Hamdani

Bireuen:
1. M. Ilham Sakubat

Lhokseumawe:
1. Yoppi

Aceh Barat:
1. Kurniawan

Jawa Timur:
1. Rut Sriwahyuni

Fotografer:
1. Mishabul Amin
2. Nazaruddin

Social Media Manager:
1. Syukur M. Amin